



Katalog BPS : 5106011

ANALISIS KEBIJAKAN PERTANIAN INDONESIA

Implementasi dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani
Dari Perspektif Sensus Pertanian 2013

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

ANALISIS KEBIJAKAN PERTANIAN INDONESIA

Implementasi dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani
Dari Perspektif Sensus Pertanian 2013

<http://www.bps.go.id>

© Badan Pusat Statistik

Analisis Kebijakan Pertanian Indonesia
Implementasi dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani dari Perspektif Sensus Pertanian
2013

ISBN : 978-979-064-794-7

No. Publikasi : 07310.1410

Katalog BPS : 5106011

Diproduksi : Badan Pusat Statistik

Pengarah : Dr. Suhariyanto

Penanggung Jawab : Dr. Margo Yuwono, S.Si., M.Si.

Editor : Harmawanti Marhaeni, M.Sc.

Penulis : Program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis IPB
Subdirektorat Analisis Statistik BPS RI

Desain Cover : Dimas Hari Santoso, S.Si.

Desain Layout : Dimas Hari Santoso, S.Si.

Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014

xiv + 106 halaman; 17,6 x 25 cm



KATA PENGANTAR

Rangkaian kegiatan pengumpulan data pertanian secara lengkap dan komprehensif telah dilakukan, diantaranya melalui kegiatan sensus dan survei. Sensus Pertanian 2013 (ST2013) yang telah dilaksanakan pada bulan Mei 2013 menghasilkan informasi tentang populasi usaha pertanian dan komoditas yang dihasilkan. Sebagai lanjutannya, Survei Pendapatan RTUP dilaksanakan untuk menyediakan data tentang keadaan sosial ekonomi RTUP.

Untuk lebih mendayagunakan data hasil pencacahan kedua kegiatan tersebut, publikasi berjudul “Analisis Kebijakan Pertanian Indonesia: Implementasi dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani dari Perspektif Sensus Pertanian” ini dibuat, dengan tujuan untuk mengaji kebijakan peningkatan kesejahteraan petani, menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani dan merumuskan implikasi kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan petani. Harapannya, sesuai dengan jargon ST2013 “menyediakan informasi untuk masa depan petani yang lebih baik” maka publikasi ini dapat membantu para perumus kebijakan untuk mewujudkan pertanian yang tangguh.

Banyak pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para tenaga ahli Program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan banyak masukan. Akhir kata, semoga publikasi ini bermanfaat bagi penyempurnaan perencanaan kebijakan pertanian dan berkontribusi dalam pembangunan Indonesia secara umum.

Jakarta, November 2014

Kepala Badan Pusat Statistik RI

Dr. Suryamin, M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Permasalahan	3
1.2. Tujuan	5
1.3. Output.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
II. UPAYA MENGUKUR DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Teori Kesejahteraan	9
2.2. Kebijakan Pembangunan Pertanian	16
2.3. Kebijakan Bantuan Langsung.....	24
2.4. Kerangka Pemikiran Konseptual.....	26
III. METODE KAJIAN.....	29
3.1. Kerangka Pemikiran Operasional.....	31
3.2. Ukuran Kesejahteraan Petani.....	32
3.3. Jenis dan Sumber Data	32
3.4. Teknik Analisis Data.....	34
IV. KARAKTERISTIK DAN SUMBER PENDAPATAN RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN (RTUP).....	37
4.1. Karakteristik Rumah Tangga Usaha Pertanian	39
4.2. Struktur Sumber Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian	47
V. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG DITERIMA RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN (RTUP)	51
5.1. Subsidi/Bantuan/Hibah.....	53
5.2. Penyuluhan	61

VI. PETANI INDONESIA MAKIN SEJAHTERA? PERSPEKTIF DARI SENSUS PERTANIAN 2013	67
6.1. Perkembangan Nilai Tukar Petani	69
6.2. Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Petani	70
6.3. Kecukupan Pendapatan	75
VII. DETERMINAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN	81
7.1. Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP), Struktur Sumber Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Keadaan Ekonomi RTUP	83
7.2. Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP), Struktur Sumber Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kecukupan Pendapatan RTUP	88
7.3. Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP), Struktur Sumber Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Nilai Tukar Petani (NTP)	92
VIII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	99
8.1. Kesimpulan	101
8.2. Implikasi Kebijakan	102
DAFTAR PUSTAKA.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Nilai Subsidi Benih 2003-2014	18
Tabel 4.1.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan yang dikuasai Tahun 2003 dan 2013.....	39
Tabel 4.2.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Menurut Provinsi Tahun 2003 dan 2013.....	41
Tabel 4.3.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem Menurut Provinsi Tahun 2003 dan 2013	43
Tabel 4.4.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor Pertanian Tahun 2003 dan 2013.....	44
Tabel 4.5.	Jumlah Perusahaan Pertanian berbadan Hukum Menurut Subsektor Pertanian Tahun 2003 dan 2013.....	45
Tabel 4.6.	Jumlah Petani Menurut Sektor/Subsektor dan Jenis Kelamin Tahun 2013.....	45
Tabel 4.7.	Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Petani Utama Tahun 2013	46
Tabel 4.8.	Struktur Pendapatan RTUP Nasional Berdasarkan Subsektor Pertanian Tahun 2003 dan Tahun 2013 (%).....	49
Tabel 7.1.	Hubungan Karakteristik RTUP dengan Peningkatan Kondisi Ekonomi RTUP.....	84
Tabel 7.2.	Korelasi antara Struktur Sumber Pendapatan RTUP dengan Peningkatan Kondisi Ekonomi RTUP	84
Tabel 7.3.	Korelasi antara Bantuan/Subsidi yang Diterima RTUP dengan Peningkatan Kondisi Ekonomi.....	85
Tabel 7.4.	Korelasi antara Penyuluhan yang Diikuti RTUP dengan Peningkatan Kondisi Ekonomi.....	85
Tabel 7.5.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Keadaan Ekonomi Rumah Tangga Usaha Pertanian.....	87
Tabel 7.6.	Hubungan Karakteristik RTUP dengan Kecukupan Pendapatan RTUP	88

Tabel 7.7. Korelasi antara Struktur Sumber Pendapatan RTUP dengan Kecukupan Pendapatan RTUP	89
Tabel 7.8. Korelasi antara Bantuan/Subsidi yang Diterima RTUP dengan Kecukupan Pendapatan RTUP	89
Tabel 7.9. Korelasi antara Penyuluhan yang Diikuti RTUP dengan Kecukupan Pendapatan RTUP	90
Tabel 7.10. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecukupan Pendapatan RTUP	91
Tabel 7.11. Korelasi antara Karakteristik RTUP dengan NTP	92
Tabel 7.12. Korelasi antara Sumber Pendapatan RTUP dengan NTP	93
Tabel 7.13. Korelasi antara Bantuan/Subsidi yang Diterima RTUP dengan NTP	94
Tabel 7.14. Korelasi antara Penyuluhan yang Diikuti RTUP dengan NTP	95
Tabel 7.15. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani	96
Tabel 7.16. Korelasi antara Variabel NTP, Peningkatan Keadaan Ekonomi dan Kecukupan Pendapatan	97

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Model Nested Spheres of Poverty (NESP)	10
Gambar 2.2.	Pembentukan Nilai Tukar Petani (NTP)	15
Gambar 2.3.	Kerangka Pemikiran Konseptual	27
Gambar 3.1.	Kerangka Pemikiran Operasional.....	32
Gambar 4.1.	Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Pendidikan.....	47
Gambar 4.2.	Proporsi Jenis Kegiatan Terhadap Pendapatan RTUP.....	48
Gambar 4.3.	Persentase Proporsi Rata-Rata Pendapatan Berdasarkan Sumber Pendapatan.....	48
Gambar 5.1.	Jumlah RTUP Penerima Bantuan Tahun 2003 dan 2013.....	53
Gambar 5.2.	Sebaran Jumlah RTUP Penerima Bantuan Tahun 2003 dan 2013 di 30 Provinsi Indonesia	54
Gambar 5.3.	Jumlah RTUP Penerima Bantuan Pembiayaan Kredit di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013	55
Gambar 5.4.	Jumlah RTUP Penerima Bantuan Bibit/Benih/Induk di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013	56
Gambar 5.5.	Jumlah RTUP Penerima Bantuan Pupuk/ Vitamin di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013	57
Gambar 5.6.	Jumlah RTUP Penerima Bantuan Pestisida dan Obat-obatan di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013.....	58
Gambar 5.7.	Jumlah RTUP Penerima Bantuan Alat dan Mesin di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013	59
Gambar 5.8.	Jumlah RTUP Penerima Bantuan Ternak di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013	60
Gambar 5.9.	Jumlah RTUP Penerima Bantuan Ternak di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013	60
Gambar 5.10.	Jumlah RTUP yang Pernah Mengikuti Penyuluhan Pertanian Tahun 2003 dan 2013.....	61
Gambar 5.11.	Jumlah Rumah Tangga yang Pernah Mengikuti Penyuluhan Pertanian di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013	62
Gambar 5.12.	Jumlah RTUP yang Mengikuti Penyuluhan Budidaya di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013	63
Gambar 5.13.	Jumlah RTUP yang Mengikuti Penyuluhan Pengolahan Hasil di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013.....	63
Gambar 5.14.	Jumlah RTUP yang Mengikuti Penyuluhan Pemasaran Hasil di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013.....	64

Gambar 5.15. Jumlah RTUP yang Mengikuti Penyuluhan Lainnya di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013	65
Gambar 6.1. Perkembangan IT, IB dan NTP Nasional, 2008-Oktober 2014...	69
Gambar 6.2. Perkembangan NTP Nasional Menurut Sub Sektor, 2008-Oktober 2014	70
Gambar 6.3. Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Kondisi Ekonomi Sangat Meningkatkan Tahun 2003 dan 2013	71
Gambar 6.4. Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Kondisi Ekonomi Meningkatkan Tahun 2003 dan 2013...	72
Gambar 6.5. Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Kondisi Ekonomi Tetap Tahun 2003 dan 2013.....	72
Gambar 6.6. Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Kondisi Ekonomi Menurun Tahun 2003 dan 2013	74
Gambar 6.7. Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Kondisi Ekonomi Sangat Menurun Tahun 2003 dan 2013.....	75
Gambar 6.8. Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Pendapatan Lebih dari Cukup Tahun 2003 dan 2013	76
Gambar 6.9. Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Pendapatan Cukup Tahun 2003 dan 2013	77
Gambar 6.10. Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Pendapatan Kurang Tahun 2003 dan 2013.....	78
Gambar 6.11. Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Pendapatan Kurang Sekali Tahun 2003 dan 2013.....	79

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berbagai kebijakan telah dijalankan agar kesejahteraan petani dapat disejajarkan dengan pekerja di sektor lainnya. Namun, kesejahteraan petani masih menjadi yang terendah dibanding pekerja di sektor ekonomi lainnya. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelusuran mengapa hal tersebut masih terjadi terutama dari sisi kebijakan. Dalam kajian ini, tingkat kesejahteraan petani menggunakan Persepsi Kesejahteraan yang diproksi melalui variabel Peningkatan Keadaan Ekonomi dan Kecukupan Pendapatan yang datanya terdapat di data Sensus Pertanian. Sebagai pembandingan, juga akan digunakan pendekatan menggunakan Nilai Tukar Petani karena pendekatan tersebut cukup populer sebagai indikator tingkat kesejahteraan petani.

Secara umum kajian bertujuan untuk merumuskan kebijakan peningkatan kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian Indonesia. Secara lebih rinci tujuan kajian adalah: (1) Menggambarkan karakteristik rumah tangga usaha pertanian Indonesia; (2) Mengaji kebijakan peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia; (3) Menganalisa tingkat kesejahteraan petani Indonesia; (4) Menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani; dan (4) Merumuskan implikasi kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Dengan keterbatasan data sensus pertanian 2003 dan data sensus pertanian 2013, maka hanya digunakan tiga kelompok variabel sebagai determinan kesejahteraan rumah tangga pertanian, yaitu: (1) Karakteristik Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP), (2) struktur sumber pendapatan, dan (3) kebijakan (bantuan subsidi dan penyuluhan).

Dari hasil sensus pertanian tahun 2013, karakteristik sebagian besar usia petani utama berada pada kisaran 45-54 tahun, kondisi ini menunjukkan bahwa usia petani utama berada di ujung usia produktif. Adapun jika dilihat dari tingkat pendidikannya, sebanyak 72,6 persen tenaga kerja sektor pertanian hanya berpendidikan sekolah dasar. Untuk karakteristik berdasar luasan lahan, rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2013 adalah 0,86 hektar, atau lebih luas dibandingkan dengan keadaan tahun 2003, yaitu dari sekitar 0,35 hektar. Disisi lain, jika dilihat menurut pengelompokan luas lahan yang dikuasai RTUP, terjadi penurunan di hampir semua kelompok penguasaan lahan. Penurunan terbesar terjadi pada golongan penguasaan lahan <0,1 hektar sekitar 5 juta rumah tangga. Penurunan tersebut disebabkan karena peningkatan jumlah dan persentase petani dengan luas di atas 0,5 hektar, atau

peralihan lapangan usaha ke sektor nonpertanian atau bahkan hanya menjadi buruh tani (BPS, 2014b). Jika berdasarkan subsektor, rumah tangga usaha tanaman pangan adalah yang paling banyak diusahakan (17,7 juta rumah tangga), diikuti oleh rumah tangga usaha peternakan (12,9 juta rumah tangga). Sedangkan untuk perusahaan pertanian yang berbadan hukum, perusahaan di subsektor perkebunan adalah yang paling banyak diusahakan. Pada tahun 2013 perusahaan subsektor perkebunan mencapai 2.216 perusahaan, meningkat sebesar 19,01 persen dibanding tahun 2003.

Proporsi pendapatan yang bersumber dari kegiatan sebagai petani mengalami penurunan, dari yang sebelumnya 60,34% di tahun 2003 menjadi 36,76% di tahun 2013. Hal ini bertolak belakang dengan jenis kegiatan buruh di sektor pertanian yang mengalami kenaikan dari 24,77% di tahun 2003 menjadi 49,03% di tahun 2013. Sedangkan jika dilihat dari subsektor sumber pendapatan, struktur pendapatan RTUP bersumber dari kegiatan di subsektor tanaman padi dan palawija, diikuti dengan tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura, baik itu pada buruh/karyawan maupun yang berusaha.

Dari hasil sensus pertanian juga ditangkap mengenai bantuan pertanian yang didapat rumah tangga pertanian. Secara keseluruhan jumlah RTUP yang menerima bantuan pertanian pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2003. Adapun jenis bantuan yang mengalami peningkatan jumlah RTUP penerima yaitu berupa bantuan bibit/benih/induk, bantuan subsidi pupuk, bantuan pestisida dan obat-obatan dan bantuan ternak.



Perkembangan Indeks Harga yang Diterima (IT) pada periode tahun 2008 hingga bulan Oktober 2014 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,13 persen. Demikian juga nilai Indeks Harga yang Dibayar (IB) pada periode yang sama mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,56 persen. Namun demikian, peningkatan IT yang lebih besar dibandingkan IB menyebabkan NTP bulanan pada periode tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen. Apabila perkembangan NTP tersebut dilihat berdasarkan subsektor, maka pola NTP tersebut berfluktuasi dan cenderung meningkat. NTP subsektor tanaman pangan naik sebesar 0,43 persen, subsektor hortikultura naik sebesar 0,90 persen, subsektor peternakan naik sebesar 0,54 persen dan subsektor perikanan naik sebesar 0,60 persen. Sementara pada saat yang sama, subsektor tanaman perkebunan rakyat turun sebesar 0,08 persen.

Berdasarkan hasil sensus pertanian, jumlah RTUP yang pendapatannya meningkat pada tahun 2013 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2003. Sedangkan untuk tingkat kecukupan pendapatan rumah tangga petani, sensus pertanian mengategorikan menjadi: lebih dari cukup, cukup, kurang dan kurang sekali. Dari seluruh rumah tangga petani yang ada di 30 Provinsi Indonesia pada tahun 2003 persentase rumah tangga petani yang merasa pendapatannya lebih dari cukup berkisar 3,30 persen, jumlah tersebut meningkat di tahun 2013 menjadi 5,97 persen.

Peningkatan keadaan ekonomi dipengaruhi secara signifikan oleh kelompok variabel karakteristik RUTP yaitu rata-rata jumlah anggota RTUP, persentase ART buruh di sektor pertanian dan persentase pendidikan bawah, dengan rata-rata jumlah anggota RTUP mempunyai pengaruh paling besar. Pada kelompok variabel kebijakan, temuan yang menarik adalah bahwa bantuan pupuk, vitamin



dan mineral berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan keadaan ekonomi RUTP. Temuan lain yang menarik adalah variabel penyuluhan budidaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan keadaan ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan petugas penyuluh lapangan (PPL) untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan petani dalam proses budidaya. Ke depan, PPL harus lebih gencar melakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan/kursus cara budidaya yang baik. Temuan lainnya ternyata bantuan bibit/benih/induk justru secara signifikan berpengaruh negatif. Hal ini karena bantuan benih yang khusus diberikan kepada RTUP sektor tanaman padi+palawija, dimana tingkat kesejahteraan RTUP-nya masih jauh di bawah rata-rata tingkat kesejahteraan RTUP sub sektor pertanian lainnya. Dengan demikian semakin banyak bantuan benih diberikan kepada suatu wilayah, menunjukkan bahwa semakin banyaknya RTUP yang mengusakan padi+palawija, yang sekaligus juga menunjukkan semakin rendahnya tingkat kesejahteraan RTUP di wilayah tersebut.

Kecukupan pendapatan dipengaruhi oleh rata-rata jumlah anggota RTUP, serta pendidikan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi kecukupan pendapatan. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang paling besar terhadap persepsi kecukupan pendapatan RTUP. Selain itu, bantuan pupuk/vitamin dan mineral memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kecukupan pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan pupuk/vitamin dan mineral dapat mengurangi biaya input produksi yang harus dikeluarkan oleh RUTP. Dengan pengurangan biaya tersebut, maka RUTP dapat mengalokasikan biaya pupuk untuk mencukupi kebutuhan lainnya.

Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi NTP menunjukkan hasil yang menarik untuk ditelaah. Pada kelompok variabel karakteristik RTUP hanya pendidikan menengah yang berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar petani (NTP). Kuat dugaan bahwa RTUP yang memiliki pendidikan menengah ke atas, sumber pendapatan utama bukan lagi bersumber dari sektor. Dugaan ini diperkuat oleh temuan bahwa kelompok struktur sumber pendapatan. Sementara variabel struktur sumber pendapatan yang berasal dari sektor pertanian, baik pendapatan dari sektor padi+palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan tidak berpengaruh signifikan. Sedikitnya variabel yang berpengaruh signifikan pada NTP karena karena variabel dan kelompok variabel yang dimasukkan ke dalam model NTP yang berasal dari data sensus pertanian. tidak dapat menangkap faktor-faktor pembentuk NTP. Dugaan ini diperkuat oleh hasil analisis korelasi antara variabel peningkatan keadaan ekonomi, variabel kecukupan pendapatan dan NTP yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara NTP dengan kedua variabel lainnya. Ini berbeda dengan hubungan antara variabel peningkatan keadaan ekonomi dengan variabel kecukupan pendapatan yang hubungannya kuat.

Berdasarkan analisis terhadap karakteristik dan sumber pendapatan RTUP, analisis terhadap kebijakan yang diterima RTUP, analisis perkembangan NTP, analisis kondisi ekonomi RTUP, dan analisis kecukupan pendapatan serta analisis determinan kesejahteraan RTUP maka beberapa implikasi kebijakan dari hasil yang diperoleh pada kajian ini adalah:

1. Data keadaan ekonomi dan kecukupan pendapatan dalam hasil sensus pertanian dapat digunakan sebagai alternatif proksi untuk mengukur kesejahteraan petani. Kedua indikator ini walaupun bersifat persepsi ternyata mempunyai korelasi yang kuat satu sama lain tetapi tidak berkorelasi signifikan dengan NTP yang selama ini banyak digunakan tetapi juga banyak dikritisi kemampuannya dalam menggambarkan kesejahteraan petani.
2. Program keluarga berencana masih merupakan program yang penting digalakkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pada saat yang sama upaya untuk terus meningkatkan tingkat pendidikan juga diduga dapat meningkatkan kesejahteraan petani namun dengan resiko kecenderungan makin banyak anggota RTUP yang keluar dari sektor pertanian. Untuk itu diperlukan upaya keras untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan meningkatnya daya tarik sektor lain.
3. Peningkatan kesejahteraan pada subsektor pangan (padi+palawija) ditunjukkan oleh hasil sensus pertanian 2013 mendapatkan momentum yang baik. Walaupun sektor ini masih menempati urutan terbawah dari segi kesejahteraan, tetapi selama 10 tahun belakangan menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang tertinggi.
4. Sub-sektor lain yang terlihat sedang naik daun adalah perikanan budidaya. Pada saat sektor lain jumlah rumah tangganya menunjukkan kecenderungan yang menurun, subsektor ini justru menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kebijakan dan pengembangan pada subsektor ini perlu ditingkatkan agar memperoleh hasil yang optimal.
5. Berbagai program bantuan, seperti bantuan pupuk, vitamin dan mineral merupakan salah satu upaya yang masih efektif untuk dilakukan. Peluang perbaikan dapat dilakukan pada tahap implementasi yang tepat waktu dan jumlah yang sering kali terdengar dikeluhkan selama ini. Bantuan yang lain pun pada dasarnya masih efektif yang terlihat dari adanya korelasi kuat satu sama lain.
6. Kebijakan yang juga terbukti berpengaruh positif meningkatkan kesejahteraan RTUP adalah penyuluhan, terutama penyuluhan budidaya. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan khususnya penyuluhan budidaya perlu dilakukan secara lebih masif sebagaimana amanat UU No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. •



1

Pendahuluan



1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Pada bulan Mei 2014, Bank Dunia merilis laporan peringkat ekonomi negara-negara di dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam laporan tersebut, ekonomi Indonesia menduduki peringkat ke-10 dunia, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi salah satu yang tertinggi di dunia dengan rata-rata 6,2 persen selama kurun waktu 2010-2014. Ironisnya, perekonomian Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah yang sangat berat, salah satunya adalah ketimpangan kesejahteraan antar sektor (Achsani, 2014).

Ketimpangan kesejahteraan antar sektor salah satunya dapat dilihat di sektor pertanian. Sektor pertanian yang hanya memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 14,4 persen pada tahun 2013 (BPS, 2014a) harus menyerap tenaga kerja sebesar 38 juta tenaga kerja. Jumlah tersebut setara dengan 34 persen penduduk Indonesia yang bekerja (BPS, 2014b). Tidak seimbangnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB dan penyerapan tenaga diduga karena kegiatan di sektor pertanian yang masih bersifat konvensional, sehingga tidak memerlukan keterampilan tinggi. Akibatnya tenaga kerja yang kurang mampu bersaing di sektor lain, masuk di sektor pertanian (BPS, 2014b). Ditambah lagi, sektor pertanian menjadi wadah bagi sumber daya manusia berpendidikan rendah. Sekitar 72,6 persen tenaga kerja sektor pertanian berpendidikan tamat Sekolah Dasar atau bahkan tidak sekolah sama sekali (Kemenakertrans, 2013), dimana sekitar 61 persen petani utama berusia lebih dari 45 tahun atau berada di ujung usia produktif (BPS, 2014b). Transformasi ekonomi yang ditandai dengan penurunan kontribusi sektor-sektor primer, termasuk sektor pertanian dan digantikan dengan peningkatan sektor tersier ternyata tidak diikuti oleh transformasi ketenagakerjaan.

Fenomena ini menyebabkan sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki tingkat kesejahteraan yang terendah. Tingkat kesejahteraan di sektor pertanian hanya 0,42 persen dari tingkat kesejahteraan nasional (Achsan, 2014). Selama kurun waktu tahun 2008 hingga Agustus 2014, Nilai Tukar Petani (NTP) hanya meningkat kurang dari satu persen. Hal ini merefleksikan lambatnya peningkatan kesejahteraan petani (Pusdatin Kementan, 2014).

Dalam konteks pembangunan nasional, tujuan utama yang ingin dicapai adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama juga dalam pembangunan pertanian, orientasinya harus selalu diarahkan kepada dua hal yaitu: (1) peningkatan pendapatan petani, dan (2) peningkatan daya saing produk pertanian. Muara dari kedua hal tersebut adalah perbaikan kesejahteraan pelaku pembangunan yaitu petani.

Berbagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan petani sesungguhnya telah diupayakan pemerintah sejak dahulu. Berbagai kebijakan telah dijalankan agar kesejahteraan petani dapat disejajarkan dengan pekerja di sektor lainnya. Namun, dari fenomena yang tergambar di atas, kesejahteraan petani masih menjadi yang terendah dibanding pekerja di sektor ekonomi lainnya. Walaupun terjadi peningkatan kesejahteraan petani, pertumbuhannya sangat lambat. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelusuran mengapa hal tersebut masih terjadi terutama dari sisi kebijakan.

Salah satu alat ukur yang populer digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani adalah indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Konsep NTP dapat menggambarkan indeks daya beli petani secara sederhana. Namun demikian, konsep NTP dinilai kurang relevan, karena menggunakan asumsi tingkat produksi yang tetap (indeks Laspeyres), sehingga tidak mengakomodasi kemajuan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi dan pembangunan (Bappenas dan JICA, 2013). Lebih lanjut, Bappenas dan JICA (2013) mengusulkan penyempurnaan konsep NTP dengan disusun dan diakomodasikannya Indeks Produksi Pertanian dan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Pertanian dalam rumus perhitungan NTP, sehingga NTP merupakan rasio antara nilai pendapatan terhadap nilai pengeluaran.

Oleh karena itu, diperlukan perspektif lain untuk melihat tingkat kesejahteraan petani dan determinannya. Pengetahuan tentang determinan kesejahteraan petani, termasuk kebijakan pemerintah, akan bermanfaat untuk menjadi basis perancangan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani di masa yang akan datang. Determinan yang perlu dikaji harus diupayakan sekomprensif mungkin agar tidak menghasilkan kebijakan yang parsial. Efektifitas kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan tetapi juga perlu memertimbangkan karakteristik rumah tangga petani yang menjadi target kebijakan tersebut agar dalam implementasinya lebih mengena pada sasaran.

Masalah utama dalam upaya mencari perspektif lain dalam analisis kesejahteraan petani adalah ketersediaan data yang masih merupakan barang mewah di Indonesia, baik ketersediaan maupun kualitasnya. Sensus Pertanian tahun 2013 membuka peluang untuk melakukan eksplorasi analisis kesejahteraan petani dengan perspektif yang berbeda. Kajian ini merupakan upaya awal untuk memanfaatkan data yang tersedia dari hasil Sensus Pertanian tahun 2013 dalam mendalami tipologi kesejahteraan petani Indonesia. Tentu saja disadari bahwa karena sifatnya datanya yang sekunder, kajian ini disana-sini akan terkendala dengan ketersediaan data hasil sensus yang memang tidak sepenuhnya dirancang untuk analisis kesejahteraan petani. Kondisi ini akan memaksa digunakannya berbagai proksi terbaik yang dapat dialkukan dari data yang tersedia dalam hasil sensus, walaupun tidak sepenuhnya ideal.

1.2. Tujuan

Tujuan dari publikasi ini adalah :

1. Menggambarkan karakteristik rumah tangga usaha pertanian Indonesia
2. Mengaji kebijakan peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia
3. Menganalisa tingkat kesejahteraan petani Indonesia
4. Menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani
5. Merumuskan implikasi kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan petani

1.3. Output

Satu publikasi Kesejahteraan Rumah Tangga Usaha Pertanian Indonesia; Analisis Determinan dan Pengaruh Kebijakan dengan Perspektif Hasil Sensus Pertanian 2013.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan kajian ini dilakukan menurut bab dan subbab.

Bab 1 : Berisi pendahuluan yang membahas secara umum dan singkat mengenai latar belakang dan permasalahan, tujuan kajian, output kajian serta outline.

Bab 2 : Membahas mengenai upaya mengukur dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia termasuk membahas kerangka pemikiran konseptual. Bab dua berisikan empat subbab. Subbab yang pertama berisikan landasan teori yang menjadi dasar dalam menjawab tujuan penelitian. Teori dan konsep yang diuraikan misalnya terkait dengan konsepsi kesejahteraan petani, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan, dan indikator kesejahteraan petani. Selain itu, juga akan dimasukkan berbagai kajian empiris yang berkaitan dengan topik kesejahteraan, khususnya kesejahteraan petani. Subbab kedua membahas mengenai kebijakan pembangunan pertanian, yang menjelaskan kebijakan

pertanian di sektor hulu dan kebijakan pertanian di sektor hilir. Subbab ketiga membahas mengenai kebijakan bantuan langsung, yang di dalamnya menjelaskan tentang kebijakan raskin dan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Subbab keempat membahas mengenai kerangka pemikiran konseptual, yang akan disarikan melalui diagram yang diadaptasi dari Bappenas dan JICA.

Bab 3 : Membahas mengenai kerangka pemikiran operasional, yang membahas mengenai keterkaitan antara tahapan pelaksanaan kajian dengan tujuan kajian. Agar dapat menjadi panduan, maka kerangka pemikiran akan disarikan melalui diagram. Subbab kedua membahas ukuran kesejahteraan petani, yang diperoleh dari data sensus pertanian baik tahun 2003 dan tahun 2013. Subbab ketiga berisi jenis dan sumber data, serta subbab terakhir berisi tentang teknik analisis data. Subbab ini dijelaskan mengenai definisi operasional variabel, analisis deskriptif, analisis tabulasi deskriptif, dan analisis regresi.

Bab 4 : Karakteristik dan Sumber Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian. Secara khusus bab ini akan berisi karakteristik rumah tangga pertanian yang meliputi kepemilikan dan penguasaan lahan, rumah tangga usaha pertanian gurem, rumah tangga usaha pertanian menurut subsektor pertanian, perusahaan pertanian berbadan hukum menurut subsektor pertanian, petani menurut subsektor pertanian dan jenis kelamin, rumah tangga usaha pertanian menurut kelompok umur dan jenis kelamin petani utama, serta membahas tenaga kerja menurut lapangan usaha dan pendidikan. Bab ini juga membahas struktur sumber pendapatan RTUP. Pembahasan akan dilakukan dengan melihat perkembangan Sensus Pertanian 2003 dan Sensus Pertanian 2013.

Bab 5 : Membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang diterima rumah tangga usaha pertanian, meliputi subsidi/bantuan/hibah dan penyuluhan. Bab ini secara rinci berisi mengenai kebijakan pemerintah yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Bab 6 : Membahas tingkat kesejahteraan petani melalui perspektif sensus pertanian 2013, yang terdiri dari perkembangan nilai tukar petani, kondisi ekonomi rumah tangga petani, dan kecukupan pendapatan.

Bab 7 : Determinan kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian. Subbab ini menjelaskan berbagai pengaruh/hubungan karakteristik rumah tangga usaha pertanian, struktur sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga, terhadap kecukupan pendapatan, serta terhadap nilai tukar petani.

Bab 8 : Kesimpulan dan implikasi kebijakan.



2

**UPAYA MENGUKUR
DAN MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN PETANI
INDONESIA: SEBUAH
TINJAUAN PUSTAKA**

2 Upaya Mengukur dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka



2.1. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan hidup juga dapat dijadikan dua kategori yaitu objektif dan subjektif. Kesejahteraan hidup objektif merupakan keperluan hidup yang dapat dicapai oleh individu dan dapat dilihat secara luaran seperti pendapatan, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kesejahteraan hidup subjektif dinilai berdasarkan kepuasan dan nikmat hidup yang dirasakan oleh individu seperti merasa senang dan bersyukur karena mempunyai pekerjaan yang baik, anak-anak yang sukses dan mempunyai keluarga yang bahagia (Norizan, 2003).

Di samping itu, Myers, Sweeney, dan Witmer (2005) juga berpendapat bahwa kesejahteraan hidup merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur (subjektif), sehingga sangat sulit untuk menafsirkan maksud dari kesejahteraan hidup tersebut. Hal ini karena kesejahteraan hidup merupakan cara hidup dalam mencapai tahap kesehatan dan kesejahteraan diri yang optimal, meliputi fisik, mental dan spiritual yang diintegrasikan oleh individu untuk kehidupan yang berkualitas di dalam masyarakat.

Konsepsi Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan adalah konsep yang sampai saat ini memiliki banyak perbedaan definisi. Konsep kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Inti dari konsep kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya setiap aspek hidup manusia baik moral atau materiil. Dalam pasal 1 yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,

dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Yosep (1996) mengungkapkan dua pendekatan kesejahteraan yakni:

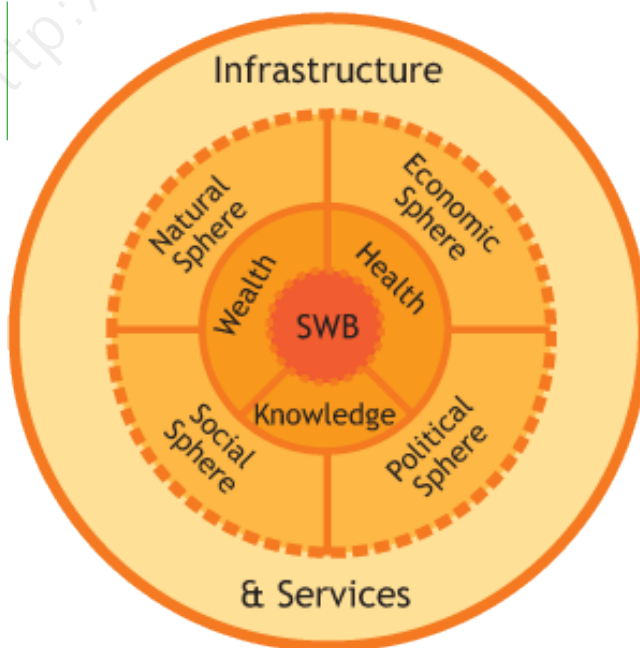
1. Pendekatan makro, kesejahteraan dinyatakan dengan indikator-indikator yang disepakati secara alamiah, sehingga ukuran kesejahteraan masyarakat berdasarkan data empiris suatu masyarakat.
2. Pendekatan mikro, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan psikologi individu secara pribadi untuk melihat apa yang dianggapnya sejahtera.

Konsep kesejahteraan dapat dijelaskan oleh sebuah model, yaitu NESP (Nested Spheres of Poverty) (CIFOR 2007). Model ini menjelaskan bahwa kesejahteraan dipengaruhi oleh berbagai lingkungan beserta aspek kehidupan yang ada di dalamnya. Dalam gambar di bawah ini dijelaskan, lingkaran inti yang berada di tengah dinamakan sebagai kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan ini merupakan kesejahteraan yang sifatnya sangat individu dan emosional. Dikatakan seperti itu karena kesejahteraan ini tidak memiliki nilai standar yang konstan. Kesejahteraan ini berubah-ubah sesuai dengan suasana hati dan lingkungan individu tersebut. Dengan kata lain, kesejahteraan ini secara garis besar dipengaruhi oleh kesehatan, kekayaan materi, dan pengetahuan. Lingkungan konteks yang meliputi lingkungan alam, ekonomi, sosial, dan politik secara langsung mempengaruhi kesehatan, kekayaan materi, dan pengetahuan yang akhirnya secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Sedangkan, lingkungan konteks dipengaruhi oleh prasarana dan layanan. Penjelasan di atas, dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Model Nested Spheres of Poverty
(NESP)

Sumber : CIFOR, 2007



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan

Sen (2002) mengatakan bahwa welfare economics merupakan suatu proses rasional ke arah melepaskan masyarakat dari hambatan untuk memperoleh kemajuan. Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (levels of living), pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs fulfillment), kualitas hidup (quality of life) dan pembangunan manusia (human development).

Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat jika dilihat dari suatu aspek tertentu. Untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kesejahteraan suatu individu, diperlukan berbagai indikator dari berbagai dimensi. Sama seperti definisi dari konsep kesejahteraan, sebuah indikator yang menyatakan apakah individu sejahtera atau tidak, juga memiliki berbagai versi dari banyak ahli. BPS menyatakan untuk mengetahui kesejahteraan seseorang, maka ada 7 hal yang mengindikasikan, antara lain kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan serta sosial dan budaya (BPS, 2006)

Penjabaran indikator tingkat kesejahteraan menurut BPS yaitu:

1. Kependudukan

Masalah kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam penanganan masalah kependudukan, pemerintah tidak hanya mengarahkan upaya pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Di samping itu, program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

2. Kesehatan dan Gizi

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk dengan menggunakan indikator utama angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu, aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Faktor kemiskinan merupakan faktor yang menyebabkan belum semua anak Indonesia dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar. Karena itu dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai suatu masyarakat, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan sejahtera.

4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

5. Taraf dan Pola Konsumsi

Jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut didistribusi di antara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah dicapai walaupun didekati dengan pengeluaran.

6. Perumahan dan Lingkungan

Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan bagi pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, maka dapat diasumsikan semakin sejahtera rumah tangga yang mendiami rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan antara lain luas lantai tanah, sumber air minum, fasilitas buang air besar rumah tangga dan tempat penampungan kotoran akhir (jamban).

7. Sosial dan Budaya

Pada umumnya semakin banyak seseorang memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan sosial budaya maka dapat dikatakan seseorang tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat. Pembahasan mengenai sosial budaya lebih difokuskan pada kegiatan sosial budaya yang mencerminkan aspek kesejahteraan, seperti melakukan perjalanan wisata dan akses pada informasi dan hiburan, yang mencakup menonton televisi, mendengarkan radio, dan membaca surat kabar.

Indikator Kesejahteraan Petani

Terdapat lima aspek yang dapat menunjukkan indikator kesejahteraan petani, yaitu (1) Perkembangan struktur pendapatan, (2) Perkembangan pengeluaran untuk pangan, (3) Daya beli rumah tangga petani, (4) Perkembangan Ketahanan Pangan, dan (5) Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP).

1. Perkembangan Struktur Pendapatan

Struktur pendapatan menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga petani yang berasal dari sektor mana, apakah dari sektor pertanian atau sebaliknya yaitu dari non pertanian. Secara sederhana struktur pendapatan rumah tangga petani dari sektor pertanian dapat ditentukan sebagai berikut:

$$PPSP = \frac{TPSP}{TP} \times 100\%$$

di mana:

PSSP = Pangsa pendapatan sektor pertanian (%)

TPSP = Total pendapatan dari sektor pertanian (Rp/thn)

TP = Total pendapatan rumah tangga petani (Rp/thn)

2. Perkembangan Pengeluaran untuk Pangan

Perkembangan pangsa pengeluaran untuk pangan dapat dipakai untuk salah satu indikator kesejahteraan petani. Dimana semakin besar pangsa pengeluaran untuk pangan menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga petani masih terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan dasar (subsisten). Sebaliknya, semakin besar pangsa pengeluaran sektor sekunder (non pangan), mengindikasikan telah terjadi pergeseran posisi petani dari subsistem ke komersial. Dimana kebutuhan primer telah terpenuhi dan kelebihan pendapatan dialokasikan untuk kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sekunder lainnya. Secara sederhana pangsa pengeluaran untuk pangan dapat dihitung sebagai berikut:

$$PEP = \frac{PE}{TE} \times 100\%$$

di mana:

PEP = Pangsa pengeluaran untuk pangan (%)

PE = Pengeluaran untuk pangan (Rp/thn)

TE = Total pengeluaran pendapatan rumah tangga petani (Rp/thn)

3. Perkembangan Daya Beli Rumah Tangga Petani

Perkembangan daya beli rumah tangga petani dapat juga dipakai sebagai indikator kesejahteraan petani. Bagi petani yang sumber pendapatan utamanya dari sektor pertanian, tingkat daya beli petani dapat ditentukan sebagai berikut:

$$DBP-p = \frac{TP}{(TE - BU)}$$

di mana:

DBPp = Daya beli rumah tangga petani

TP = Total Pendapatan rumah tangga petani (Rp/thn) dari seluruh sumber

BU = Biaya usaha tani

Sementara bagi rumah tangga petani yang sumber pendapatan utamanya dari non pertanian, daya beli dapat ditentukan sebagai berikut:

$$DBPn-p = \frac{Unp}{HB}$$

di mana:

DBPnp = Daya beli rumah tangga non petani

Unp = Tingkat upah di non pertanian (Rp/hari)

HB = Harga beras

4. Perkembangan Ketahanan Pangan di Tingkat Rumah Tangga Petani

Perkembangan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani merupakan ukuran indikator kesejahteraan petani. Makin tinggi tingkat ketahanan pangan, yang ditunjukkan oleh kuatnya pemenuhan kebutuhan dari produksi sendiri atau banyak stok pangan menunjukkan makin sejahtera rumah tangga petani. Perkembangan tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani secara sederhana dapat ditentukan sebagai berikut:

$$TKP = \frac{PB}{KB}$$

di mana:

TKP = Tingkat ketahanan pangan (TKP=1, subsisten; TKP > 1, surplus, TKP,1, defisit)

PB = Produksi dari usaha tani sendiri setara beras

KB = Kebutuhan setara beras

5. Nilai Tukar Petani

Peningkatan kesejahteraan petani dapat diukur dari peningkatan daya beli atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran rumah tangga petani Nilai Tukar Petani (NTP) berkaitan dengan kekuatan relatif daya beli komoditas hasil pertanian yang dihasilkan/dijual petani dengan barang dan jasa yang dibeli/dikonsumsi petani. NTP dapat menggambarkan kekuatan daya tukar/daya beli (purchasing power) dari komoditas pertanian terhadap produk manufaktur.

Konsep nilai tukar berkembang dan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Sejumlah pakar menggolongkan pengukuran nilai tukar ke dalam enam konsep (Rachmat, 2013) yaitu: (1) nilai tukar barter, (2) nilai tukar faktorial, (3) nilai tukar penerimaan, (4) nilai tukar subsisten, (5) nilai tukar pendapatan, dan (6) nilai tukar petani.

1. **Nilai Tukar Barter (NTB)** : Mengacu pada harga nisbi suatu komoditas pertanian tertentu terhadap barang atau produk non pertanian.
2. **Nilai Tukar Faktorial (NTF)** : Merupakan perbaikan dari konsep barter, dengan memasukkan pengaruh perubahan teknologi (produktivitas). NTF adalah rasio antara harga pertanian terhadap harga non pertanian dikalikan dengan produktivitas pertanian.
3. **Nilai Tukar Penerimaan (NTR)** : Merupakan pengembangan dari konsep nilai tukar faktorial. NTR adalah daya tukar dari penerimaan (nilai hasil) komoditas

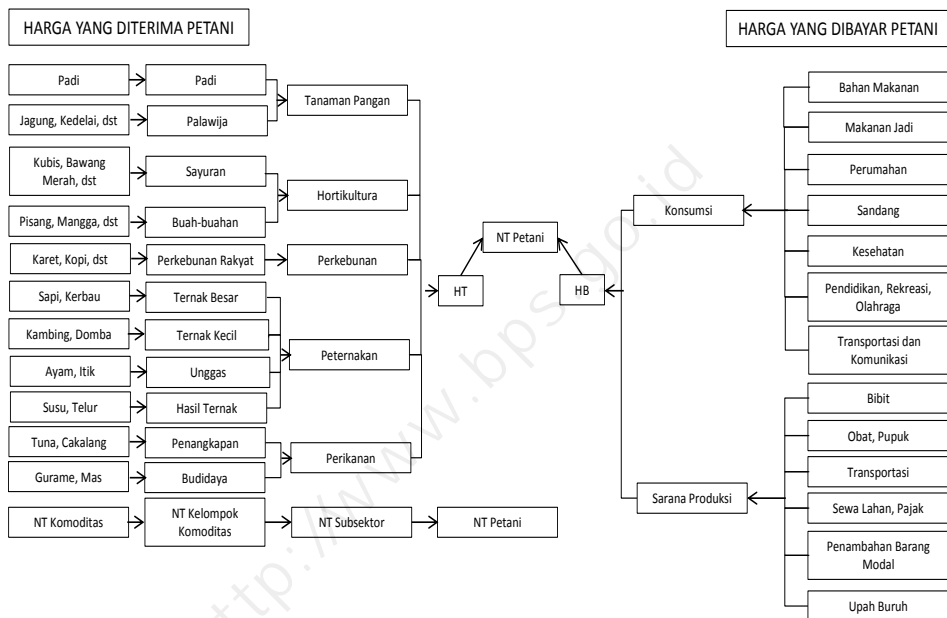
pertanian yang diproduksi petani per unit (hektar) terhadap nilai input produksi untuk memproduksi hasil tersebut.

- 4. Nilai Tukar Subsisten (NTS) :** Merupakan pengembangan lebih lanjut dari NTR. NTS merupakan penjumlahan dari seluruh nilai hasil produksi komoditas pertanian yang dihasilkan petani.

Secara ringkas pembentukan nilai tukar petani disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2

Pembentukan Nilai Tukar Petani (NTP)



Sumber : Rachmat, 2013

BPS mendefinisikan dan memberi arti NTP sebagai berikut:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas /break even. Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Harga produksinya naik lebih kecil dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.

2.2. Kebijakan Pembangunan Pertanian

Kebijakan Pertanian di Sektor Hulu

» Kebijakan Subsidi Pupuk

Pendapatan yang diterima petani erat kaitannya dengan besarnya produksi yang dihasilkan petani, sedangkan besarnya produksi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi, salah satunya adalah pupuk. Kebijakan terkait pupuk menjadi mutlak untuk dirumuskan karena untuk melindungi petani.

Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian terutama tanaman pangan sehingga kebutuhan pangan penduduk terpenuhi. Marissa (2011) menjabarkan bahwa kebijakan subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian terutama tanaman pangan. Kebijakan ini sudah diadakan sejak tahun 1960 dan telah mengalami berbagai perubahan pola kebijakan untuk memperbaiki efektivitas dari penyerapan subsidi pupuk ini. Kebijakan subsidi pupuk dapat dikelompokkan kedalam empat periode, yaitu 1) Periode 1960-1979, 2) Periode 1979-1998, 3) Periode 1998-2002, dan 4) Periode 2003 – sekarang (Kariyasa, 2007).

a. Periode 1960-1979

Pada periode ini pengadaan dan penyaluran pupuk program Bimas dan Inmas berada di bawah satu tangan. Untuk pertama kalinya pengadaan dan penyaluran pupuk di atur oleh pemerintah. Ada subsidi pupuk bagi petani peserta Bimas dan tersedianya peluang bisnis pupuk bagi setiap badan usaha. Sistem penyaluran pupuk kepada penyalur/pengecer adalah secara konsinyasi. Petani menebus pupuk dengan menggunakan kupon kepada penyalur sebagai pertanggungjawaban atas pupuk yang diterimanya secara konsinyasi dari PT. Pusri. Tidak adanya ketentuan stok, sehingga tidak ada jaminan stok tersedia disetiap waktu. Kurangnya stok juga dipicu karena adanya pengembalian kredit yang macet dari petani, dan di sisi lain pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk mengimpor pupuk.

b. Periode 1979-1998

Era ini dapat dibagi atas 2 periode, yaitu periode 1979-1993 dan 1993-1998. Periode 1979-1993 disebut sebagai era regulasi penuh, dimana semua hal yang menyangkut pupuk untuk sektor pertanian diatur secara penuh oleh pemerintah. Khusus untuk kebutuhan pupuk bersubsidi mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Pertanian, sementara sistem distribusi pupuk diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan harga serta biaya pupuk setiap Lini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut dipercayakan pada PT Pusri sebagai penanggungjawab pengadaan dan penyaluran pupuk (bersubsidi) untuk sektor pertanian berdasarkan SK Mendagkop No. 56/1979 tanggal 15 Februari 1979.

Selama periode pupuk disubsidi dan ditataniagakan secara menyeluruh, pengadaan dan penyaluran pupuk ke sektor pertanian relatif aman. Kalaupun sekali-sekali terjadi kekurangan pupuk pada satu atau beberapa lokasi yang biasanya bersifat khusus, penanganannya lebih mudah. Pemerintah meminta PT Pusri untuk menyelesaikan sesegera mungkin setiap permasalahan yang ditemui tanpa harus menunggu masalah menjadi melebar. Selanjutnya pada periode 1993-1998 atas pertimbangan anggaran subsidi pupuk yang semakin besar, maka diambil beberapa kebijakan. Pada Oktober 1993 dilakukan pencabutan subsidi untuk pupuk KCl, KS, ZK, KNO₃, kemudian pada Oktober 1994 dilanjutkan pencabutan subsidi untuk pupuk TSP dan ZA. Sebaliknya, pada Mei 1998 pemerintah memberikan subsidi untuk pupuk Urea, SP36 dan ZA untuk kebutuhan subsektor tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan rakyat ; lalu dilanjutkan pada Juli 1998 untuk pupuk KCl. Dampak yang dirasakan dari kebijakan tersebut antara lain adalah : (1) Terjadinya aliran pupuk bersubsidi dari subsektor tanaman pangan ke subsektor lain khususnya ke subsektor perkebunan menengah, besar dan swasta; (2) Pemakaian pupuk oleh subsektor tanaman pangan berkurang dan berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas produksi; (3) Ada indikasi dilakukannya ekspor Urea bersubsidi secara ilegal; dan (4) Sering terjadi kelangkaan pupuk terutama Urea di berbagai daerah yang kadang kala diikuti kenaikan harga di tingkat petani.

c. Periode 1998-2002

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1998 sampai tanggal 13 Maret 2001 pupuk tidak bersubsidi dan pupuk menjadi komoditas bebas, dimana berlaku mekanisme supply and demand. Tidak ada prinsip 6 tepat lagi, serta ketentuan stok pupuk sehingga sering terjadi fenomena kelangkaan pupuk ditandai mahalnnya harga pupuk ditingkat petani. Kelangkaan dan mahalnnya harga pupuk memberi peluang munculnya pupuk alternatif yang kualitasnya diragukan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pengadaan penyaluran pupuk urea untuk sektor pertanian dengan SK Menperindag No.93/2001 tanggal 14 Maret 2001. Pada dasarnya sebagian besar materi Kepmen ini hampir sama dengan ketentuan tataniaga sebelumnya (Kep. Menperindag No.378/1998). Perbedaan yang mendasar adalah Kep. Memperindag No.93/2001 memberikan kesempatan kepada semua produsen pupuk untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk urea ke subsektor tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan rakyat yang pada Kepmen sebelumnya hanya dilaksanakan oleh PT. Pusri. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa Kepmen No.93/2001 masih belum menjamin ketersediaan pupuk menurut prinsip 6 tepat.

d Periode 2003-sekarang

Berdasarkan SK Menperindag No. 70/MPP/Kep/2003 bahwa sistem pendistribusian pupuk berdasarkan rayonisasi, dimana setiap produsen bertanggung jawab penuh memenuhi permintaan diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Jika produsen tidak mampu memenuhi permintaan

pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dari hasil produksi sendiri wajib melakukan kerjasama dengan produsen lain dalam bentuk kerja sama operasional (KSO). Selain itu, menyikapi penggunaan pupuk anorganik ditingkat petani yang cenderung tidak efisien dan efektif, telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada padi sawah yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi, yang berbasis kecamatan di 21 propinsi.

» Pemberian Bantuan dan Subsidi Harga Benih

Salah satu upaya pencapaian sasaran produksi tanaman pangan adalah melalui peningkatan produktivitas, diantaranya dengan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat. Hal ini sangat terkait dengan penggunaan benih varietas unggul bermutu. Penggunaan benih unggul bermutu yang dibarengi dengan penerapan teknologi yang tepat telah terbukti memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan.

Dalam mendukung program peningkatan produktivitas pertanian, sebelumnya Kementerian Pertanian melakukan dua langkah strategis, yakni pemberian bantuan benih gratis dan subsidi. Namun dalam perjalanannya, pemerintah menemukan beberapa kendala dalam program bantuan benih gratis baik dari segi varietas dan ketepatan waktu. Sehingga pola bantuan benih dari Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) menjadi pola subsidi.

Dalam pelaksanaan kebijakan subsidi benih, UU tentang APBN setiap tahunnya merupakan dasar pelaksanaan subsidi benih. Perkembangan nilai bantuan dan subsidi benih dari tahun 2003 sampai tahun 2010 relatif mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2011, nilai subsidi benih dari pemerintah mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 2.1 triliun rupiah di tahun 2010 menjadi 96.9 miliar rupiah di tahun 2011 dan 129 miliar rupiah di tahun 2012. Lebih rendahnya anggaran alokasi benih tersebut terutama berkaitan dengan realokasi anggaran cadangan benih nasional (CBN) dan anggaran bantuan langsung benih unggul (BLBU) ke Kementerian/Lembaga, yang dalam hal ini Kementerian Pertanian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka tertib anggaran, dimana tahun 2011 subsidi benih hanya menampung subsidi harga benih bersubsidi. Pada tahun sebelumnya, subsidi benih menampung anggaran subsidi harga benih bersubsidi, anggaran CBN, dan anggaran BLBU.

Tahun	Nilai Subsidi Benih (Miliar Rp)	Tahun	Nilai Subsidi Benih (Miliar Rp)
2003	47.3	2009	1,597.2
2004	121.0	2010	2,177.5
2005	120.0	2011	96.9
2006	45.0	2012	129.5
2007	479.0	2013	1,454.2
2008	985.2	2014	1,564.8

Tabel 2.1

Nilai Subsidi Benih 2003-2014

» Program Kredit Pertanian

Jenis-jenis kredit program untuk pembiayaan pertanian yang saat ini diluncurkan Kementerian Pertanian adalah Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Disamping itu masih ada sumber pembiayaan syariah dan sumber pembiayaan lainnya. Untuk pembiayaan pertanian yang sifatnya bantuan, Kementerian Pertanian melaksanakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan pada tahun 2008 dan dilakukan secara terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang dulu dikenal dengan Kredit Ketahanan Pangan (KKP), sudah berjalan sejak Oktober 2000 merupakan penyempurnaan dari KUT, KKPA (Unggas, Tebu dan Nelayan) serta Kredit Koperasi Pangan. KKP ditujukan untuk membantu permodalan petani dan peternak dengan suku bunga terjangkau sehingga mereka dapat menerapkan teknologi rekomendasi budidaya dan dapat mengembangkan agribisnisnya secara layak.

Dalam perkembangannya, KKP terus mengalami perubahan dan penyempurnaan baik dalam cakupan komoditas yang dibiayai, kebutuhan indikatif dan plafon maksimum per debitur. Penyempurnaan KKP juga ditujukan untuk mendukung ketahanan energi sehingga mulai Oktober 2007 KKP berubah menjadi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Tujuan dari KKP-E adalah: a) Menyediakan kredit investasi dan atau modal kerja dengan suku bunga terjangkau, b) Mengoptimalkan pemanfaatan dana kredit yang disediakan oleh perbankan untuk petani/peternak yang memerlukan pembiayaan usahanya secara efektif, efisien dan berkelanjutan guna peningkatan produksi sekaligus peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya dan c) Mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dan ketahanan energi lain melalui pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati. Sedangkan sasaran KKP-E adalah a) Tersalurnya KKP-E kepada petani dan peternak yang membutuhkan pembiayaan/kredit serta lancar dalam pengembalian kreditnya dan b) Peningkatan penerapan teknologi anjuran bagi petani/peternak yang memanfaatkan pembiayaan/kredit yang akhirnya terjadi peningkatan produktivitas usaha. Dalam KKP-E ini pemerintah memberikan subsidi bunga, sehingga bunga pinjaman yang harus ditanggung debitur jauh lebih rendah dibandingkan dengan bunga komersial yang berlaku saat ini.

» Kebijakan Irigasi

Mayrowan (2013), sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, proses desentralisasi, dan penyerahan kewenangan, pengelolaan sumber daya air memerlukan proses redefinisi. Dalam hal pengelolaan irigasi, telah dikeluarkan

kebijakan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang dicanangkan oleh Presiden dan dituangkan dalam Inpres No.3 Tahun 1999 tanggal 26 April 1999. Pembaharuan tersebut terdiri dari 5 (lima) agenda, yaitu:

1. Pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi
2. Pemberdayaan masyarakat petani pengelola air
3. Penyerahan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air
4. Penggalan sumber pendapatan untuk membiayai O&P, rehabilitasi, dan pembangunan

» Kebijakan Penyuluhan

Sistem penyuluhan di Indonesia sudah diatur oleh beberapa peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi undang-undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur sistem penyuluhan secara jelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tahun 2006 diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Undang-undang tersebut di dalamnya mengatur sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

Kebijakan Pertanian di Sektor Hilir

» Kebijakan Harga

Menurut Nurjaman (2013) kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang terpenting di banyak negara dan biasanya digabung dengan kebijakan pendapatan sehingga disebut kebijakan harga dan pendapatan (*price and economic policy*). Segi harga dari kebijakan itu bertujuan untuk mengadakan stabilitas harga, sedangkan segi pendapatannya bertujuan agar pendapatan petani tidak terlalu berfluktuasi dari musim ke musim dan dari tahun ke tahun. Kebijakan harga dapat mengandung pemberian penyangga (*support*) atas harga-harga hasil pertanian supaya tidak terlalu merugikan petani atau langsung mengandung sejumlah subsidi tertentu bagi petani. Secara teoritis kebijakan harga yang dapat dipakai untuk mencapai tiga tujuan yaitu:

1. stabilitas harga hasil-hasil pertanian terutama pada tingkat petani
2. meningkatkan pendapatan petani melalui perbaikan dasar tukar (*term of trade*)
3. memberikan arah dan petunjuk pada jumlah produksi.

Kebijakan harga di Indonesia terutama ditekankan pada tujuan pertama yaitu stabilitas harga hasil-hasil pertanian. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan stabilitas harga hasil-hasil pertanian dalam keadaan harga-harga umum yang stabil, berarti pula terjadi kestabilan pendapatan. Sementara tujuan kedua dan ketiga banyak diterapkan di negara-negara maju.

Salah satu kebijakan stabilitas harga hasil-hasil pertanian adalah kebijakan harga gabah dan beras. Menurut Maulana (2011) dalam upaya peningkatan pendapatan petani dan pemantapan ketahanan pangan nasional, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi perberasan nasional. Kebijakan perberasan nasional pada intinya mencakup lima instrumen kebijakan yaitu peningkatan produksi, diversifikasi usaha, kebijakan harga, kebijakan impor, dan distribusi beras untuk keluarga miskin (Suryana dan Hermanto, 2004).

Kebijakan perberasan yang diterapkan secara terpadu oleh pemerintah mampu memacu produksi beras dan mencapai swasembada beras. Secara khusus, kolaborasi kebijakan harga dan perdagangan telah berperan penting dalam memacu produksi beras nasional, menjamin ketersediaan, dan stabilisasi harga beras. Kebijakan harga gabah dan beras sebagai salah satu elemen dari paket kebijakan ekonomi perberasan nasional, implementasinya didukung oleh kebijakan perdagangan agar efektif. Pada era orde baru, kebijakan harga diterapkan berupa Harga Dasar Gabah (HDG). Penetapan harga dasar ditentukan oleh berbagai variabel dan formula. Formula yang dipakai berubah dari waktu ke waktu. Untuk menjamin HDG efektif, terutama pada saat panen, pemerintah melalui Bulog melakukan operasi pembelian gabah petani, khususnya bila harga gabah di tingkat petani tertekan hingga di bawah HDG. Peran Bulog disamping menjamin efektifitas HDG, pembelian gabah/beras juga merupakan bagian tak

terpisahkan dari pengadaan beras oleh pemerintah untuk stabilisasi harga beras.. Pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan HDG dan stabilisasi harga beras dapat berjalan efektif bila pemerintah dapat mengontrol impor dan ekspor secara efektif (Simatupang et al., 2005a; Simatupang et al., 2005b).

Sejak tahun 2002, konsep HDG direformulasi menjadi Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP). Konsep HPP adalah tingkat harga pembelian gabah/beras oleh pemerintah yang diharapkan menjadi harga acuan bagi pasar beras domestik. Penentuan tingkat HPP mengacu pada tingkat harga yang layak, yaitu yang secara kuantitatif menjamin keuntungan bagi usaha tani padi sekitar 30 persen di atas biaya produksi dan juga harga beras yang terjangkau oleh sebagian besar konsumen. Volume pembelian HPP sudah ditetapkan dari awal sesuai dengan keperluan ataupun ketersediaan dana pemerintah.

Pada tahun 2005, istilah HDPP diganti menjadi harga pembelian pemerintah (HPP). Biaya dalam pelaksanaan kebijakan HPP relatif lebih murah dibandingkan dengan kebijakan harga dasar, karena pemerintah hanya membeli gabah/beras secukupnya, sesuai dengan kebutuhan penyaluran. Dalam menentukan alternatif kebijakan HPP gabah dan beras ke depan, ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan. Pertama, kebijakan HPP diimplementasikan lewat penyerapan gabah dan beras. Berdasarkan standar kualitas dalam aturan pemerintah di gudang Bulog. Kedua, sudah seharusnya kebijakan HPP ini dapat memberikan insentif bagi petani sehingga penentuan harga yang berlapis mulai dari GKP, GKS, GKJ dan beras dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Ketiga, kebijakan harga tidak serta merta efektif dan bisa menyejahterakan petani walaupun faktanya mampu meningkatkan pendapatan usaha tani. Kebijakan harga ini harus didukung dengan kebijakan lainnya.

Selama kurun tahun 2004-2011 telah terjadi beberapa perubahan kebijakan perberasan yang ditetapkan melalui berbagai Inpres, yaitu antara lain:

1. Inpres No. 2/2005 yang diterbitkan pada bulan April 2005 dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan penyesuaian harga BBM (terutama solar) yang berpengaruh cukup kuat terhadap kinerja sektor pertanian. f
2. Inpres No. 13/2005 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2006 bertujuan untuk mempertahankan profitabilitas usahatani padi sebesar 30%, sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM 124%.
3. Inpres No. 3/2007 dimaksudkan untuk menanggulangi ketidakstabilan harga gabah/beras pada akhir tahun 2006 sampai 2007.
4. Inpres No. 1/2008 bertujuan untuk mengantisipasi tingginya harga beras dunia sebagai akibat dari berbagai masalah di negara-negara produsen beras seperti bencana alam, disamping tingginya harga minyak mentah dunia.
5. Inpres No. 8/2008 diterbitkan karena harga gabah/beras sudah berada jauh di atas HPP yang menyebabkan Bulog menemui kesulitan dalam melakukan pengadaan beras dari dalam negeri.

6. Inpres No. 7/2009 (kenaikan HPP) dilatarbelakangi oleh kondisi dimana alokasi APBN untuk subsidi pupuk turun.
7. Inpres No. 8/2011 tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan yang dikelola oleh Pemerintah dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim, didasari oleh kesulitan Bulog dalam melaksanakan pengadaan beras dari dalam negeri karena harga gabah/beras berada yang jauh di atas HPP sehingga cadangan beras pemerintah terlalu rendah.

» Kebijakan Non Harga

Kebijakan non harga dapat disepandankan dengan kebijakan untuk membangkitkan sektor riil pertanian berupa peningkatan kapasitas produksi melalui ekstensifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi. Oleh karena itu, perlu dipertimbangan untuk menerapkan kebijakan non harga secara lebih progresif seperti perbaikan dan rehabilitasi irigasi, meningkatkan pemakaian varietas unggul melalui penyediaan yang memadai di pasar dengan harga terjangkau (Pusat Studi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2006).

» Kebijakan Struktural

Kebijakan struktural dalam pertanian dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi misalnya luas pemilikan tanah, pengenalan dan pengusaha alat-alat pertanian yang baru dan perbaikan prasarana pertanian (Nurjaman, 2013).

Kebijakan struktural ini hanya dapat terlaksana dengan kerjasama yang erat dari beberapa lembaga pemerintah. Perubahan struktur yang dimaksud disini tidak mudah untuk mencapainya dan biasanya memakan waktu lama. Hal ini disebabkan sifat usahatani yang tidak saja merupakan unit usaha ekonomi tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan petani dengan segala aspeknya. Oleh karena itu tindakan ekonomi saja tidak akan mampu mendorong perubahan struktural dalam sektor pertanian sebagaimana dapat dilaksanakan dengan lebih mudah pada sektor industri. Pengenalan baru dengan penyuluhan-penyuluhan yang intensif merupakan satu contoh dari kebijakan ini.

» Kebijakan Pemasaran

Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus dalam kelembagaan perdagangan dengan tujuan yang sama, tetapi dengan tekanan pada perubahan mata rantai pemasaran dari produsen ke konsumen, dengan tujuan utama untuk memperkuat daya saing petani (Nurjaman, 2013). Masalah yang dihadapi di Indonesia adalah kurangnya kegairahan berproduksi pada tingkat petani, tidak ada keinginan untuk mengadakan penanaman baru dan usaha-usaha lain untuk menaikkan produksi karena persentase harga yang diterima oleh petani relatif kecil dibandingkan dengan bagian yang diterima golongan-golongan lain.

Selain kebijakan pemasaran hasil-hasil tanaman perdagangan untuk ekspor, kebijakan ini meliputi pula pengaturan distribusi sarana-sarana produksi bagi petani. Pemerintah berusaha menciptakan persaingan yang sehat di antara para pedagang dengan melayani kebutuhan petani seperti pupuk, insektisida, pestisida dan lain-lain sehingga petani akan dapat membeli sarana-sarana produksi tersebut dengan harga yang relatif tidak terlalu tinggi. Jadi disini jelas bahwa kebijakan pemasaran merupakan usaha campur tangan pemerintah dalam bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar. Di satu pihak pemerintah dapat mengurangi pengaruh kekuatan-kekuatan pasar supaya tidak terlalu merugikan pedagang dan petani, tetapi di pihak lain persaingan dapat didorong untuk mencapai efisiensi ekonomi yang tinggi. Dalam praktek kebijakan pemasaran dilaksanakan secara bersamaan dengan kebijakan harga.

» Kebijakan Pengembangan Teknologi Pasca Panen

Keberhasilan penanganan pasca panen sangat tergantung dari mutu bahan baku dari kegiatan pembibitan dan proses produksi/budidaya, karena itu penanganan proses produksi di kebun juga harus memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip cara budidaya yang baik dan benar (Good Agricultural Practices-GAP). Dengan demikian petani akan mendapatkan nilai tambah berupa insentif peningkatan harga dan jaminan pasar. Pembinaan dari Kementerian Pertanian terus dilakukan, antara lain membuat berbagai panduan Prosedur Standar Operasional penanganan pasca panen, yang memberikan acuan secara teknis pada mengenai pascapanen yang baik dan benar untuk menghasilkan produk dengan daya saing tinggi.

2.3. Kebijakan Bantuan Langsung

Kebijakan Raskin

Program Raskin pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998 di bawah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Beberapa penyesuaian yang telah dilakukan antara lain meliputi perubahan nama, jumlah beras per rumah tangga, frekuensi distribusi, sumber dan jenis data sasaran penerima manfaat, dan penyediaan lembaga pendamping. Pada 2002, pemerintah mengganti nama OPK (Operasi Pasar Khusus) menjadi Program Raskin agar lebih mencerminkan sifat program, yakni sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi RTM (Rumah Tangga Miskin), tidak lagi sebagai program darurat penanggulangan dampak krisis ekonomi. Menurut pemantauan di lapangan, setidaknya terdapat lima masalah dalam penyaluran program raskin. Pertama, mengenai salah sasaran. Program raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata (banyak juga yang) jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Menurut Lembaga Penelitian SMERU (dalam www.ppk.or.id) mengatakan bahwa Raskin menjangkau 52,6% rumah tangga miskin, namun rumah tangga tidak miskin yang terjangkau juga

relatif tinggi, yakni 36,9%. Kedua, jumlah beras yang dibagikan sering tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Jumlah raskin yang dijual kepada masyarakat (miskin) sudah pasti berkurang karena pembagian beras, sering tidak diukur dalam bentuk kilogram (sesuai dengan program) tetapi dalam liter, sehingga kuantitas beras yang diterima tak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Ketiga, harga yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Dari paparan implementasi Program Raskin tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran raskin amat rentan terhadap kesalahan, penyelewengan, dan bahkan manipulasi.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pada tahun 2005, Pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) untuk membantu kalangan tidak mampu menghadapi laju inflasi saat itu yang sangat tinggi akibat dinaikkannya harga BBM hingga 126%. Program ini dibagi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu :

1. PKPS BBM Tahap I, merupakan program kompensasi di bidang pendidikan, melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM); bidang Kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, serta bidang infrastruktur pedesaan.
2. PKPS BBM Tahap II : Bantuan Langsung Tunai tanpa syarat kepada Rumah Tangga Sasaran (unconditional cash transfer) sebesar Rp100.000/bulan selama 1 (satu) tahun, dan setiap tahap diberikan Rp 300.000/3 bulan.

Program BLT dilaksanakan pada bulan September 2005, melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin. Sasaran program BLT ini adalah rumah tangga sasaran yang didata oleh BPS sejumlah 19.1 juta, dengan DIPA Departemen Sosial yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

Pada tahun 2008, melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran, sebagai kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali diluncurkan program ini dengan alokasi sebesar Rp 14.1 triliun. Program ini dilaksanakan dari bulan Juni s.d Desember 2008 (selama 7 bulan), dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai tanpa syarat kepada Rumah Tangga Sasaran (unconditional cash transfer) sebesar Rp 100.000,-/bulan, dengan rincian diberikan Rp300.000,-/3 bulan (Juni-Agustus) dan Rp 400.000,-/4 bulan (September-Desember). Sasaran utama terdiri dari Keluarga Sangat Miskin dan Keluarga Miskin serta 5-7 juta PNS/TNI/Polri (golongan I dan II).

BLT yang idealnya harus memenuhi tugas hakikinya yakni membantu masyarakat miskin dengan dasar hukum InPres No.3/2008, memiliki tujuan mulia yang digariskan secara yuridis formal di dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran BLT untuk RTS tahun 2008 sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi;
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Pada tahun 2009, Pemerintah kembali menggulirkan program pemberian Bantuan Langsung Tunai Plus kepada rumah tangga sasaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Untuk Rumah Tangga Sasaran Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan.

2.4. Kerangka Pemikiran Konseptual

Salah satu target utama dari pembangunan pertanian adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tingkat pendapatan petani merupakan unsur penting yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Namun demikian upaya peningkatan pendapatan petani tidak selalu otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada nilai pengeluaran keluarga petani serta faktor-faktor non-finansial lainnya seperti faktor sosial budaya. Langkah perbaikan kesejahteraan petani dituangkan dalam sejumlah kebijakan dan program bidang pertanian dan di luar sektor pertanian terkait.

Dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan pertanian Stiglitz (2004) memberikan beberapa saran yang perlu diperhatikan. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Usaha pengembangan ekonomi lebih difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk di pedesaan yang berprofesi sebagai petani
2. Program industrialisasi mestinya difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan mayoritas
3. Pendidikan menjadi pra-syarat utama pembangunan dan ini harus dapat dijangkau oleh golongan mayoritas
4. Dalam Pembangunan Pertanian, prioritas bukan sekedar memproduksi komoditi, tapi penciptaan nilai tambah (*value added*)
5. Industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani
6. Sebagian besar hasil pertanian terutama perkebunan masih diolah di luar Indonesia, misalnya karet, crude plam oil/CPO, kakao, dll. Hal ini sebenarnya sangat mendukung industrialiasi, oleh karena itu sebaiknya produk bukan dijual sebagai barang mentah.
7. Terkait dengan efisiensi, program swastanisasi/privatisasi perlu persiapan, karena liberalisasi yang terburu-buru akan sangat berbahaya
8. Peran dan intervensi pemerintah untuk memberi prioritas pada "mayoritas" tetap diperlukan, bukan sepenuhnya diserahkan pada "*market mechanism*" (*invisible hand*).

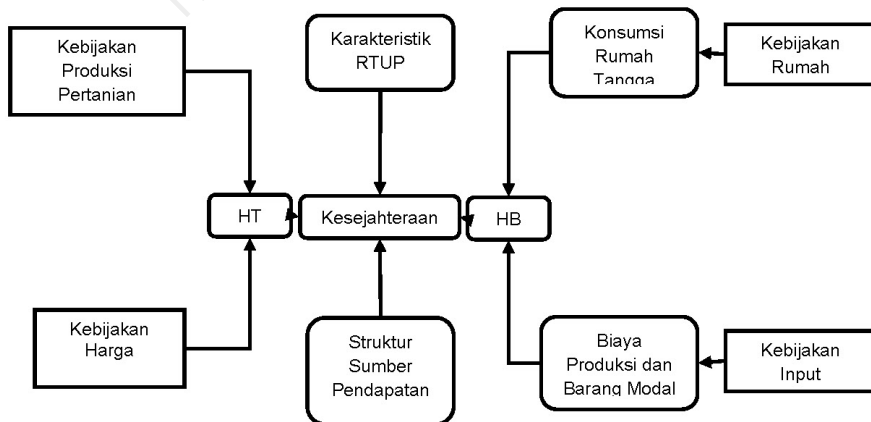
9. Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan capur tangan dan atau peran pemerintah

Kebijakan pembangunan pertanian diidentifikasi menggunakan pendekatan pengaruh yang dirancang khususnya terhadap sistem pertanian mikro. Kebijakan pertanian di sini dikaitkan dengan masalah output dan input pertanian, kebijakan tersebut antara lain: Kebijakan harga, kebijakan pasar, kebijakan input, kebijakan perkreditan, kebijakan makanisasi, kebijakan reformasi agrarian, kebijakan penelitian, dan kebijakan irigasi (Ellis, 1992).

Dengan didasarkan kepada konsep NTP yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani, konsep NTP mengacu kepada kemampuan daya beli petani, yaitu kemampuan pendapatan yang diterima petani untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh melalui upaya untuk meningkatkan pendapatan dan atau meningkatkan kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan pendapatan dan konsumsi rumah tangga, seperti kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian; sistem distribusi dan pemasaran produksi hasil pertanian, pembentukan harga produksi, kebijakan subsidi dan insentif, penyediaan infrastruktur, dan berbagai kebijakan di luar pertanian terkait dengan konsumsi rumah tangga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memperbaiki daya beli petani adalah dengan penerapan subsidi yang dapat mengurangi tingkat pengeluaran rumah tangga, melalui pemberian bantuan langsung, subsidi harga jual dan keringanan lainnya (Gambar 2.3).

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Konseptual



Sumber: Diadaptasi dari Bappenas dan JICA, 2013





3

METODE KAJIAN



3.1. Kerangka Pemikiran Operasional

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Namun demikian, saat ini perekonomian Indonesia dihadapkan pada masalah yang sangat berat, salah satunya adalah ketimpangan kesejahteraan antar sektor. Ketimpangan kesejahteraan antar sektor salah satunya dapat dilihat di sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki kemakmuran terendah. Nilai Tukar Petani (NTP) yang banyak digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani, peningkatannya relatif lambat.

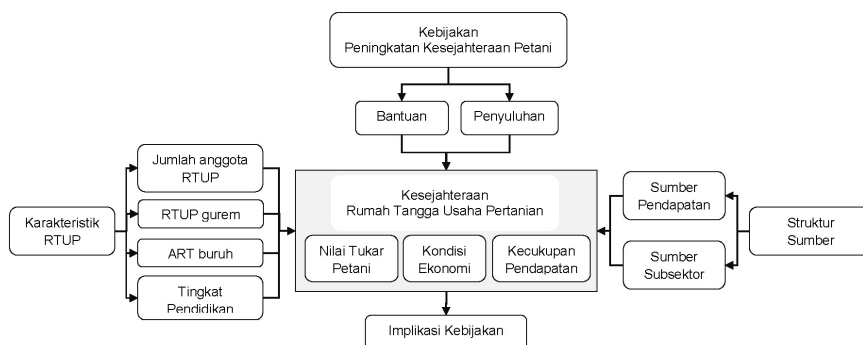
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun demikian, kesejahteraan petani masih menjadi yang terendah dibanding pekerja di sektor ekonomi lainnya. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelusuran mengapa hal tersebut masih terjadi terutama dari sisi kebijakan. Review kebijakan peningkatan kesejahteraan petani akan dilihat menyeluruh, baik kebijakan di hulu, hilir maupun kebijakan terkait lainnya. Selanjutnya, dilakukan sintesis sehingga diperoleh faktor-faktor dan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Lebih lanjut, akan dianalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani yang digunakan sebagai input merumuskan arah kebijakan peningkatan kesejahteraan petani. Dengan keterbatasan data sensus pertanian 2003 dan data sensus pertanian 2013, maka hanya digunakan tiga kelompok variabel sebagai determinan kesejahteraan rumah tangga pertanian, yaitu:

- 1) Karakteristik RTUP
- 2) Struktur Sumber Pendapatan
- 3) Kebijakan Pemerintah (bantuan subsidi dan penyuluhan)

Gambar 3.1

Kerangka Pemikiran Operasional



3.2. Ukuran Kesejahteraan Petani

Dibanyak kajian yang membahas kesejahteraan petani, ukuran kesejahteraan yang umum dan sering digunakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Hal tersebut berdasar bahwa unsur penting yang dijadikan sebagai indikator kesejahteraan petani adalah besarnya pendapatan dan perimbangannya dengan pengeluaran, dan nilai tukar petani mampu menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli petani terhadap produk yang dibeli/dibayar petani.

Sebagai pembanding dari NTP yang umum dan sering digunakan sebagai ukuran kesejahteraan petani, maka pada kajian ini ukuran kesejahteraan yang digunakan adalah:

- Persepsi perubahan kondisi ekonomi; menjelaskan mengenai persepsi rumah tangga pertanian terhadap perubahan ekonomi rumah tangganya, apakah mengalami peningkatan, tetap atau menurun.
- Persepsi kecukupan pendapatan; menjelaskan mengenai persepsi RTUP terhadap kecukupan pendapatan yang didapat rumah tangga tersebut, apakah cukup atau kurang.

Kedua ukuran kesejahteraan petani tersebut diperoleh dari data sensus pertanian baik tahun 2003 dan tahun 2013.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu antara lain:

- 1) Data Sensus Pertanian Tahun 2003
- 2) Data Sensus Pertanian Tahun 2013
- 3) Data NTP yang dipublikasikan oleh BPS

3.4. Teknik Analisis Data

Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Adapun variabel independen dan variabel dependen adalah sebagai berikut:

a. Variabel Independen (X)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent variable) adalah: rata-rata jumlah anggota rumah tangga (ART), proporsi ART buruh di sektor pertanian, proporsi ART buruh di luar sektor pertanian, proporsi pendapatan hortikultura, proporsi pendapatan lainnya, proporsi pendapatan non pertanian, proporsi pendapatan padi+palawija, proporsi pendapatan perikanan, proporsi pendapatan perkebunan, proporsi pendapatan pertanian, proporsi pendapatan peternakan, pendidikan atas (akademi/DIII dan sarjana), pendidikan menengah (SMA dan DI/DII, pendidikan bawah (SMP ke bawah), bantuan pembiayaan kredit, bantuan bibit/benih/ induk, bantuan pestisida dan obat-obatan, bantuan pupuk/ vitamin, dan mineral, bantuan alat mesin pertanian, bantuan ternak, RTUP yang mengikuti penyuluhan, RTUP yang mengikuti penyuluhan budidaya, RTUP yang mengikuti penyuluhan pemasaran hasil, dan penyuluhan pengolahan hasil.

b. Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah persepsi peningkatan kondisi ekonomi, persepsi kecukupan pendapatan dan Nilai Tukar Petani (NTP).

Analisis Tabulasi Deskriptif

Analisis tabulasi deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik RTUP, struktur sumber pendapatan RTUP, dan kebijakan peningkatan kesejahteraan petani. Tabulasi deskriptif juga digunakan untuk menganalisis perubahan yang terjadi pada karakteristik, struktur sumber pendapatan RTUP dan kebijakan peningkatan kesejahteraan petani. Data yang digunakan untuk menganalisis perubahan adalah data panel dengan data series dua titik yaitu Sensus Pertanian 2003 dengan Sensus Pertanian 2013 dan data cross-section-nya adalah 30 provinsi sesuai dengan jumlah provinsi pada sensus pertanian 2003. Provinsi pemekaran digabungkan kembali ke provinsi induknya.

Analisis Regresi

Metode pendekatan statistik yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kondisi ekonomi, kecukupan pendapatan dan nilai tukar petani adalah dengan metode regresi linear dengan kuadrat terkecil

biasa (Ordinary Least Square =OLS). Terdapat tiga model dalam kajian ini, (1) Model peningkatan kondisi ekonomi, (2) Model kecukupan pendapatan, dan (3) Model Nilai Tukar Petani.

» Pengaruh Karakteristik RTUP, Struktur Sumber Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah terhadap Peningkatan Kondisi Ekonomi RTUP

Dalam kajian ini, faktor-faktor yang diduga akan mempengaruhi peningkatan kondisi ekonomi RUTP dituliskan sebagai berikut:

$$PKE_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 X1_{it} + \alpha_2 X2_{it} + \alpha_3 X3_{it} + \dots + \alpha_n Xn_{it} + e_i$$

di mana :

PKE_{it} = Peningkatan kondisi ekonomi (%)

$X1$ = Rata-rata jumlah anggota rumah tangga ke-t (orang)

$X2$ = RTUP gurem ke-t (%)

$X3$ = ART buruh di sektor pertanian ke-t (%)

$X4$ = ART buruh di luar sektor pertanian ke-t (%)

$X5$ = Pendidikan bawah ke-t (%)

$X6$ = Pendidikan menengah ke-t (%)

$X7$ = Pendidikan atas ke-t (%)

$X8$ = Pendapatan dari sektor pertanian ke-t (%)

$X9$ = Pendapatan dari luar sektor pertanian ke-t (%)

$X10$ = Pendapatan dari padi+palawija ke-t (%)

$X11$ = Pendapatan dari hortikultura ke-t (%)

$X12$ = Pendapatan dari perkebunan ke-t (%)

$X13$ = Pendapatan dari peternakan ke-t (%)

$X14$ = Pendapatan dari perikanan ke-t (%)

$X16$ = Bantuan pembiayaan kredit ke-t (RTUP)

$X17$ = Bantuan bibit/benih/induk ke-t (RTUP)

$X18$ = Bantuan pupuk/vitamin dan mineral ke-t (RTUP)

$X19$ = Bantuan pestisida dan obat-obatan ke-t (RTUP)

$X20$ = Bantuan alat mesin pertanian ke-t (RTUP)

$X21$ = Bantuan ternak ke-t (RTUP)

$X22$ = RT yang mengikuti penyuluhan (%)

$X23$ = RT yang mengikuti penyuluhan budidaya (%)

$X24$ = RT yang mengikuti penyuluhan pemasaran hasil (%)

$X25$ = RT yang mengikuti penyuluhan pengolahan hasil (%)

α_0 = Konstanta (intercept)

α_n = parameter yang diduga (n= 1,2.....25).

» Pengaruh Karakteristik RUTP, Struktur Sumber Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah terhadap Kecukupan Pendapatan RTUP

Dalam kajian ini, faktor-faktor yang diduga akan mempengaruhi kecukupan pendapatan RUTP dituliskan sebagai berikut:

$$KP_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \dots + \beta_n Xn_{it} + e_i$$

di mana:

KP = Kecukupan pendapatan RTUP

β_0 = Konstanta (intercept)

β_n = parameter yang diduga (n= 1,2.....25).

» Pengaruh Karakteristik RUTP, Struktur Sumber Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah terhadap Nilai Tukar Petani

Dalam kajian ini, faktor-faktor yang diduga akan mempengaruhi nilai tukar petani dituliskan sebagai berikut:

$$NTP_i = \mu_0 + \mu_1 X1_i + \mu_2 X2_i + \mu_3 X3_i + \dots + \mu_n Xn_i + e_i$$

di mana:

NTP = Nilai Tukar Petani

μ_0 = Konstanta (intercept)

μ_n = parameter yang diduga (n= 1,2.....25).





4

**KARAKTERISTIK DAN
SUMBER PENDAPATAN
RUMAH TANGGA USAHA
PERTANIAN (RTUP)**

4 Karakteristik dan Sumber Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP)



4.1. Karakteristik Rumah Tangga Usaha Pertanian

Kepemilikan dan Penguasaan Lahan

Lahan merupakan faktor utama dalam kegiatan usaha pertanian. Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Luas lahan yang dikuasai juga menentukan tingkat pendapatan rumah tangga petani dan pada gilirannya akan menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2013 lebih dua kali lipat dari keadaan tahun 2003, yaitu dari sekitar 0,35 hektar menjadi 0,86 hektar. Sensus Pertanian 2013 juga menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan rata-rata luas lahan sawah yang dikuasai rumah tangga. Ada dua kemungkinan yang bisa menjelaskan naiknya rata-rata luas pertanian yang dikuasai rumah tangga, yaitu keberhasilan program

Tabel 4.1
Jumlah Rumah Tangga Usaha
Pertanian Menurut Golongan Luas
Lahan yang Dikuasai Tahun 2003
dan 2013

Sumber : BPS, 2014

Golongan Luas Lahan (m ²)	Rumah Tangga Usaha Pertanian		Pertumbuhan	
	2003	2013	Absolut	%
<1000	9.380.300	4.338.849	-5.041.451	-53,75
1000-1999	3.602.348	3.550.180	-52.168	-1,45
2000-4999	6.816.943	6.733.362	-83.581	-1,23
5000-9999	4.782.812	4.555.073	-227.739	-4,76
10000-19999	3.661.529	3.725.849	64.320	1,76
20000-29999	1.678.356	1.623.428	-54.928	-3,27
≥30000	1.309.896	1.608.728	298.832	22,81
Jumlah	31.232.184	26.135.469	-5.096.715	-16,32

pemerintah tahun 2006-2010 tentang pencetakan lahan sawah baru seluas 69.102 hektar, atau semakin banyaknya rumah tangga usaha pertanian yang telah beralih kepada kegiatan sektor non pertanian, sehingga penguasaan lahan per rumah tangga usaha pertanian meningkat.

Jika dilihat menurut pengelompokan luas lahan yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian, terjadi penurunan di hampir semua kelompok penguasaan lahan. Penurunan terbesar terjadi pada golongan penguasaan lahan <0,1 hektar sekitar 5 juta rumah tangga. Selain itu, jika pada ST2003 terlihat mayoritas rumah tangga usaha pertanian menguasai lahan <0,1 hektar, maka pada ST2013 bergeser pada kelompok yang lebih luas.

Jumlah rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan dalam kurun waktu 2003 hingga 2013 menurun sebesar 15 persen atau sebesar 4,6 juta rumah tangga usaha pertanian. Penurunan jumlah usaha rumah tangga pertanian pengguna lahan terjadi di 22 provinsi. Provinsi dengan penurunan terbesar berada di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta (-79,87 persen), Banten (-33,25 persen), Jawa Barat (-22,34 persen), Jawa Tengah (-25,18 persen) dan Jawa Timur (-20,32 persen). Namun demikian, terdapat 11 provinsi yang menunjukkan peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian yaitu Provinsi Papua, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Riau, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan (Tabel 4.2).



Tabel 4.2

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Menurut Provinsi Tahun 2003 dan 2013

Provinsi	Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan		Pertumbuhan	
	2003	2013	Absolut	%
Aceh	691.454	637.778	-53.676	-7,76
Sumatera Utara	1.451.813	1.308.393	-143.420	-9,88
Sumatera Barat	695.739	640.695	-55.044	-7,91
Riau	511.395	568.070	56.675	11,08
Jambi	401.052	426.647	25.595	6,38
Sumatera Selatan	946.858	949.801	2.943	0,31
Bengkulu	275.769	275.559	-210	-0,08
Lampung	1.272.932	1.218.927	-54.005	-4,24
Kepulauan Bangka Belitung	127.412	117.488	-9.924	-7,79
Kepulauan Riau	56.086	50.230	-5.856	-10,44
Dki Jakarta	47.262	9.515	-37.747	-79,87
Jawa Barat	4.242.003	3.039.716	-1.202.287	-28,34
Jawa Tengah	5.697.473	4.262.608	-1.434.865	-25,18
D I Yogyakarta	573.092	495.401	-77.691	-13,56
Jawa Timur	6.189.481	4.931.506	-1.257.975	-20,32
Banten	875.287	584.259	-291.028	-33,25
Bali	485.531	404.507	-81.024	-16,69
Nusa Tenggara Barat	686.172	587.617	-98.555	-14,36
Nusa Tenggara Timur	722.039	770.864	48.825	6,76
Kalimantan Barat	594.483	616.894	22.411	3,77
Kalimantan Tengah	273.806	261.227	-12.579	-4,59
Kalimantan Selatan	450.903	420.352	-30.551	-6,78
Kalimantan Timur	180.515	165.413	-15.102	-8,37
Kalimantan Utara	34.595	39.369	4.774	13,80
Sulawesi Utara	300.834	246.394	-54.440	-18,10
Sulawesi Tengah	372.636	387.258	14.622	3,92
Sulawesi Selatan	1.049.449	950.241	-99.208	-9,45
Sulawesi Tenggara	293.555	299.926	6.371	2,17
Gorontalo	118.257	117.248	-1.009	-0,85
Sulawesi Barat	160.863	179.814	18.951	11,78
Maluku	178.497	170.169	-8.328	-4,67
Maluku Utara	124.480	127.865	3.385	2,72
Papua Barat	71.131	65.458	-5.673	-7,98
Papua	266.728	424.058	157.330	58,99
Indonesia	30.419.582	25.751.267	-4.668.315	-15,35

Sumber : BPS, 2014

Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem

Salah satu ciri rumah tangga usaha pertanian di negara berkembang adalah kecilnya luas lahan yang dikuasai, baik itu lahan milik sendiri maupun lahan milik orang lain. Petani gurem didefinisikan sebagai petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar (BPS, 2014b). Sensus Pertanian 2013 menunjukkan di Indonesia terdapat 14,25 juta rumah tangga pertanian gurem atau sebesar 55 persen dari seluruh rumah tangga pengguna lahan. Jika dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu, telah terjadi penurunan persentase rumah tangga petani gurem 25,07 persen. Penurunan tersebut disebabkan karena peningkatan jumlah dan persentase petani dengan luas di atas 0,5 hektar, atau peralihan lapangan usaha ke sektor nonpertanian atau bahkan hanya menjadi buruh tani (BPS, 2014b).

Penurunan jumlah usaha rumah tangga pertanian gurem terjadi di 26 provinsi. Provinsi dengan penurunan terbesar yaitu DKI Jakarta (-81,04 persen), Kalimantan Timur (-51,27 persen), Kepulauan Bangka Belitung (-50,71 persen), Sumatera Selatan (-49,13 persen) dan Riau (-45,53 persen). Namun demikian, terdapat tujuh provinsi yang menunjukkan peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian gurem yaitu Provinsi Papua (79,87 persen), Kalimantan Utara (28,86 persen), Sulawesi Barat (16,38 persen), Maluku (13,39 persen), Aceh (11,22 persen), Maluku Utara (11,07 persen) dan Sulawesi Tengah (5,92 persen) (Tabel 4.3).

Meskipun hasil sensus pertanian 2013 mencatat bahwa terjadi penurunan jumlah petani gurem di Jawa Barat sebesar 34,37 persen, Jawa Tengah (28,46 persen), dan Jawa Timur (23,25 persen) dibanding tahun 2003, tetap saja ketiga provinsi ini merupakan yang terbesar dari sisi jumlah maupun persentase terhadap jumlah petani pengguna lahan (Tabel 4.3).



Tabel 4.3

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem Menurut Provinsi Tahun 2003 dan 2013

Provinsi	Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem		Pertumbuhan	
	2003	2013	Absolut	%
Aceh	248.823	276.729	27.906	11,22
Sumatera Utara	751.330	570.185	-181.145	-24,11
Sumatera Barat	357.797	275.135	-82.662	-23,10
Riau	125.418	68.560	-56.858	-45,33
Jambi	101.836	65.499	-36.337	-35,68
Sumatera Selatan	218.091	110.932	-107.159	-49,13
Bengkulu	49.147	35.974	-13.173	-26,80
Lampung	447.126	362.148	-84.978	-19,01
Kepulauan Bangka Belitung	52.891	26.069	-26.822	-50,71
Kepulauan Riau	28.379	20.545	-7.834	-27,60
Dki Jakarta	45.428	8.611	-36.817	-81,04
Jawa Barat	3.501.867	2.298.193	-1.203.674	-34,37
Jawa Tengah	4.629.877	3.312.235	-1.317.642	-28,46
D I Yogyakarta	479.780	424.557	-55.223	-11,51
Jawa Timur	4.893.626	3.755.837	-1.137.789	-23,25
Banten	634.415	379.888	-254.527	-40,12
Bali	313.111	257.181	-55.930	-17,86
Nusa Tenggara Barat	446.040	350.131	-95.909	-21,50
Nusa Tenggara Timur	224.987	289.917	64.930	28,86
Kalimantan Barat	120.575	81.286	-39.289	-32,58
Kalimantan Tengah	45.564	29.083	-16.481	-36,17
Kalimantan Selatan	193.773	133.853	-59.920	-30,92
Kalimantan Timur	56.075	27.326	-28.749	-51,27
Kalimantan Utara	9.084	6.343	-2.741	-30,17
Sulawesi Utara	103.154	72.055	-31.099	-30,15
Sulawesi Tengah	69.935	74.073	4.138	5,92
Sulawesi Selatan	408.673	338.108	-70.565	-17,27
Sulawesi Tenggara	72.188	63.809	-8.379	-11,61
Gorontalo	44.791	40.959	-3.832	-8,56
Sulawesi Barat	43.560	50.696	7.136	16,38
Maluku	68.913	78.140	9.227	13,39
Maluku Utara	19.679	21.857	2.178	11,07
Papua Barat	39.344	37.570	-1.774	-4,51
Papua	169.774	305.380	135.606	79,87
Indonesia	19.015.051	14.248.864	-4.766.187	-25,07

Sumber : BPS, 2014

Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor Pertanian

Selama dua kali pelaksanaan Sensus Pertanian, tercatat rumah tangga usaha tanaman pangan adalah yang paling banyak diusahakan (17,7 juta rumah tangga), diikuti oleh rumah tangga usaha peternakan (17,9 juta rumah tangga). Hal lain yang bisa dilihat dari jumlah usaha tani hasil ST2013 ini adalah rendahnya jumlah petani yang berusaha di bidang perikanan, walaupun terjadi peningkatan pada rumah tangga perikanan tangkap. Pada 2003 tercatat sejumlah 2,49 juta usaha tani di subsektor perikanan. Jumlah ini menurun menjadi 1,98 juta usaha di tahun 2013. Penurunan ini disebabkan signifikannya penurunan rumah tangga perikanan tangkap sehingga tidak dapat dikompensasi oleh peningkatan yang cukup besar pada rumah tangga perikanan budidaya.

Provinsi	Rumah Tangga Usaha Pertanian		Pertumbuhan	
	2003	2013	Absolut	%
Sektor Pertanian	31.232.184	26.135.469	-5.096.715	-16,32
Subsektor:				
Tanaman Pangan	18.708.052	17.728.185	-979.867	-5,24
Padi	14.206.355	14.147.942	-58.413	-0,41
Palawija	10.941.919	8.624.243	-2.317.676	-21,18
Hortikultura	16.937.617	10.602.147	-6.335.470	-37,40
Perkebunan	14.128.539	12.770.090	-1.358.449	-9,61
Peternakan	18.595.824	12.969.210	-5.626.614	-30,26
Perikanan	2.489.681	1.975.233	-514.448	-20,66
Budidaya Ikan	985.418	1.187.563	202.145	20,51
Penangkapan Ikan	1.569.048	864.495	-704.553	-44,90
Kehutanan	6.827.937	6.782.856	-45.081	-0,66
Jasa Pertanian	1.846.140	1.075.935	-770.205	-41,72

Tabel 4.4

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor Pertanian Tahun 2003 dan 2013

Sumber : BPS, 2014

Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum Menurut Subsektor Pertanian

Sensus Pertanian 2003 dan 2013 melaporkan bahwa perusahaan pertanian berbadan hukum subsektor perkebunan adalah yang paling banyak diusahakan. Pada tahun 2013 perusahaan subsektor perkebunan mencapai 2.216 perusahaan, meningkat sebesar 19,01 persen dibanding tahun 2003. Perusahaan subsektor peternakan berada diperingkat kedua dengan total perusahaan sebanyak 629 perusahaan, meningkat sebesar 32,42 persen dibanding tahun 2003. Hal berbeda terjadi pada perusahaan palawija dan budidaya ikan yang perkembangannya menurun drastis. Perusahaan palawija menurun sebesar 66,67 persen dan perusahaan budidaya ikan menurun sebesar 44,62 persen. Secara rinci, perkembangan perusahaan pertanian berbadan hukum (perusahaan) menurut subsektor pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum Menurut Subsektor Pertanian Tahun 2003 dan 2013

Provinsi	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum		Pertumbuhan		Usaha Pertanian Lainnya 2013 (Unit)
	2003	2013	Absolut	%	
Sektor Pertanian	4.010	4.209	199	4,96	5.982
Subsektor:					
Tanaman Pangan	87	112	25	28,74	1.328
Padi	69	106	37	53,62	595
Palawija	18	6	-12	-66,67	956
Hortikultura	225	191	-34	-15,11	1.464
Perkebunan	1.862	2.216	354	19,01	1.461
Peternakan	475	629	154	32,42	2.247
Perikanan	631	394	-237	-37,56	989
Budidaya Ikan	520	288	-232	-44,62	960
Penangkapan Ikan	111	106	-5	-4,50	35
Kehutanan	730	678	-52	-7,12	968
Jasa Pertanian	0	0			521

Sumber : BPS, 2014

Petani Menurut Subsektor Pertanian dan Jenis Kelamin

Umur dan jenis kelamin petani merupakan faktor yang berkaitan erat dengan kemampuan kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha pertanian. Pada kondisi umur produktif biasanya tenaga kerja bisa bekerja secara baik dan maksimal sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Sementara itu jenis kelamin juga menentukan produktivitas untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu.

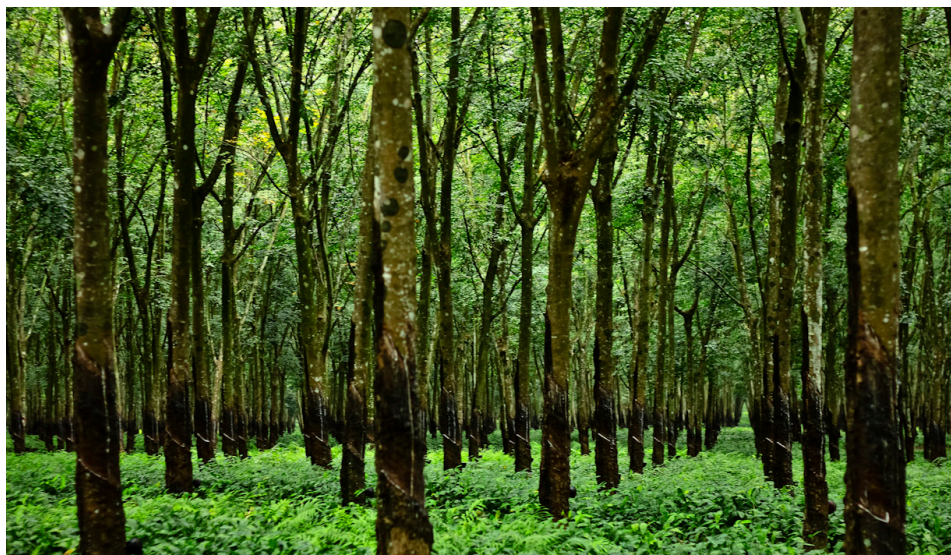
Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa dari sekitar 31,7 juta petani, 77 persennya adalah laki-laki. Sementara itu, sekitar 90 persen petani utama

Tabel 4.6

Jumlah Petani Menurut Sektor/Subsektor dan Jenis Kelamin Tahun 2013

Sektor/Subsektor	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
Sektor Pertanian	24.362.123	76,84	7.343.172	23,16	31.705.295	10
Subsektor:						
Tanaman Pangan	16.096.479	78,91	4.302.684	21,09	20.399.163	100
Hortikultura	9.342.563	78,17	2.608.439	21,83	11.951.002	100
Perkebunan	11.729.452	83,09	2.386.459	16,91	14.115.911	100
Peternakan	11.080.281	75,18	3.658.004	24,82	14.738.285	100
Perikanan						
Budidaya Ikan	1.141.097	88,54	147.724	11,46	1.288.821	100
Penangkapan Ikan	869.012	93,72	58.231	6,28	927.243	100
Kehutanan	6.220.928	85,82	1.027.989	14,18	7.248.917	100

Sumber : BPS, 2014



adalah laki-laki. Oleh karena itu, dapat dipahami bila lebih banyak laki-laki yang berkecimpung di sektor pertanian. Bila dilihat lebih jauh, sekitar 70 persen dari petani utama laki-laki ini berada pada kelompok usia produktif yaitu berumur di antara 15 tahun sampai 54 tahun, walaupun lebih mengelompok pada ujung usia produktif.

Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Petani Utama

Sebagian besar, usia petani utama laki-laki berada pada kisaran 45-54 tahun, kondisi ini menunjukkan bahwa usia petani utama berada di ujung usia produktif. Bahkan usia petani utama perempuan berada di kisaran di atas 55 tahun cukup tinggi. Fenomena petani utama perempuan dan berusia di luar usia produktif, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga sudah terjadi di beberapa negara sedang berkembang lainnya (BPS, 2014b).

Tabel 4.7

Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Petani Utama Tahun 2013

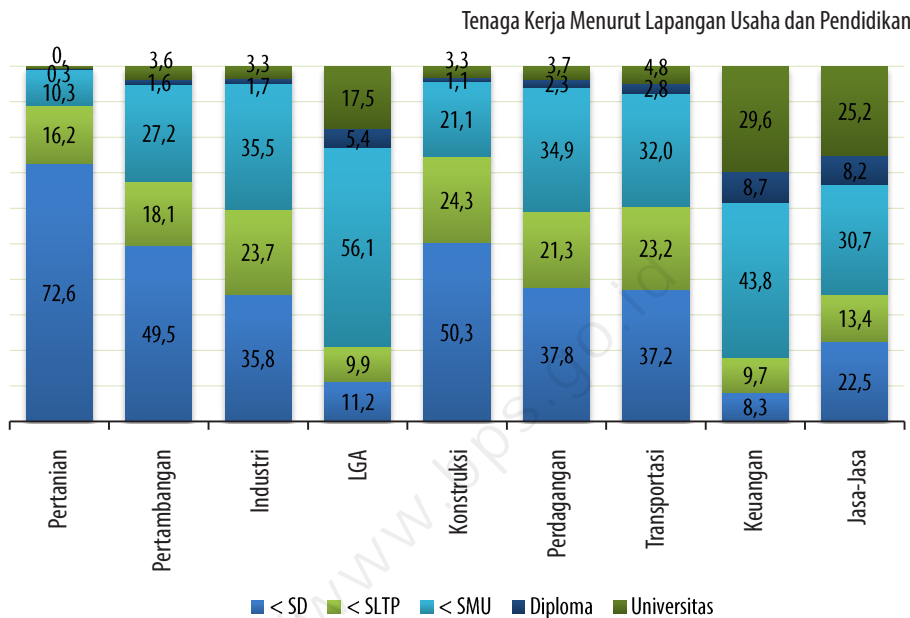
Sektor/Subsektor	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
<15	2,639	86.19	423	13.81	3,062	100
15-24	208,848	90.85	21,029	9.15	229,877	100
25-34	2,939,776	93.94	189,761	6.06	3,129,537	100
35-44	6,378,961	92.65	506,303	7.35	6,885,264	100
45-54	6,524,709	89.07	801,005	10.93	7,325,714	100
55-64	4,441,024	84.91	789,022	15.09	5,230,046	100
65+	2,640,010	79.23	691,959	20.77	3,331,969	100
JUMLAH	23,135,967	88.52	2,999,502	11.48	26,135,469	100

Sumber : BPS, 2014

Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Pendidikan

Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2013 memperlihatkan bahwa sektor pertanian menjadi wadah terbesar bagi sumber daya manusia berpendidikan rendah. Sebanyak 72,6 persen tenaga kerja sektor pertanian hanya berpendidikan sekolah dasar. Ini berbanding terbalik dengan industri keuangan, jasa, dan energi yang dipenuhi sumber daya manusia dengan daya inovasi tinggi.

Gambar 4.1



Sumber : Kemenakertrans 2013 dalam Achsan, 2014

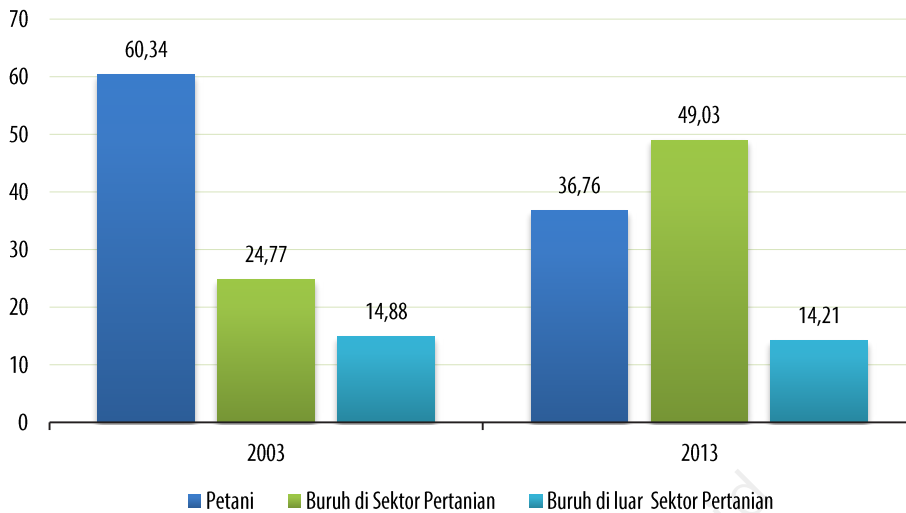
4.2. Struktur Sumber Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian

Struktur Pendapatan Berdasarkan Kegiatan

Struktur pendapatan menggambarkan tentang kontribusi dari setiap kegiatan usaha terhadap total pendapatan. Struktur pendapatan RTUP dibagi menjadi tiga jenis kegiatan utama, yaitu petani, buruh di sektor pertanian dan buruh di luar sektor pertanian. Apabila dibandingkan antara data sensus tahun 2003 dengan data sensus pertanian tahun 2013, maka terlihat ada perbedaan atau perubahan dalam proporsi antar jenis kegiatan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.2. Dibandingkan dengan tahun 2003, proporsi pendapatan yang bersumber dari kegiatan sebagai petani mengalami penurunan, dari yang sebelumnya 60,34 persen di tahun 2003 menjadi 36,76 persen di tahun 2013. Hal ini bertolak belakang dengan jenis kegiatan buruh di sektor pertanian yang mengalami kenaikan dari 24,77 persen di tahun 2003 menjadi 49,03 persen di tahun 2013. Dengan melihat proporsi jenis kegiatan buruh di luar sektor pertanian yang relatif stabil antara tahun 2003 dengan tahun 2013, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pergeseran kontribusi pendapatan dari kegiatan petani ke buruh di sektor pertanian.

Gambar 4.2

Proporsi Jenis Kegiatan Terhadap Pendapatan RTUP

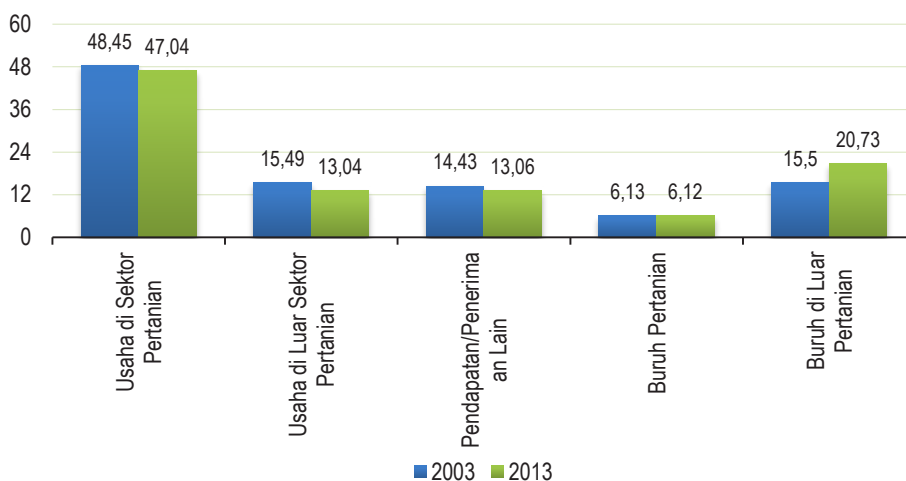


Sumber : BPS, 2014

Apabila dilihat rata-rata pendapatan berdasarkan sumbernya, maka proporsi rata-rata pendapatan tertinggi adalah di usaha sektor pertanian, diikuti rata-rata pendapatan di buruh luar pertanian dan usaha luar sektor pertanian. Sedangkan apabila dilihat perkembangan per tahun, maka sumber pendapatan yang mengalami kenaikan proporsi rata-rata pendapatan adalah di buruh luar sektor pertanian. Sedangkan sumber lainnya mengalami penurunan. Hal ini artinya bahwa dalam suatu RTUP, ada peningkatan kontribusi pendapatan dari buruh di luar pertanian. Sementara usaha di sektor pertanian semakin menurun kontribusi pendapatannya dalam suatu RTUP.

Gambar 4.2

Proporsi Jenis Kegiatan Terhadap Pendapatan RTUP



Sumber : BPS, 2014

Struktur Pendapatan Berdasarkan Subsektor Pertanian

Apabila dilihat lebih detail di masing-masing subsektor pertanian, maka yang berkontribusi besar terhadap struktur pendapatan RTUP bersumber dari kegiatan di subsektor tanaman padi dan palawija, diikuti dengan tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura, baik itu pada buruh/karyawan maupun yang berusaha seperti yang terlihat pada Tabel 4.8. Selain itu, apabila dilihat perbandingan antara tahun 2003 dengan tahun 2013 pada yang status berusaha, maka terlihat bahwa pada subsektor perkebunan terjadi kenaikan proporsi antara tahun 2003 dengan tahun 2013, dari 25,92% menjadi 28,52%. Adapun subsektor lain relatif tidak berubah signifikan.

Pada tataran status buruh/karyawan subsektor yang mengalami perubahan secara signifikan terlihat pada subsektor tanaman pangan. Proporsi pendapatan subsektor tanaman padi dan palawija tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2003, yaitu dari 57,83 menjadi 54,08. Di sisi lain, hal ini berbeda dengan yang terjadi pada status buruh/karyawan di tanaman perkebunan yang mengalami peningkatan dari yang sebelumnya pada tahun 2003 adalah 13,49 menjadi 27,31 di tahun 2013. Hal ini dapat diartikan bahwa ada pergeseran struktur pendapatan buruh/karyawan dari tanaman padi dan palawija ke tanaman perkebunan. Selain itu, lebih tingginya rata-rata pendapatan di subsektor tanaman perkebunan dibandingkan dengan rata-rata pendapatan di subsektor tanaman padi dan palawija menjadi sebab salah satu pergeseran tersebut.

Tabel 4.8

Struktur Pendapatan RTUP Nasional Berdasarkan Subsektor Pertanian Tahun 2003 dan Tahun 2013 (%)

Subsektor	Berusaha		Buruh/Karyawan	
	2003	2013	2003	2013
	%	%	%	%
Tanaman Padi dan Palawija	51,94	51,99	57,83	54,08
Tanaman Hortikultura	7,17	7,58	7,51	7,53
Tanaman Perkebunan	25,92	28,52	13,49	27,31
Peternakan	6,28	5,80	10,88	2,15
Budidaya Ikan di Laut	0,27	0,24	0,18	0,12
Budidaya Ikan di Tambak/Air Payau	0,57	0,48	0,27	0,33
Budidaya Ikan di Kolam Air Tawar	0,42	0,37	0,09	0,10
Budidaya Ikan di Perairan Umum	0,09	0,09	0,04	0,07
Penangkapan Ikan di Laut	2,79	2,34	1,55	3,02
Penangkapan Ikan di Perairan Umum	0,60	0,54	0,31	0,07
Tanaman Kehutanan	1,40	0,99	1,41	1,07
Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar	0,00	0,00	-	0,00
Pemungutan Hasil Hutan/ Penangkapan Satwa Liar	1,50	0,56	2,28	0,70
Jasa Pertanian dan Pembibitan Tanaman	1,04	0,51	4,16	3,45
	100	100	100	100

Sumber : BPS, 2014



5

**KEBIJAKAN-KEBIJAKAN
YANG DITERIMA RUMAH
TANGGA USAHA
PERTANAIN (RTUP)**

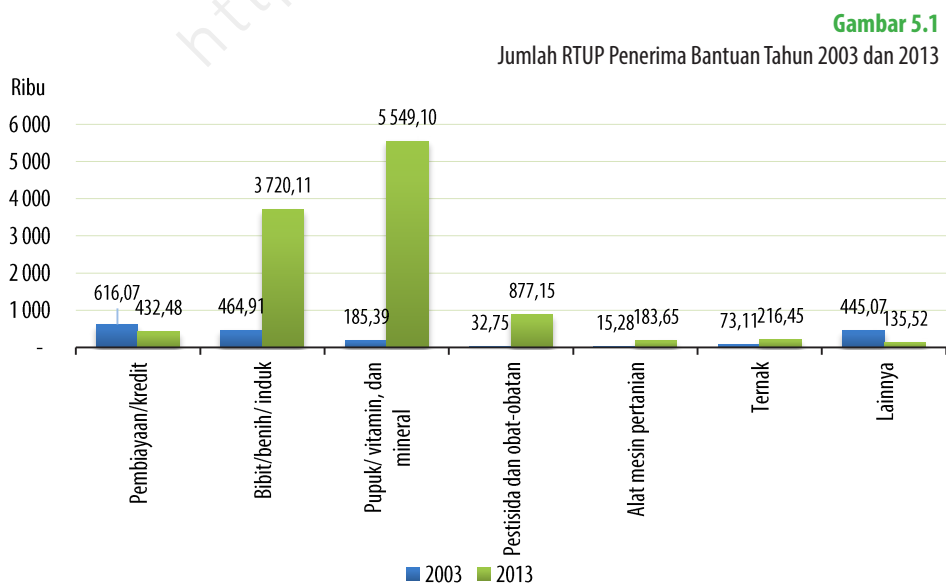
5

Kebijakan-Kebijakan yang Diterima Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP)



5.1. Subsidi/Bantuan/ Hibah

Salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani yaitu dengan memberikan bantuan atau subsidi baik di sektor hulu maupun hilir. Adapun jenis bantuan yang diberikan pemerintah terhadap Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) berupa bantuan pembiayaan kredit, subsidi bibit/benih, subsidi pupuk, bantuan pestisida dan obat-obatan, bantuan alat mesin pertanian, bantuan ternak dan bantuan lainnya. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.



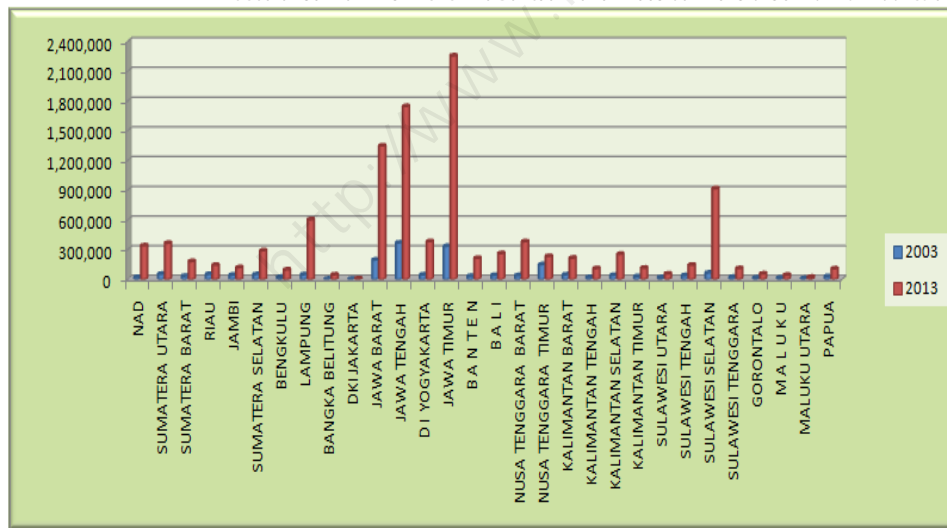
Sumber: BPS, Sensus Pertanian, 2013

Secara keseluruhan jumlah RTUP yang menerima bantuan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2003. Adapun jenis bantuan yang mengalami peningkatan jumlah RTUP penerima yaitu berupa bantuan bibit/benih/induk, bantuan subsidi pupuk, bantuan pestisida dan obat-obatan dan bantuan ternak. Bantuan berupa subsidi pupuk mengalami peningkatan penerima yang paling signifikan dibandingkan dengan jenis bantuan lainnya. Bantuan berupa pembiayaan kredit dan bantuan lainnya mengalami penurunan jumlah penerima di tahun 2013.

Pada tahun 2003 jumlah RTUP yang menerima subsidi/bantuan/ hibah dari pemerintah sebanyak 1.831.216 RTUP jumlah tersebut meningkat sangat signifikan di tahun 2013 yaitu menjadi 11.103.123 RTUP. Provinsi yang jumlah RTUP paling banyak menerima bantuan adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Sebaran jumlah RTUP penerima bantuan masih didominasi di wilayah Indonesia bagian barat hal ini dikarenakan sentra pertanian Indonesia berada di wilayah tersebut. Pada tahun 2003 provinsi yang paling banyak menerima bantuan pertanian dari pemerintah adalah provinsi Jawa Tengah, berbeda dengan tahun 2003 Pada tahun 2013 Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak menerima bantuan.

Gambar 5.2

Sebaran Jumlah RTUP Penerima Bantuan Tahun 2003 dan 2013 di 30 Provinsi Indonesia



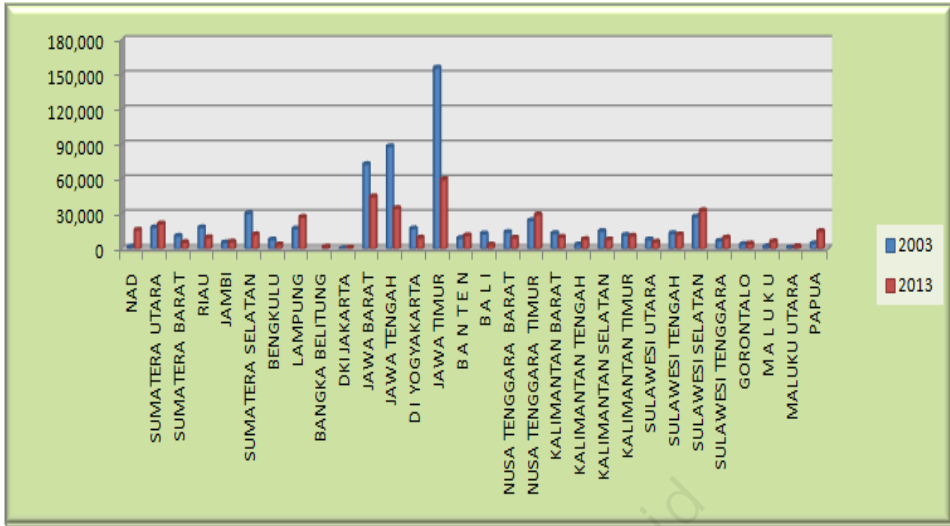
Sumber: BPS, Sensus Pertanian, 2013

Bantuan Pembiayaan Kredit

Jumlah RTUP yang menerima bantuan pembiayaan kredit pada tahun 2003 sebanyak 614.708 RTUP. Dimana provinsi yang banyak menerima bantuan pembiayaan kredit adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Dari kelima provinsi tersebut Jawa Timur merupakan

Gambar 5.3

Jumlah RTUP Penerima Bantuan Pembiayaan Kredit di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013



Sumber: BPS, Sensus Pertanian, 2013

provinsi yang paling banyak menerima bantuan pembiayaan kredit yaitu sebanyak 155.912 RTUP. Pada tahun 2013 jumlah keseluruhan RTUP yang menerima bantuan pembiayaan kredit menurun menjadi 432.479 RTUP sebagian besar jumlah RTUP penerima bantuan pembiayaan kredit di seluruh provinsi mengalami penurunan. Namun ada pula beberapa provinsi yang mengalami kenaikan, provinsi yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi adalah Provinsi NAD dimana jumlah RTUP yang menerima bantuan pembiayaan kredit pada tahun 2003 hanya 1.790 RTUP meningkat menjadi 16.246 RTUP di tahun 2013. Pada Tahun 2013 provinsi yang paling banyak menerima bantuan pembiayaan kredit adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.



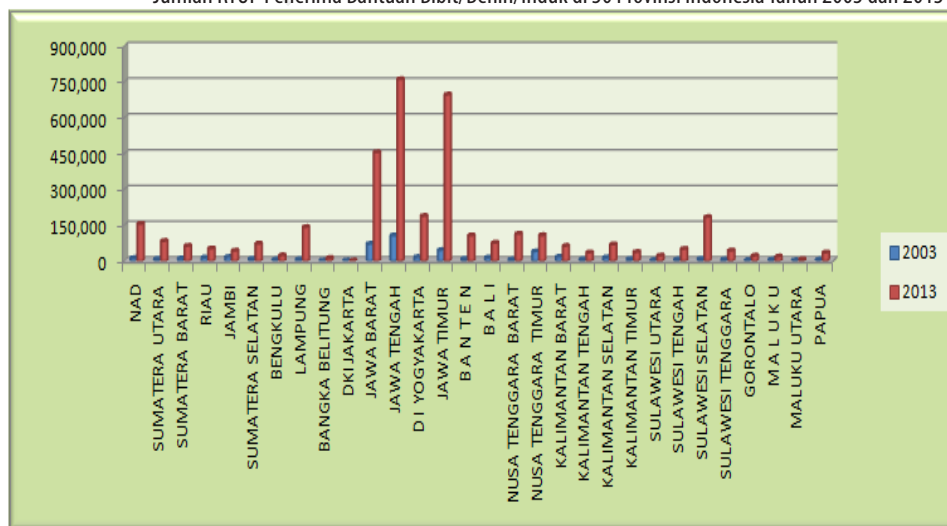


Bantuan Bibit/Benih/Induk

Pada tahun 2003 jumlah RTUP yang menerima bantuan bibit/benih/ induk sebanyak 464.914 RTUP. Provinsi yang paling banyak menerima bantuan berupa bibit, benih maupun induk yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Jambi. Jawa Tengah adalah provinsi yang paling banyak menerima bantuan tersebut dengan jumlah RTUP yang menerima bantuan sebanyak 105.800 RTUP. Pada tahun 2013 rata-rata jumlah penerima bantuan berupa bibit/ benih maupun induk diseluruh provinsi Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan jumlah seluruh RTUP yang menerima bantuan tersebut meningkat mencapai 3.720.112 RTUP. Di tahun 2013 Jawa Tengah masih tetap menjadi provinsi yang terbanyak menerima bantuan. Provinsi lainnya yang juga banyak menerima bantuan bibit/benih/ induk yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, NAD, dan Sulawesi Selatan

Gambar 5.4

Jumlah RTUP Penerima Bantuan Bibit/Benih/Induk di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013



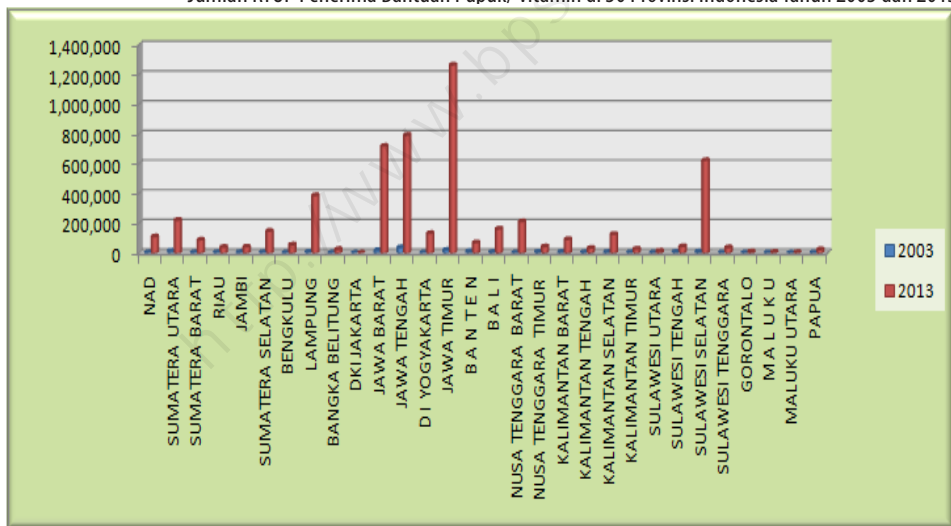
Sumber: BPS, Sensus Pertanian, 2013

Bantuan Pupuk/ Vitamin

Jumlah RTUP yang menerima bantuan pupuk/ vitamin pada tahun 2003 adalah 185.385 RTUP jumlah tersebut meningkat pesat ditahun 2013, dimana RTUP yang menerima bantuan pupuk/vitamin mencapai 5.549.104 RTUP. Provinsi yang paling banyak menerima bantuan pupuk/ vitamin di tahun 2003 adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten. Diantara kelima provinsi tersebut, Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang paling banyak menerima bantuan pupuk/vitamin yaitu sebanyak 37.155 RTUP. Di Tahun 2013 penerima bantuan pupuk/ vitamin mengalami peningkatan hampir di 30 provinsi di Indonesia. Peningkatan penerima bantuan pupuk/vitamin yang paling signifikan adalah provinsi Jawa Timur, dimana pada tahun 2003 jumlah RTUP yang menerima bantuan pupuk/vitamin hanya 19.674 RTUP dan kemudian meningkat di tahun 2013 menjadi 1.264.570 RTUP dan menjadi provinsi yang terbanyak menerima bantuan pupuk/vitamin di tahun 2013. Selain Provinsi Jawa Timur, Provinsi lainnya paling banyak menerima bantuan pupuk/vitamin di 2013 adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung dan Sulawesi Selatan.

Gambar 5.5

Jumlah RTUP Penerima Bantuan Pupuk/ Vitamin di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013



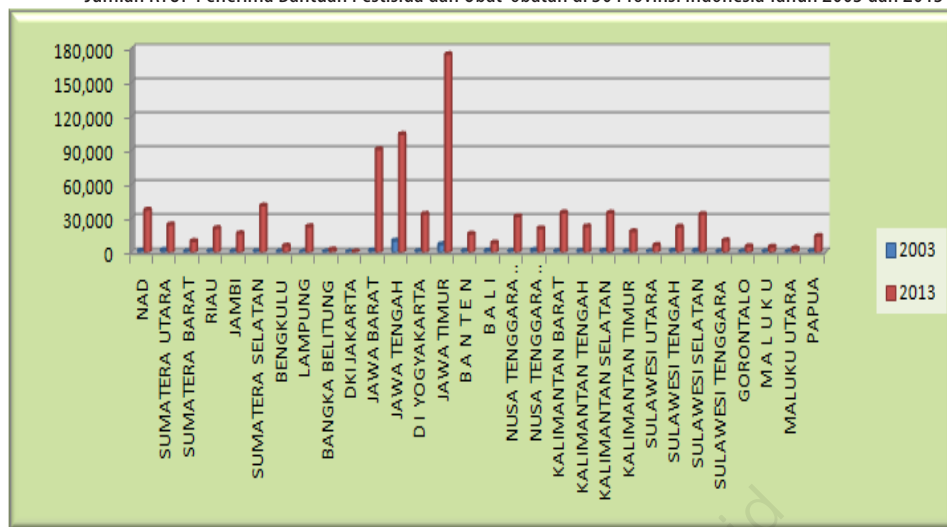
Sumber: BPS, Sensus Pertanian, 2013

Bantuan Pestisida dan Obat-obatan

Pada tahun 2003 jumlah RTUP yang menerima bantuan Pestisida dan obat-obatan hanya sebesar 32.746 RTUP. provinsi yang paling banyak menerima bantuan tersebut yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Jawa Tengah adalah provinsi terbanyak yang menerima bantuan pestisida dan obat-obatan yaitu sebanyak 9.973 RTUP. Di tahun 2013 seluruh provinsi jumlah RTUP yang menerima bantuan pestisida dan Obat-obatan

Gambar 5.6

Jumlah RTUP Penerima Bantuan Pestisida dan Obat-obatan di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013



Sumber: BPS, Sensus Pertanian, 2013

mengalami peningkatan. Jumlah keseluruhan RTUP yang menerima bantuan meningkat menjadi 868.075 RTUP. Peningkatan jumlah penerima yang signifikan terjadi di Provinsi Jawa Timur dimana pada tahun 2003 jumlah penerima sebanyak 6.740 RTUP dan meningkat di 2013 menjadi 174.509. Dengan jumlah tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi paling banyak menerima bantuan Pestisida dan Obat-obatan di tahun 2013. Provinsi lainnya yang paling banyak menerima bantuan pestisida dan obat-obatan adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, NAD, dan Sumatera Selatan.

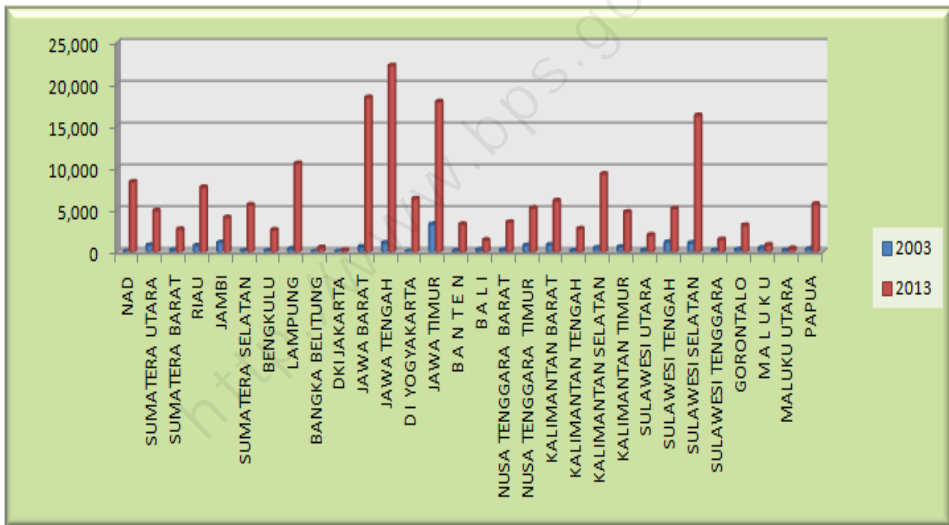


Bantuan Alat dan Mesin

Jumlah RTUP yang menerima bantuan alat dan mesin di tahun 2013 sebanyak 15.283 RTUP. Provinsi yang paling banyak menerima bantuan tersebut yaitu Provinsi Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Jawa Timur adalah provinsi yang paling banyak menerima bantuan alat dan mesin dimana jumlah RTUP yang menerima bantuan tersebut sebanyak 3.277 RTUP. Pada tahun 2013 jumlah penerima bantuan hampir diseluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dengan jumlah penerima bantuan meningkat menjadi 183.502 RTUP. Meskipun Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penerima terbanyak namun peningkatan penerima terbesar terjadi di Provinsi NAD, dimana pada tahun 2003 jumlah penerima bantuan alat dan mesin hanya berjumlah 7 RTUP meningkat di tahun 2013 menjadi 8.370 RTUP. Provinsi lainnya yang paling banyak menerima bantuan alat dan mesin yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Selatan

Gambar 5.7

Jumlah RTUP Penerima Bantuan Alat dan Mesin di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013



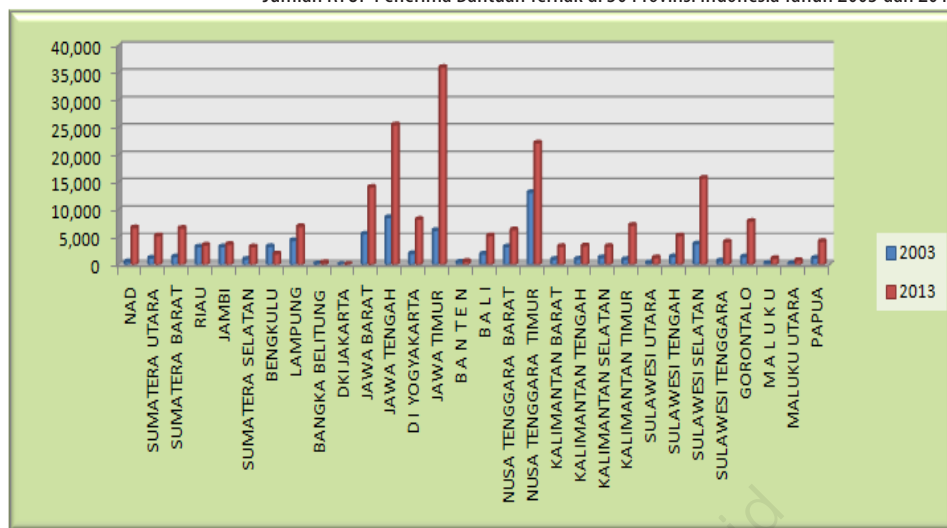
Sumber: BPS, Sensus Pertanian 2013

Bantuan Ternak

Pada tahun 2003 jumlah RTUP yang menerima bantuan ternak sebanyak 73.109 RTUP dengan provinsi yang paling banyak menerima bantuan adalah Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi terbanyak yang menerima bantuan yaitu 13.187 RTUP. Pada Tahun 2013 rata-rata jumlah penerima bantuan ternak diseluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan. Jumlah RTUP yang menerima bantuan ternak meningkat menjadi 214.634 RTUP. Peningkatan terbesar ada di Provinsi Jawa Timur dimana jumlah RTUP yang menerima bantuan ternak sebanyak 36.028 jumlah

Gambar 5.8

Jumlah RTUP Penerima Bantuan Ternak di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013



Sumber: BPS, Sensus Pertanian, 2013

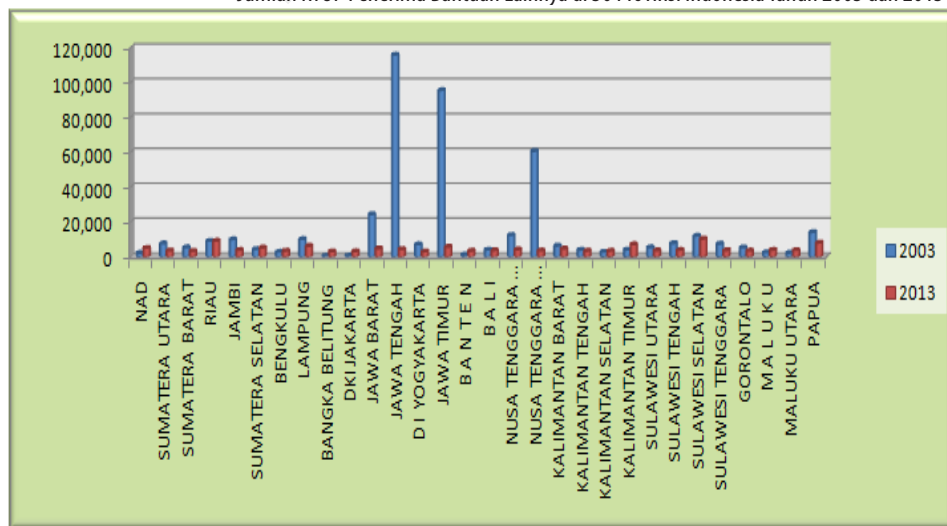
tersebut meningkat bila dibandingkan di tahun 2003 yang hanya berjumlah 6.252 RTUP. Provinsi lainnya yang paling banyak menerima bantuan ternak pada tahun 2013 yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

Bantuan Lainnya

Jumlah RTUP yang menerima bantuan lainnya di tahun 2003 sebanyak 445.071 RTUP. Provinsi yang paling banyak menerima bantuan tersebut yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Jawa

Gambar 5.9

Jumlah RTUP Penerima Bantuan Lainnya di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013



Sumber: BPS, Sensus Pertanian, 2013

Timur menjadi Provinsi yang terbanyak yang menerima bantuan dengan jumlah 115.735 RTUP. Pada tahun 2013 jumlah penerima bantuan lainnya mengalami penurunan menjadi 135.517 RTUP, penurunan yang signifikan terjadi di Provinsi Jawa Timur dimana jumlah RTUP penerima bantuan menurun menjadi 4.253 RTUP. Tidak semua provinsi mengalami penurunan penerima bantuan ada pula provinsi yang mengalami peningkatan jumlah penerima bantuan. Provinsi yang mengalami peningkatan jumlah penerima bantuan lainnya antara lain provinsi NAD, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku dan Maluku Utara.

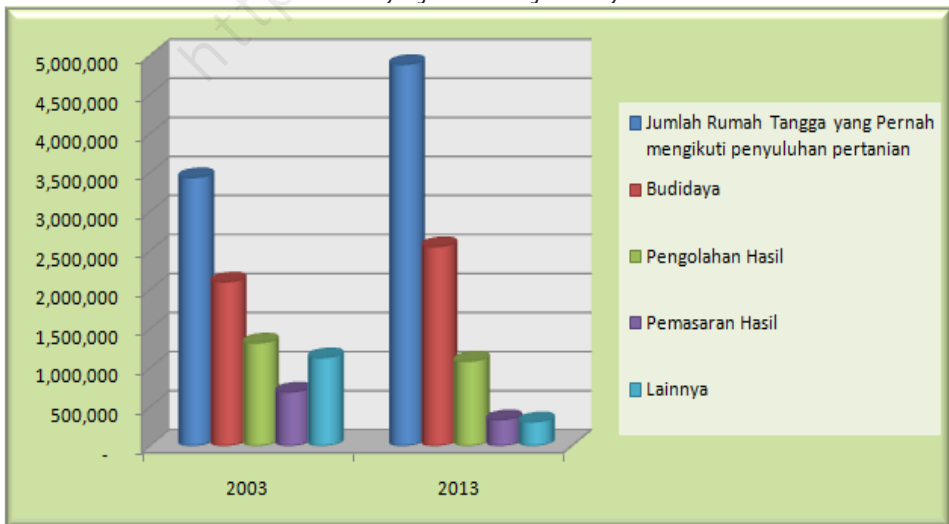
5.2. Penyuluhan

Penyuluhan pertanian merupakan kegiatan pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan non formal dibidang pertanian. Tujuan dari pemberian bantuan penyuluhan adalah agar para petani dan keluarganya mampu secara mandiri mengorganisasi dirinya dan masyarakatnya untuk bisa hidup lebih sejahtera sehingga pertanian di Indonesia dapat berkembang serta dapat memajukan perekonomian. Jenis penyuluhan yang difasilitasi oleh pemerintah antara lain mengenai budidaya, pengolahan hasil, pemasaran hasil dan lainnya yang masih terkait dengan pertanian.

Pada tahun 2013 jumlah rumah tangga yang pernah mengikuti penyuluhan pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2003. Jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan terkait budidaya meningkat di tahun 2013, sedangkan untuk penyuluhan pengolahan hasil, pemasaran hasil dan lainnya mengalami penurunan.

Gambar 5.10

Jumlah RTUP yang Pernah Mengikuti Penyuluhan Pertanian Tahun 2003 dan 2013



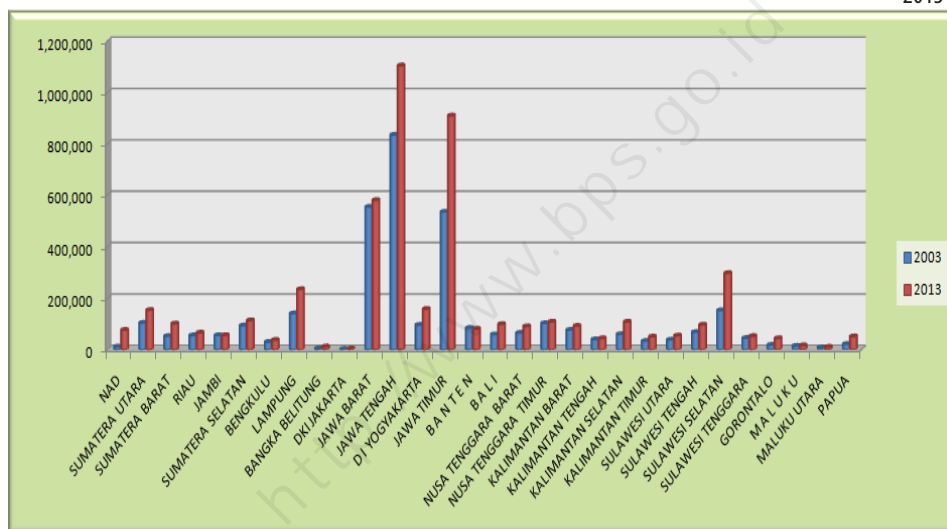
Sumber: BPS, Sensus Pertanian, 2013

Jumlah Rumah Tangga yang Pernah Mengikuti Penyuluhan Pertanian

Jumlah rumah tangga yang pernah mengikuti penyuluhan pertanian pada tahun 2003 mencapai 3.43.4.521. RTUP jumlah tersebut meningkat di tahun 2013 menjadi 4.883.132 RTUP. Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi yang terbanyak mengikuti penyuluhan yaitu 834.701 RTP jumlah tersebut meningkat di tahun 2013 menjadi 1.104.289 RTP. Jumlah rumah tangga yang pernah mengikuti penyuluhan pertanian mengalami peningkatan hampir diseluruh provinsi di Tahun 2013. Provinsi Banten menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami penurunan jumlah rumah tangga yang mengikuti penyuluhan pertanian. Dimana pada tahun 2003 jumlah rumah tangga yg mengikuti penyuluhan sebanyak 83.339 RTUP dan menurun di tahun 2013 menjadi 79.959.

Gambar 5.11

Jumlah Rumah Tangga yang Pernah Mengikuti Penyuluhan Pertanian di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013



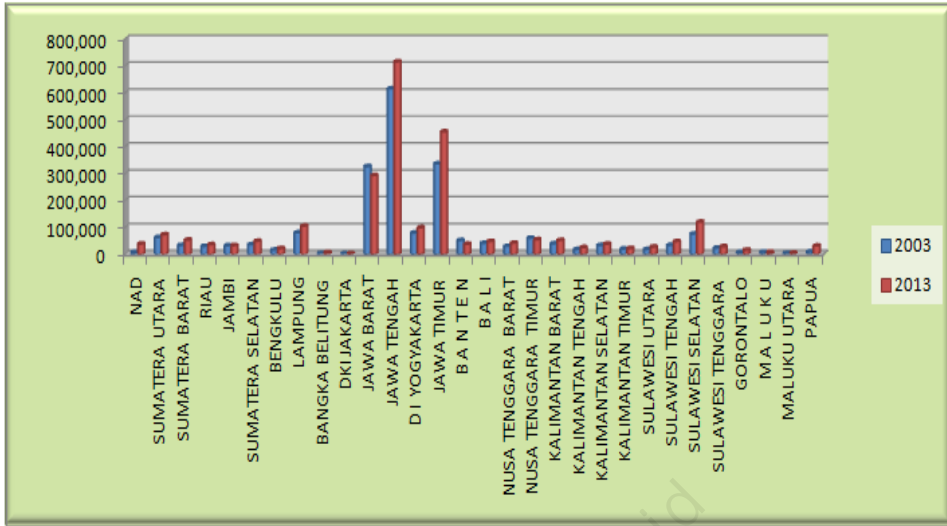
Sumber: BPS, Sensus Pertanian, 2013

Penyuluhan Budidaya

Jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan budidaya di tahun 2003 sebanyak 2.099.921 RTUP dan mengalami peningkatan di tahun 2013 menjadi 2.550.591. Provinsi Jawa Tengah memiliki RTUP terbanyak yang mengikuti penyuluhan budidaya yaitu sebanyak 614.148 RTUP di tahun 2003 dan meningkat menjadi 714.087 di tahun 2013. Pada tahun 2013 hampir diseluruh provinsi di Indonesia jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan budidaya mengalami peningkatan. Namun ada beberapa provinsi yang mengalami penurunan jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan budidaya, yaitu Provinsi Banten dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2003 jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan budidaya sebanyak

Gambar 5.12

Jumlah RTUP yang Mengikuti Penyuluhan Budidaya di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013



Sumber: BPS, Sensus Pertanian, 2013

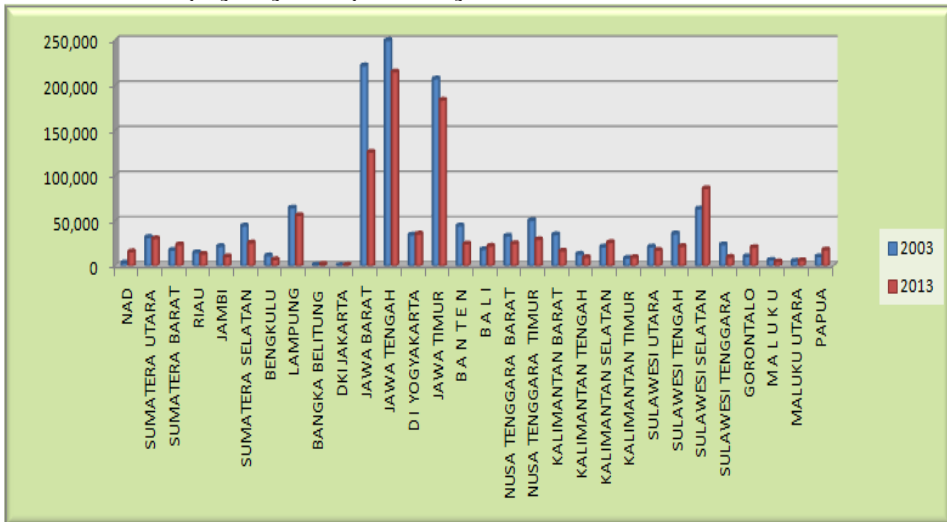
50.430 dan di tahun 2013 jumlah tersebut menurun menjadi 36.442 RTUP sedangkan jumlah RTUP di Provinsi NTT yang mengikuti penyuluhan budidaya di tahun 2003 sebanyak 59.011 RTUP dan menurun menjadi 53.545 di tahun 2013.

Penyuluhan Pengolahan Hasil

Pada tahun 2003 RTUP yang mengikuti penyuluhan pengolahan hasil berjumlah 1.317.615 RTUP jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 1.084.432 RTUP. Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah RTUP terbanyak yang

Gambar 5.13

Jumlah RTUP yang Mengikuti Penyuluhan Pengolahan Hasil di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013



Sumber: BPS, Sensus Pertanian 2013

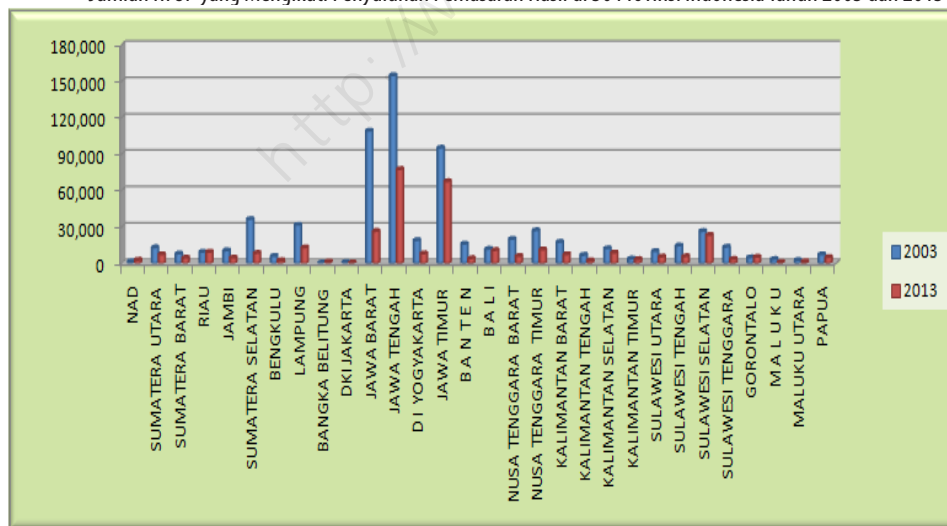
mengikuti penyuluhan pengolahan hasil yaitu 249.501 RTUP namun jumlah tersebut turun di tahun 2013 menjadi 214.753 RTUP. Pada tahun 2013 cukup banyak provinsi yang mengalami penurunan jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan pengolahan hasil, namun ada beberapa provinsi juga yang mengalami peningkatan. Provinsi yang terlihat paling signifikan mengalami penurunan jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan budidaya adalah Provinsi Jawa Barat, dimana pada tahun 2003 jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan pengolahan hasil sebanyak 221.516 RTUP dan menurun di tahun 2013 menjadi 125.801 RTUP.

Penyuluhan Pemasaran Hasil

Pada tahun 2003 jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan terkait dengan pemasaran hasil diseluruh Indonesia berjumlah 690.051 RTUP jumlah tersebut menurun di tahun 2013 menjadi 335.061 RTUP. Pada tahun 2013 rata-rata jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan pemasaran hasil mengalami penurunan. Provinsi yang paling banyak mengalami penurunan adalah Provinsi Sumatera Selatan, dimana pada tahun 2003 jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan pemasaran hasil sebanyak 36.249 RTUP menurun di tahun 2013 menjadi 8.324 RTUP. Gorontalo menjadi provinsi satu-satunya yang mengalami peningkatan jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan pemasaran hasil. Pada tahun 2003 RTUP yang mengikuti pelatihan di Gorontalo berjumlah 4.636 dan meningkat menjadi 5.112 RTUP di tahun 2013.

Gambar 5.14

Jumlah RTUP yang Mengikuti Penyuluhan Pemasaran Hasil di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013



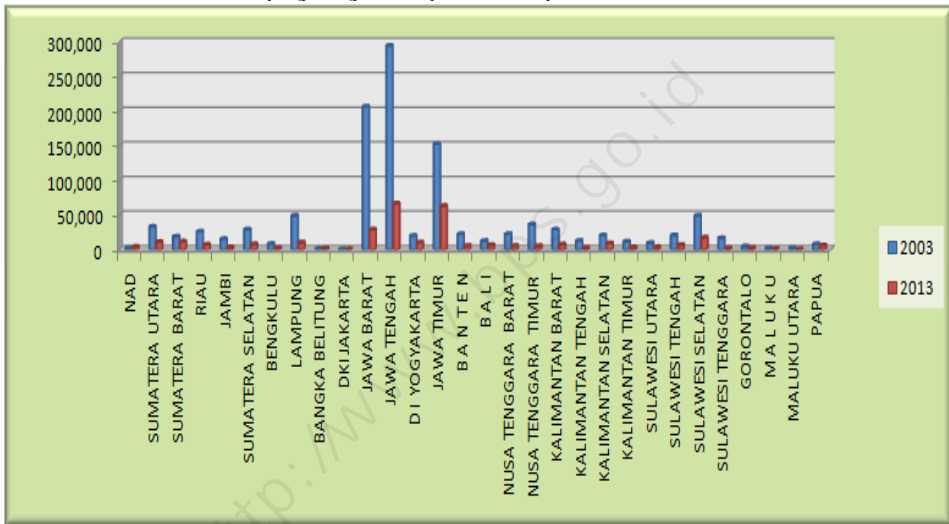
Sumber: BPS, Sensus Pertanian, 2013

Penyuluhan Lainnya

Bila dibandingkan dengan tahun 2003, jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan lainnya di tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat drastis. Dimana jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan lainnya hanya sebanyak 308.275 sedangkan pada tahun 2003 jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan lainnya mencapai 1.128.835 RTUP. Pada tahun 2013 rata-rata diseluruh provinsi jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan lainnya mengalami penurunan. Hanya ada tiga provinsi yang mengalami peningkatan jumlah RTUP yang mengikuti penyuluhan lainnya meskipun peningkatannya tidak terlalu besar. Provinsi tersebut yaitu NAD, Bangka Belitung dan DKI Jakarta.

Gambar 5.15

Jumlah RTUP yang Mengikuti Penyuluhan Lainnya di 30 Provinsi Indonesia Tahun 2003 dan 2013



Sumber: BPS, Sensus Pertanian, 2013



6

**PETANI INDONESIA
MAKIN SEJAHTERA?
PERSPEKTIF DARI
SENSUS PERTANIAN
2013**

6

Petani Indonesia Makin Sejahtera? Perspektif Dari Sensus Pertanian 2013



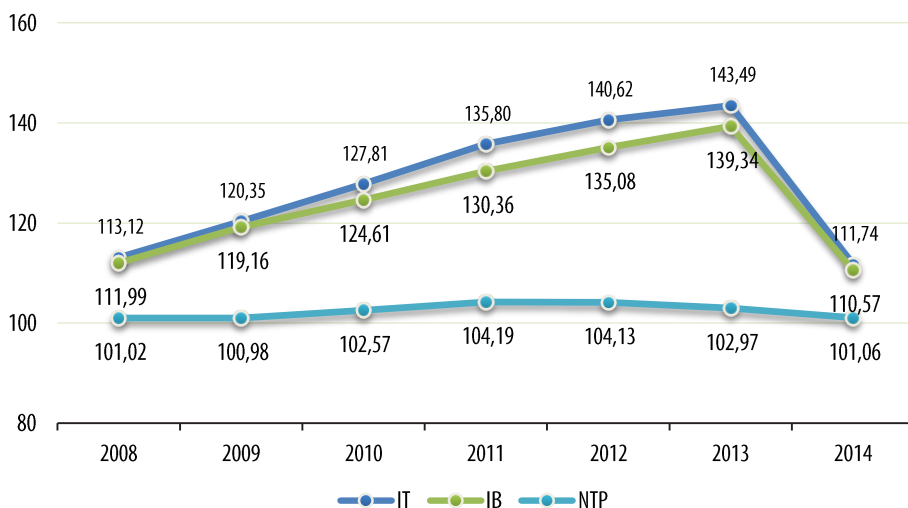
6.1. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Hingga saat ini, sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki kemakmuran terendah dibanding sektor ekonomi lainnya. Selama lima tahun terakhir, Nilai Tukar Petani (NTP) hanya meningkat kurang dari satu persen. Fenomena ini menjadi salah satu indikasi bahwa peningkatan kesejahteraan petani berjalan sangat lambat.

Berdasarkan rilis dari Kementerian Pertanian dalam Buletin Bulanan Indikator Makro Sektor Pertanian pada Bulan September 2014, perkembangan Indeks Harga yang Diterima (IT) pada periode tahun 2008 hingga bulan Oktober 2014 cenderung

Gambar 6.1

Perkembangan IT, IB dan NTP Nasional, 2008 – Oktober 2014



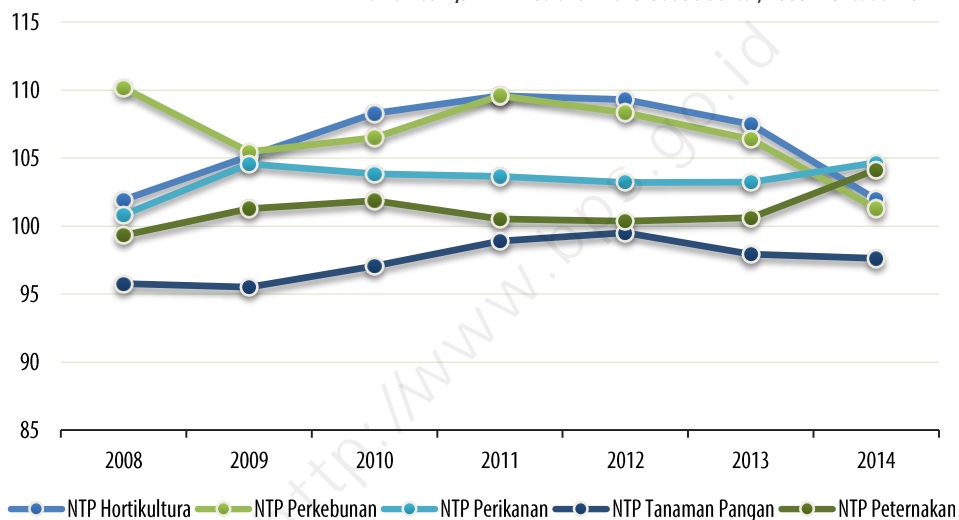
Sumber : BPS, 2014

mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,13 persen. Demikian juga nilai Indeks Harga yang Dibayar (IB) pada periode yang sama mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,56 persen. Namun demikian, peningkatan IT yang lebih besar dibandingkan IB menyebabkan NTP bulanan pada periode tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen (Gambar 6.1).

Apabila perkembangan NTP tersebut dilihat berdasarkan subsektor, maka pola NTP tersebut berfluktuasi dan cenderung meningkat. NTP subsektor tanaman pangan naik sebesar 0,43 persen, subsektor hortikultura naik sebesar 0,90 persen, subsektor peternakan naik sebesar 0,54 persen dan subsektor perikanan naik sebesar 0,60 persen. Sementara pada saat yang sama, subsektor tanaman perkebunan rakyat turun sebesar 0,08 persen (Gambar 6.2).

Gambar 6.2

Perkembangan NTP Nasional Menurut Sub Sektor, 2008 – Oktober 2014



Sumber : BPS, 2014

6.2. Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Petani

Selain perkembangan NTP, kesejahteraan petani juga dapat dilihat dari perkembangan kondisi ekonomi rumah tangga petani yang di dalam data sensus pertanian berupa persepsi rumah tangga petani yang terbagi menjadi 5 kategori yaitu sangat meningkat, meningkat, tetap, menurun, dan sangat menurun. Untuk penjelasan perkembangan kondisi ekonomi ini, yang akan dibandingkan adalah kondisi ekonomi petani di 30 provinsi (2003 dan 2013), dengan penjelasan yang diambil adalah salah satu provinsi yang mengalami persentase penambahan atau pengurangan tertinggi.

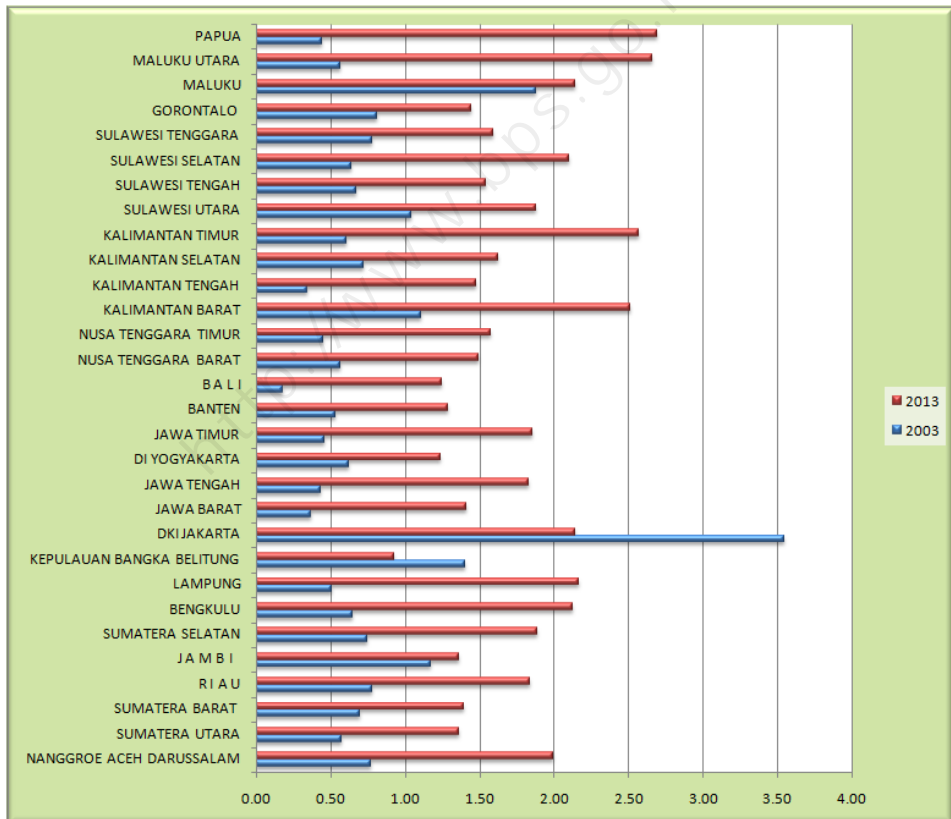
Pada tahun 2003, rumah tangga petani di Provinsi DKI Jakarta yang merasa kondisi ekonominya sangat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebesar 3,54 persen. Sedangkan pada tahun 2013, sebesar 2,14 persen rumah

tangga petani di DKI Jakarta yang merasa kondisi ekonominya sangat meningkat. Apabila dibandingkan antara tahun 2003 dan 2013 tersebut, maka jumlah rumah tangga petani di DKI Jakarta yang kondisi ekonominya sangat meningkat berkurang sebesar 39,61 persen dari kondisi ekonomi tahun 2003.

Provinsi Bali di tahun 2003 terdapat sebesar 0,18 persen rumah tangga petani yang merasa kondisi ekonominya sangat meningkat, sedangkan di tahun 2013 sebesar 1,25 persen rumah tangga petani yang merasa kondisi ekonominya sangat meningkat. Apabila dibandingkan antara tahun 2003 dan 2013 tersebut, maka jumlah rumah tangga petani di Provinsi Bali yang kondisi ekonominya sangat meningkat semakin bertambah dari kondisi ekonomi tahun 2003. Lebih jelasnya mengenai kondisi ekonomi pada 30 provinsi yang sangat meningkat dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 6.3

Percentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Kondisi Ekonomi Sangat Meningkatkan Tahun 2003 dan 2013



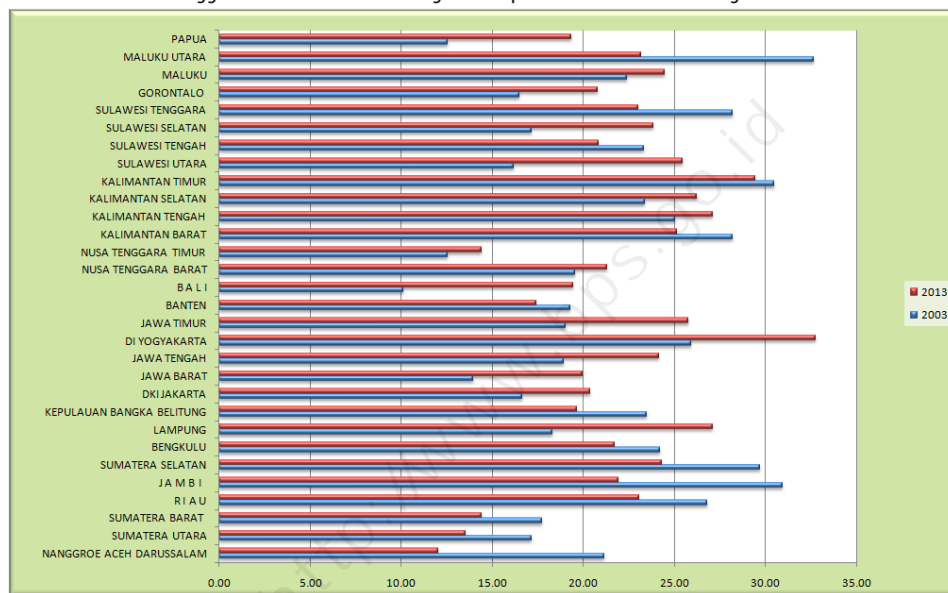
Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2014

Di Provinsi Aceh pada tahun 2003 terdapat sekitar 21,12 persen dan sekitar 12,02 persen di tahun 2013 rumah tangga petani yang merasa kondisi ekonominya meningkat. Apabila dibandingkan antara tahun 2003 dan 2013 tersebut, maka

jumlah rumah tangga petani di Aceh yang kondisi ekonominya meningkat berkurang sebesar 43,09 persen dari kondisi ekonomi di tahun 2003. Berbeda dengan Aceh, Provinsi Bali di tahun 2003 terdapat sebesar 10,11 persen rumah tangga petani yang merasa kondisi ekonominya meningkat, sedangkan di tahun 2013 sebesar 19,42 persen rumah tangga petani yang merasa kondisi ekonominya meningkat. Apabila dibandingkan antara tahun 2003 dan 2013 tersebut, maka jumlah rumah tangga petani di Provinsi Bali yang kondisi ekonominya termasuk kategori meningkat semakin bertambah (sebesar 92,03 persen). Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi ekonomi tahun 2003 dan 2013 untuk kategori meningkat dapat dilihat pada Gambar 6.4 di bawah ini.

Gambar 6.4

Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Kondisi Ekonomi Meningkat Tahun 2003 dan 2013



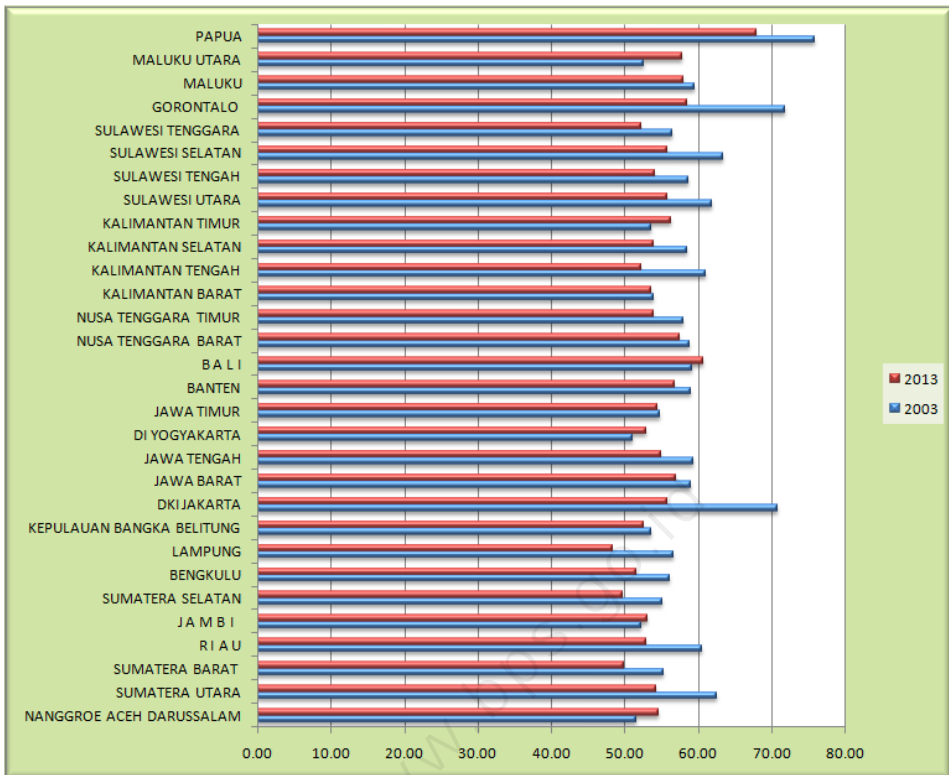
Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2013

Selain kategori kondisi ekonomi sangat meningkat dan meningkat, terdapat juga kategori tetap. Provinsi Maluku Utara terdapat sebesar 52,49 persen rumah tangga petani yang merasa kondisi ekonominya tidak berubah dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2013 terdapat 57,79 persen rumah tangga petani yang merasa kondisi ekonominya tetap. Dengan demikian, provinsi Maluku Utara mengalami pertambahan sekitar 10,09 persen untuk kondisi ekonomi yang tetap.

Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat diketahui bahwa DKI Jakarta pada tahun 2003 terdapat sekitar 70,77 persen rumah tangga petani merasa kondisi ekonominya tetap atau tidak berubah, sedangkan untuk tahun 2013 sekitar 55,75 persen rumah tangga petani merasa kondisi ekonomi mereka tetap. Persentase kondisi ekonomi rumah tangga petani dari tahun 2003 dan 2013 tersebut jika dibandingkan menunjukkan berkurangnya rumah tangga petani yang merasa kondisi ekonominya tetap, yaitu sebesar 21,23 persen.

Gambar 6.5

Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Kondisi Ekonomi Tetap Tahun 2003 dan 2013



Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2013

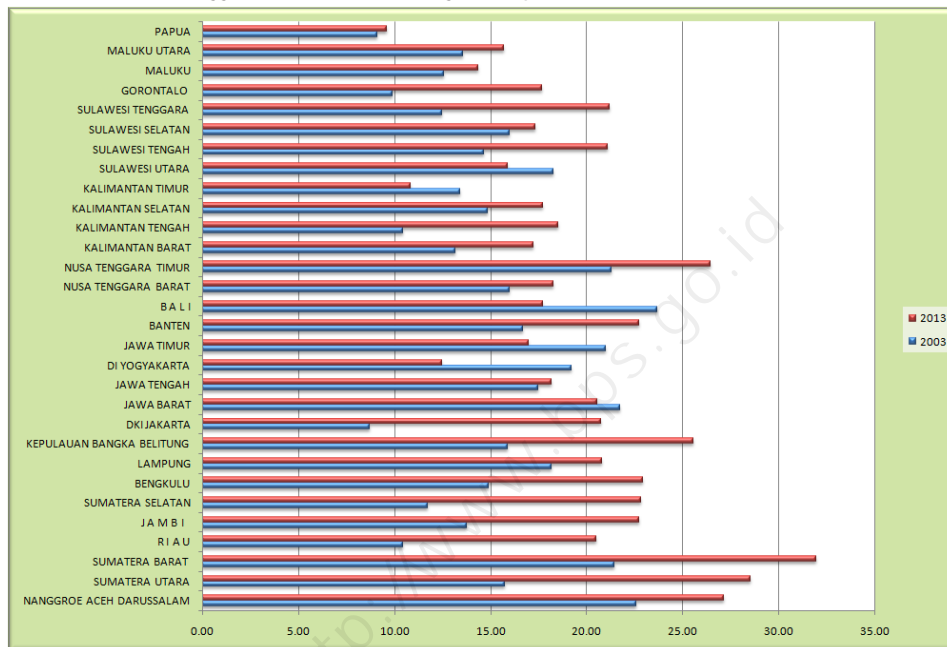
Pada tahun 2003, rumah tangga petani di Provinsi Riau yang merasa kondisi ekonominya menurun dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebesar 10,42 persen. Sedangkan pada tahun 2013, sebesar 20,49 persen rumah tangga petani yang merasa kondisi ekonominya menurun. Apabila dibandingkan antara tahun 2003 dan 2013 tersebut, maka jumlah rumah tangga petani di Riau yang kondisi ekonominya menurun semakin banyak (96,60 persen).



Provinsi Yogyakarta di tahun 2003 terdapat sebesar 19,23 persen rumah tangga petani yang merasa kondisi ekonomi mereka mengalami penurunan, sedangkan di tahun 2013 sebesar 12,48 persen rumah tangga petani yang merasa kondisi ekonominya menurun. Apabila dibandingkan antara tahun 2003 dan 2013 tersebut, maka jumlah rumah tangga petani di Yogyakarta yang kondisi ekonominya menurun semakin sedikit (35,09 persen). Gambaran mengenai perubahan kondisi ekonomi rumah tangga petani yang menurun pada tahun 2003 dan 2013 dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 6.6

Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Kondisi Ekonomi Menurun Tahun 2003 dan 2013



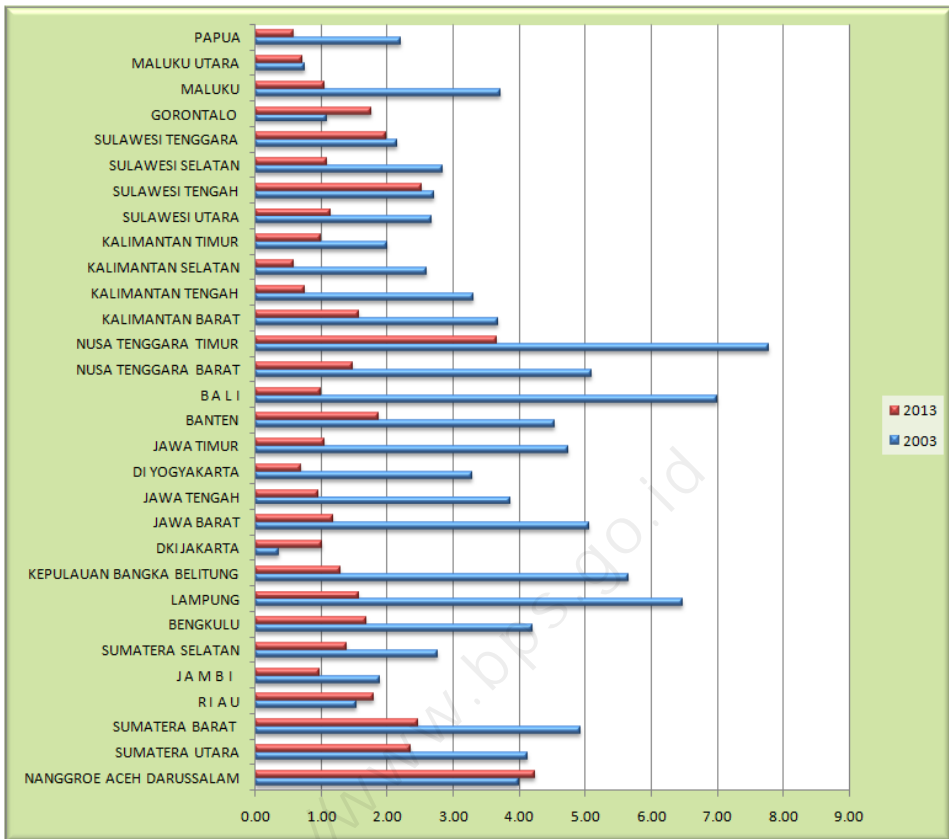
Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2013

Pada tahun 2003, rumah tangga petani di Provinsi DKI Jakarta yang merasa kondisi ekonominya sangat menurun dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebesar 0,36 persen. Sedangkan pada tahun 2013, sebesar 1,01 persen rumah tangga petani yang merasa kondisi ekonominya sangat menurun. Apabila dibandingkan antara tahun 2003 dan 2013 tersebut, maka jumlah rumah tangga petani di DKI Jakarta yang kondisi ekonominya sangat menurun semakin banyak (181,97 persen).

Provinsi Bali di tahun 2003 terdapat sebesar 7,00 persen rumah tangga petani yang merasa kondisi ekonomi mereka sangat mengalami penurunan, sedangkan di tahun 2013 sebesar 0,99 persen rumah tangga petani yang merasa kondisi ekonominya sangat menurun. Apabila dibandingkan antara tahun 2003 dan 2013 tersebut, maka jumlah rumah tangga petani di Provinsi Bali yang kondisi ekonominya sangat menurun semakin sedikit (85,90 persen). Gambaran mengenai perubahan kondisi ekonomi rumah tangga petani yang sangat menurun pada tahun 2003 dan 2013 dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 6.7

Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Kondisi Ekonomi Sangat Menurun Tahun 2003 dan 2013



Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2013

6.3. Kecukupan Pendapatan

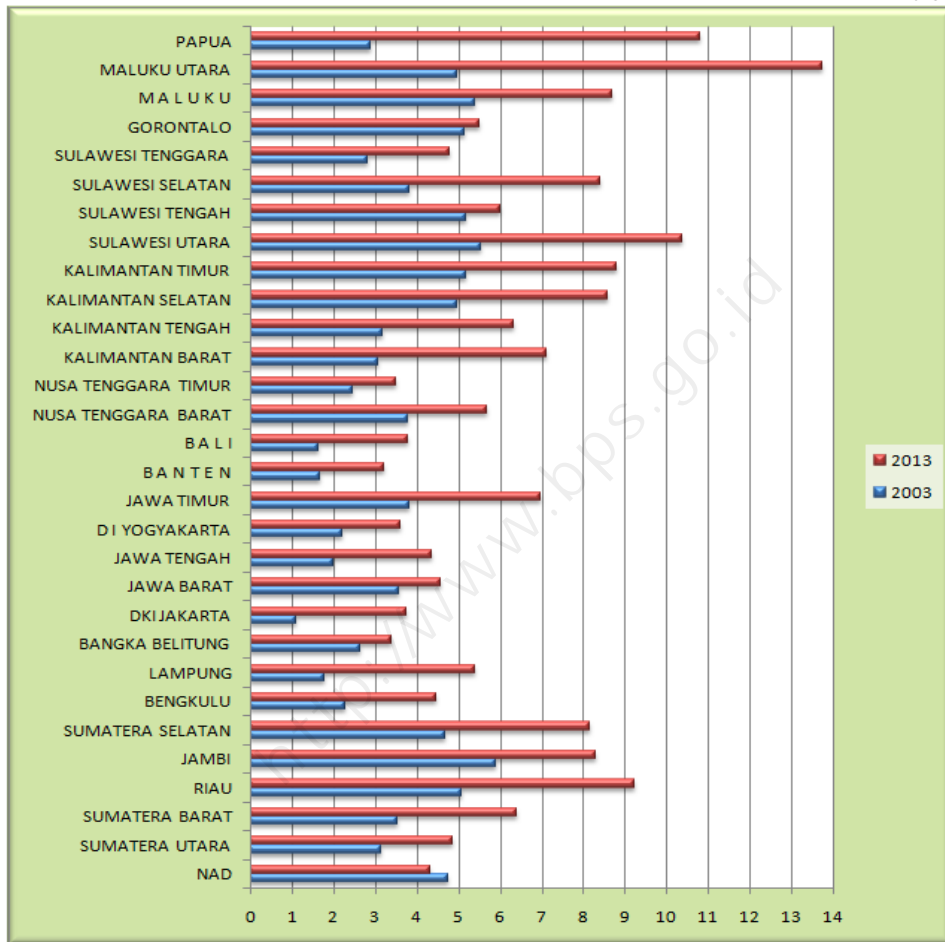
Keragaan kesejahteraan petani dapat dilihat dari bagaimana persepsi terhadap pendapatan yang diterima oleh rumah tangga petani. Berdasarkan data sensus pertanian tingkat kecukupan pendapatan rumah tangga petani terbagi menjadi 4 kategori yaitu kategori lebih dari cukup, cukup, kurang dan kurang sekali. Dari seluruh rumah tangga petani yang ada di 30 Provinsi Indonesia pada tahun 2003 persentase rumah tangga petani yang merasa pendapatannya lebih dari cukup berkisar 3,30 persen jumlah tersebut meningkat di tahun 2013 menjadi 5,97 persen. Sebagian besar persentase rumah tangga petani yang merasa pendapatannya lebih dari cukup mengalami peningkatan di tahun 2013. Sebaran persentase petani yang merasa pendapatannya lebih dari cukup terlihat pada Gambar 6.8.

Berdasarkan Gambar 6.8 diketahui bahwa pada tahun 2003 provinsi yang memiliki persentase rumah tangga petani yang merasa pendapatannya lebih dari cukup terbanyak adalah Provinsi Jambi (5,90 persen) sedangkan pada tahun 2013 adalah

Provinsi Maluku Utara (13,75 persen). Perubahan persepsi pendapatan yang sangat signifikan terjadi di Provinsi Maluku Utara dimana pada tahun 2003 persentase petani yang merasa pendapatan lebih dari cukup sebesar 4,98 persen meningkat menjadi 13,75 persen di tahun 2013.

Gambar 6.8

Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Pendapatan Lebih dari Cukup Tahun 2003 dan 2013



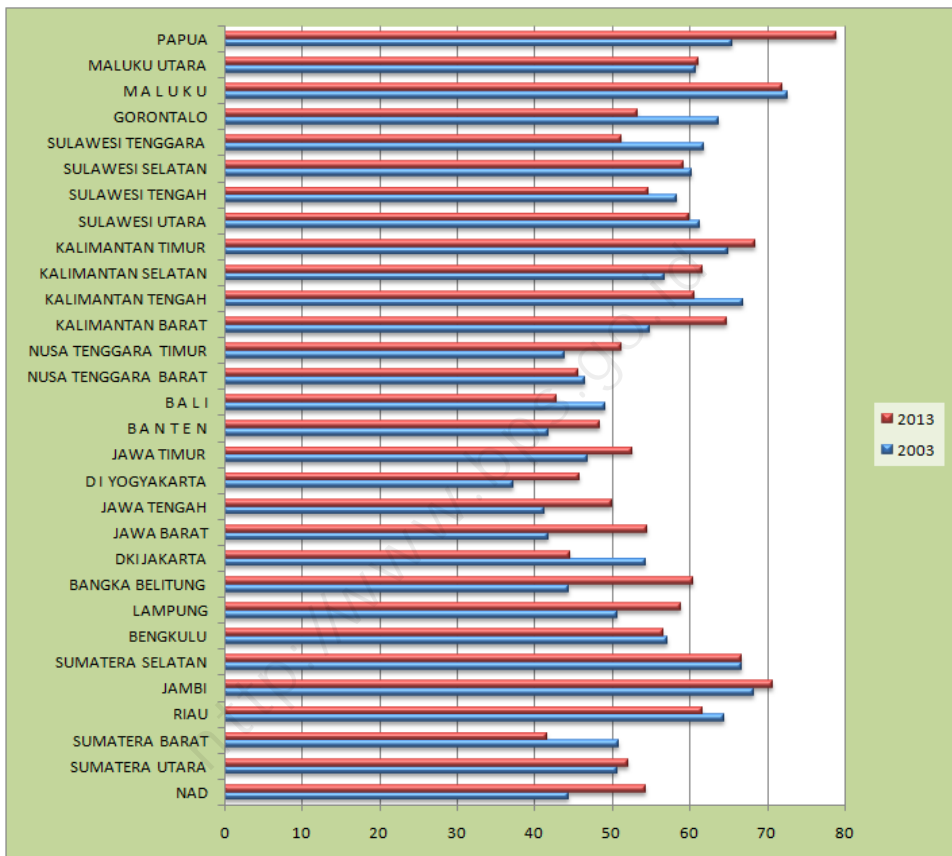
Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2013

Persentase rumah tangga petani yang merasa pendapatannya sudah cukup dari seluruh 30 provinsi Indonesia pada tahun 2003 sebesar 49,31 persen jumlah tersebut meningkat menjadi 54,75 persen di tahun 2013. Pada tahun 2003 persentase petani yang merasa pendapatannya sudah cukup terbesar ada di Provinsi Maluku (72,63%) dan terkecil di Provinsi DI Yogyakarta (37,32 persen) sedangkan di tahun 2013 persentase terbesar ada di Provinsi Papua (79,02 persen) dan terkecil di Sumatera Barat (41,64 persen). Perubahan persentase rumah tangga

petani yang merasa pendapatannya sudah cukup sangat beragam. Provinsi yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Bangka Belitung, dari 44,47 persen naik menjadi 60,49 persen sedangkan provinsi yang mengalami penurunan persentase terbesar adalah Sulawesi Tenggara dari 61,89 persen turun menjadi 53,25 persen.

Gambar 6.9

Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Pendapatan Cukup Tahun 2003 dan 2013



Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2013

Pada tahun 2003 dari seluruh 30 provinsi di Indonesia persentase rumah tangga petani yang merasa pendapatannya masih kurang adalah sebesar 39,57 persen jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 34,65 persen. Pada tahun 2003 persentase rumah tangga petani yang merasa pendapatannya merasa masih kurang terbesar adalah Provinsi DI Yogyakarta (49,27 persen) dan yang terkecil adalah Provinsi Maluku (19,37 persen). Sedangkan pada tahun 2013 provinsi yang persentasenya terbesar adalah Provinsi Bali (46,89 persen) dan terkecil adalah Provinsi Papua (9,34 persen).

Sebagian besar provinsi mengalami penurunan persentase rumah tangga petani yang merasa pendapatannya masih kurang. Penurunan persentase terbesar terjadi di Provinsi Papua dimana pada tahun 2003 persentase rumah tangga petani yang merasa pendapatannya masih kurang sebesar 27,59 persen turun menjadi 9,34 persen. Ada beberapa provinsi yang persentase rumah tangga petani yang merasa pendapatannya masih kurang mengalami peningkatan di tahun 2013. Provinsi tersebut antara lain; Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Peningkatan persentase terbesar ada di Provinsi DKI Jakarta dimana pada tahun 2003 persentase rumah tangga petani yang merasa pendapatannya masih kurang sebesar 30,17 persen menjadi 46,22 persen.

Gambar 6.10

Persentase Rumah Tangga Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Pendapatan Kurang Tahun 2003 dan 2013

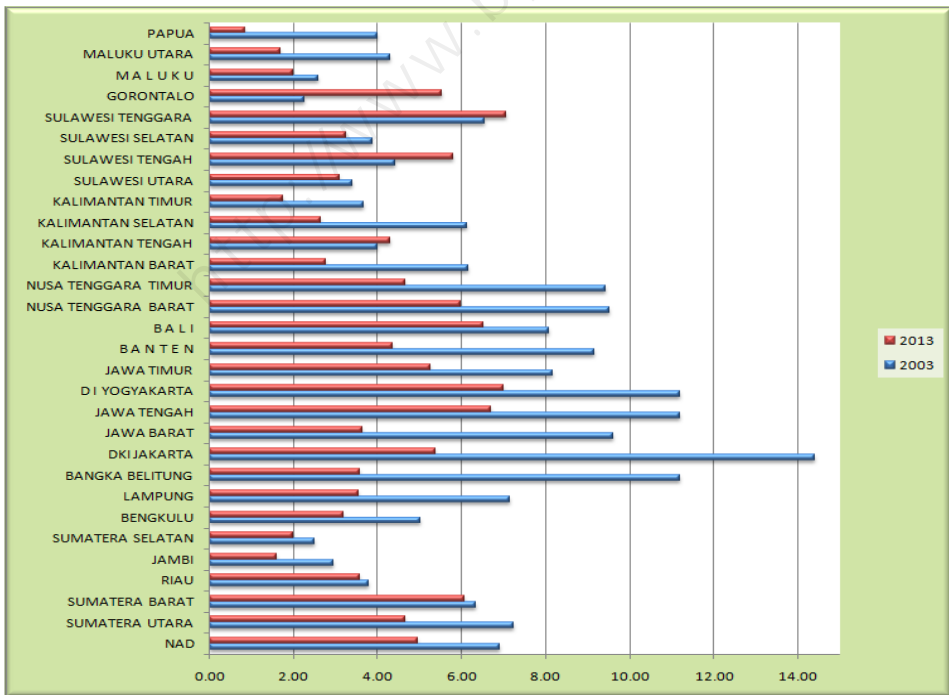


Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2013

Dari seluruh rumah tangga petani di Indonesia, persentase rumah tangga petani yang merasa pendapatannya masih kurang sekali sebesar 7,83 persen jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun 2013 yaitu menjadi 4,63 persen. Pada tahun 2003 provinsi yang memiliki persentase terbesar pada rumah tangga petani yang merasa pendapatannya masih kurang sekali adalah provinsi DKI Jakarta (14,40 persen) sedangkan persentase terkecil adalah Provinsi Gorontalo (2,25 persen). Pada tahun 2013 provinsi yang memiliki persentasi terbesar pada rumah tangga petani yang merasa pendapatannya masih kurang sekali adalah Provinsi DI Yogyakarta (6,99 persen). Sebagian besar persentase rumah tangga petani yang merasa pendapatannya masih kurang sekali mengalami penurunan di 30 provinsi. Penurunan terbesar ada di Provinsi DKI Jakarta dimana persentase pada tahun 2003 sebesar 14,40 persen menurun menjadi 5,37 persen. Hanya ada empat provinsi yang mengalami peningkatan persentase rumah tangga petani yang merasa pendapatannya masih kurang sekali, provinsi tersebut yaitu Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Peningkatan persentase terbesar ada di Provinsi Gorontalo dimana pada tahun 2003 persentase rumah tangga petani yang merasa pendapatannya masih kurang sekali sebesar 2,25 persen meningkat menjadi 5,25 persen.

Gambar 6.11

Persentase Petani di 30 Provinsi dengan Persepsi Pendapatan Kurang Sekali Tahun 2003 dan 2013



Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2013



7

**DETERMINAN
KESEJAHTERAAN
RUMAH TANGGA
USAHA PERTANIAN**



Determinan Kesejahteraan Rumah Tangga Usaha Pertanian



Alat ukur yang populer digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani adalah indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Namun demikian, konsep NTP dinilai kurang relevan, karena tidak mengakomodasi kemajuan produktivitas pertanian dan kemajuan teknologi (Bappenas dan JICA, 2013). Dalam kajian ini, tingkat kesejahteraan petani didekati dengan menggunakan Persepsi Kesejahteraan yang diproksi dengan variabel Peningkatan Keadaan Ekonomi dan Kecukupan Pendapatan yang datanya didapat dari hasil Sensus Pertanian 2013. Sebagai pembandingan, juga akan digunakan pendekatan menggunakan Nilai Tukar Petani karena pendekatan tersebut cukup populer sebagai indikator tingkat kesejahteraan petani. Variabel Peningkatan Keadaan Ekonomi, Kecukupan Pendapatan dan NTP sebagai indikator kesejahteraan (*dependent variable*) akan dilakukan analisis korelasi untuk melihat hubungan dengan faktor-faktor kelompok karakteristik RTUP, struktur sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah sebagai *independent variable*. Kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi untuk melihat pengaruh *independent variable* terhadap *dependent variable*.

7.1. Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP), Struktur Sumber Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Keadaan Ekonomi RTUP

Hubungan Karakteristik RTUP, Struktur Sumber Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah dengan Peningkatan Keadaan Ekonomi RTUP

Analisis korelasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keeratan hubungan antara RTUP, struktur pendapatan dan kebijakan pemerintah terhadap peningkatan keadaan ekonomi RTUP. Hasil analisis korelasi antara karakteristik RTUP dengan peningkatan kondisi ekonomi dapat dilihat pada Tabel 7.1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel karakteristik RTUP yang memiliki

hubungan positif yang kuat dan signifikan dengan peningkatan kondisi ekonomi adalah pendidikan menengah. Sementara yang memiliki hubungan negatif yang kuat dan signifikan adalah rata-rata jumlah anggota RTUP, ART buruh sektor pertanian dan luar sektor pertanian serta pendidikan bawah.

Tabel 7.1
Hubungan Karakteristik RTUP
dengan Peningkatan Kondisi
Ekonomi RTUP

Variabel	Kriteria Statistik	Peningkatan Kondisi Ekonomi
Rata-rata jumlah anggota RTUP	Pearson Correlation	-,991**
	Sig. (2-tailed)	,000
RTUP gurem	Pearson Correlation	-,309*
	Sig. (2-tailed)	,016
% ART buruh di sektor pertanian	Pearson Correlation	-,918**
	Sig. (2-tailed)	,000
% ART buruh di luar sektor pertanian	Pearson Correlation	0,235
	Sig. (2-tailed)	0,07
% Pendidikan bawah	Pearson Correlation	-,974**
	Sig. (2-tailed)	0
% Pendidikan menengah	Pearson Correlation	,394**
	Sig. (2-tailed)	0,002
% Pendidikan atas	Pearson Correlation	0,155
	Sig. (2-tailed)	0,236

* Correlation at 0.05(2-tailed)

** Correlation at 0.01(2-tailed)

Listwise N=60

Tabel 7.2
Korelasi antara Struktur
Sumber Pendapatan RTUP
dengan Peningkatan Kondisi
Ekonomi RTUP

Variabel Kondisi Ekonomi	Kriteria Statistik	Peningkatan Kondisi Ekonomi
% Pendapatan pertanian	Pearson Correlation	,438**
	Sig. (2-tailed)	0
% Pendapatan non pertanian	Pearson Correlation	-,172
	Sig. (2-tailed)	,189
% Pendapatan Padi+Palawija	Pearson Correlation	-,004
	Sig. (2-tailed)	,973
% Pendapatan hortikultura	Pearson Correlation	-,097
	Sig. (2-tailed)	,463
% Pendapatan perkebunan	Pearson Correlation	-,068
	Sig. (2-tailed)	,606
% Pendapatan peternakan	Pearson Correlation	,060
	Sig. (2-tailed)	,648
% Pendapatan perikanan	Pearson Correlation	,147
	Sig. (2-tailed)	,261

* Correlation at 0.05(2-tailed)

** Correlation at 0.01(2-tailed)

Listwise N=60

Hubungan antara sumber pendapatan RTUP dengan peningkatan kondisi ekonomi disajikan pada Tabel 7.2. Berdasarkan hasil analisis korelasi diketahui hanya ada satu variabel sumber pendapatan RTUP memiliki hubungan positif yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan kondisi ekonomi RTUP yaitu variabel persentase pendapatan pertanian. Sementara variabel lainnya tidak memiliki hubungan yang kuat dan signifikan.

Hasil analisis korelasi antara bantuan/subsidi yang diterima RTUP dengan peningkatan kondisi ekonomi dapat dilihat pada Tabel 7.3. Berdasarkan hasil analisis didapat hampir seluruh variabel-variabel bantuan/subsidi yang diterima RTUP signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan kondisi ekonomi. Variabel tersebut adalah variabel bantuan bibit/benih/induk, bantuan pupuk/vitamin, dan mineral, bantuan pestisida dan obat-obatan, bantuan alat mesin pertanian, dan bantuan ternak.

Tabel 7.3
Korelasi antara Bantuan/
Subsidi yang Diterima RTUP
dengan Peningkatan Kondisi
Ekonomi

Variabel	Kriteria Statistik	Peningkatan Kondisi Ekonomi
Bantuan pembiayaan kredit	<i>Pearson Correlation</i>	0,209
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,109
Bantuan Bibit/benih/ induk	<i>Pearson Correlation</i>	,348**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,006
Bantuan Pupuk/ vitamin, dan mineral	<i>Pearson Correlation</i>	,354**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,006
Bantuan Pestisida dan obat-obatan	<i>Pearson Correlation</i>	,348**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,006
Bantuan Alat mesin pertanian	<i>Pearson Correlation</i>	,329*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,01
Bantuan ternak	<i>Pearson Correlation</i>	,393**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,002

* Correlation at 0.05(2-tailed)
** Correlation at 0.01(2-tailed)
Listwise N=60

Tabel 7.4
Korelasi antara Penyuluhan
yang Diikuti RTUP dengan
Peningkatan Kondisi Ekonomi

Variabel	Kriteria Statistik	Peningkatan Kondisi Ekonomi
% RT yang mengikuti penyuluhan	<i>Pearson Correlation</i>	,302*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,019
% penyuluhan budidaya	<i>Pearson Correlation</i>	,305*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,018
% Penyuluhan pemasaran hasil	<i>Pearson Correlation</i>	,035
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,792
% Penyuluhan pengolahan hasil	<i>Pearson Correlation</i>	,120
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,360

* Correlation at 0.05(2-tailed)
** Correlation at 0.01(2-tailed)
Listwise N=60

Hubungan antara penyuluhan yang diikuti RTUP dengan peningkatan kondisi ekonomi dapat terlihat dari hasil analisis korelasi pada Tabel 7.4. Variabel-variabel yang memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap peningkatan kondisi ekonomi adalah persentase rumah tangga yang mengikuti penyuluhan, persentase penyuluhan budidaya dan persentase penyuluhan pengolahan hasil.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Keadaan Ekonomi RTUP

Variabel karakteristik RTUP yang diwakili oleh rata-rata jumlah anggota RTUP, persentase ART buruh di sektor pertanian dan persentase pendidikan bawah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan keadaan ekonomi RTUP. Diantara variabel karakteristik RTUP, rata-rata jumlah anggota RTUP mempunyai pengaruh paling besar. Untuk kelompok variabel struktur sumber pendapatan diperoleh hasil yang menarik dengan tidak signifikannya variabel sumber pendapatan dari subsektor hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Begitu juga sumber pendapatan di luar sektor pertanian. Satu-satunya variabel struktur sumber pendapatan yang signifikan adalah variabel sumber pendapatan padi & palawija.

Pada kelompok variabel kebijakan, baik bantuan/subsidi maupun penyuluhan menunjukkan hasil yang menarik. Variabel bantuan pembiayaan kredit, variabel bantuan pestisida dan obat-obatan serta variabel bantuan alat mesin pertanian tidak signifikan mempengaruhi keadaan ekonomi RTUP. Kuat dugaan karena sedikitnya RTUP yang mendapat bantuan, sehingga dampaknya tidak signifikan pada peningkatan keadaan ekonomi. Temuan lainnya adalah ternyata bantuan bibit/benih/induk justru secara signifikan berpengaruh negatif, meskipun pengaruhnya kecil. Hal ini karena bantuan benih yang khusus diberikan kepada RTUP sektor tanaman padi+palawija (sebagaimana dijabarkan Bab 5), dimana tingkat kesejahteraan RTUP-nya masih jauh di bawah rata-rata tingkat kesejahteraan RTUP sub sektor pertanian lainnya. Dengan demikian semakin banyak bantuan benih diberikan kepada suatu wilayah, menunjukkan bahwa semakin banyaknya RTUP yang mengusahakan padi+palawija, yang sekaligus juga menunjukkan semakin rendahnya tingkat kesejahteraan RTUP di wilayah tersebut. Sementara bantuan pupuk, vitamin dan mineral berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan keadaan ekonomi RTUP. Temuan ini bertolak belakang dengan pendapat yang selama ini berkembang yang umumnya menyatakan bahwa bantuan pupuk tidak tepat sasaran.

Temuan lain yang menarik adalah variabel penyuluhan budidaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan keadaan ekonomi. Hal berbeda untuk variabel penyuluhan pemasaran hasil dan variabel penyuluhan pengolahan hasil yang tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan pentingnya

keberadaan petugas penyuluh lapangan (PPL) untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan petani dalam proses budidaya. Ke depan, PPL harus lebih gencar melakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan/kursus cara budidaya yang baik. Sementara penyuluhan pemasaran dan hasil dan penyuluhan pengolahan tidak terlalu penting bagi petani. Hal ini sejalan dengan temuan hasil sensus pertanian 2013 yang menyatakan bahwa hanya sekitar 9 % RTUP yang melakukan kegiatan pengolahan. Secara rinci, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan keadaan ekonomi rumah tangga usaha pertanian disajikan pada Tabel 7.5.

Variabel	Coefficients	Sig.
(Constant)	1,260	,000
Rata-rata jumlah anggota RTUP	-,555	,000
RTUP gurem	-,002	,550
% ART buruh di sektor pertanian	,046	,039
% Pendidikan bawah	-,284	,048
% Pendidikan menengah	,021	,538
% Pendidikan atas	,037	,751
% Pendapatan padi+palawija	,023	,085
% Pendapatan hortikultura	-,023	,418
% Pendapatan perkebunan	,008	,121
% Pendapatan peternakan	-,004	,822
% Pendapatan perikanan	,007	,609
% Pendapatan non pertanian	,004	,865
Bantuan pembiayaan kredit	-,019	,103
Bantuan bibit/benih/ induk	-,088	,003
Bantuan pupuk/ vitamin, dan mineral	,036	,030
Bantuan pestisida dan obat-obatan	,024	,121
Bantuan alat mesin pertanian	-,007	,526
Bantuan ternak	,024	,057
% RT yang mengikuti penyuluhan	-,065	,084
% penyuluhan budidaya	,120	,059
% Penyuluhan pemasaran hasil	,126	,346
% Penyuluhan pengolahan hasil	,029	,690
R-squared	99,6%	
F-statistik	228,393	
Prob (F-stat)	0,000	

Tabel 7.5
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Peningkatan Keadaan Ekonomi Rumah
Tangga Usaha Pertanian

7.2. Pengaruh Karakteristik Rumahtangga Usaha Pertanian (RTUP), Struktur Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kecukupan Pendapatan RTUP

Hubungan Karakteristik RTUP, Struktur Sumber Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah dengan Kecukupan Pendapatan RTUP

Hasil analisis korelasi yang disajikan pada Tabel 7.6 menunjukkan bahwa variabel rata-rata jumlah anggota RTUP mempunyai korelasi negatif dengan kecukupan pendapatan. Hubungan yang sama juga terjadi antara proporsi ART buruh di sektor pertanian dan pendidikan bawah dengan kecukupan pendapatan yang signifikan dengan korelasi negatif. Berbeda dengan ART yang bekerja sebagai buruh di luar sektor pertanian yang mempunyai hubungan yang positif dengan kecukupan pendapatan.

Selain rata-rata ART, proporsi ART buruh di sektor pertanian, dan pendidikan bawah, variabel RTUP lainnya yang mempunyai hubungan yang signifikan adalah pendidikan menengah. Sedangkan variabel-variabel dari karakteristik RTUP yang mempunyai hubungan tidak signifikan dengan kecukupan pendapatan yaitu antara lain: rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan, % ART buruh di luar sektor pertanian dan % pendidikan atas.

Tabel 7.6
Hubungan Karakteristik RTUP dengan Kecukupan Pendapatan RTUP

Variabel	Kriteria Statistik	Kecukupan Pendapatan
Rata-rata jumlah Anggota RTUP	<i>Pearson Correlation</i>	-,989**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0
RTUP gurem	<i>Pearson Correlation</i>	-,290*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,025
% ART Buruh di Sektor Pertanian	<i>Pearson Correlation</i>	-,954**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0
% ART Buruh di luar Sektor Pertanian	<i>Pearson Correlation</i>	0,195
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,135
% Pendidikan bawah	<i>Pearson Correlation</i>	-,992**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000
% Pendidikan menengah	<i>Pearson Correlation</i>	,394**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,002
% Pendidikan atas	<i>Pearson Correlation</i>	,135
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,305

* Correlation at 0.05(2-tailed)

** Correlation at 0.01(2-tailed)

Listwise N=60

Korelasi antara Struktur Sumber Pendapatan RTUP dengan Kecukupan Pendapatan RTUP dapat dilihat pada Tabel 7.7. Dari delapan variabel yang terkait dengan variabel sumber pendapatan, tidak ada satu pun variabel yang mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan terhadap kecukupan pendapatan rumah tangga usaha pertanian.

Tabel 7.7
Korelasi antara Struktur Sumber Pendapatan RTUP dengan Kecukupan Pendapatan RTUP

Variabel	Kriteria Statistik	Kecukupan Pendapatan
% Pendapatan pertanian	<i>Pearson Correlation</i>	,144
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,272
% Pendapatan non pertanian	<i>Pearson Correlation</i>	-,197
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,132
% Pendapatan Padi+Palawija	<i>Pearson Correlation</i>	-,042
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,748
% Pendapatan hortikultura	<i>Pearson Correlation</i>	-,108
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,410
% Pendapatan perkebunan	<i>Pearson Correlation</i>	-,109
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,409
% Pendapatan peternakan	<i>Pearson Correlation</i>	,058
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,660
% Pendapatan perikanan	<i>Pearson Correlation</i>	,144
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,272

* Correlation at 0.05(2-tailed)
** Correlation at 0.01(2-tailed)
Listwise N=60

Sedangkan untuk korelasi antara variabel-variabel bantuan atau subsidi yang diterima RTUP dengan kecukupan pendapatan RTUP dapat dilihat pada Tabel 7.8. Dari enam variabel bantuan atau subsidi yang terdapat pada data sensus pertanian, lima variabel bantuan atau subsidi lain mempunyai korelasi yang signifikan dan bernilai positif yaitu bantuan bibit/benih/ induk, bantuan pupuk/ vitamin, dan mineral, bantuan pestisida dan obat-obatan, bantuan alat mesin pertanian serta bantuan ternak. Sementara variabel bantuan pembiayaan kredit tidak memiliki hubungan yang kuat dengan kecukupan pendapatan RTUP.

Tabel 7.8
Korelasi antara Bantuan/ Subsidi yang Diterima RTUP dengan Kecukupan Pendapatan RTUP

Variabel	Kriteria Statistik	Kecukupan Pendapatan
Bantuan pembiayaan kredit	<i>Pearson Correlation</i>	,165
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,207
Bantuan bibit/benih/ induk	<i>Pearson Correlation</i>	,307*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,017
Bantuan pupuk/ vitamin, dan mineral	<i>Pearson Correlation</i>	,301*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,020
Bantuan pestisida dan obat-obatan	<i>Pearson Correlation</i>	,301*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,019
Bantuan alat mesin pertanian	<i>Pearson Correlation</i>	,289*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,025
Bantuan ternak	<i>Pearson Correlation</i>	,326*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,011

* Correlation at 0.05(2-tailed)
** Correlation at 0.01(2-tailed)
Listwise N=60

Korelasi antara kebijakan program penyuluhan yang diikuti RTUP dengan Kecukupan Pendapatan RTUP dapat dilihat pada Tabel 7.9. Terlihat bahwa proporsi RTUP yang mengikuti penyuluhan dan proporsi penyuluhan budidaya mempunyai korelasi yang kuat dan positif dengan kecukupan pendapatan.

Tabel 7.9
Korelasi antara Penyuluhan yang Diikuti RTUP dengan Kecukupan Pendapatan RTUP

Variabel	Kriteria Statistik	Kecukupan Pendapatan
% RT yang mengikuti penyuluhan	<i>Pearson Correlation</i>	,320*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,013
% penyuluhan budidaya	<i>Pearson Correlation</i>	,338**
% Penyuluhan pemasaran hasil	<i>Pearson Correlation</i>	,036
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,783
% Penyuluhan pengolahan hasil	<i>Pearson Correlation</i>	,127
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,332

* Correlation at 0.05(2-tailed)
** Correlation at 0.01(2-tailed)
Listwise N=60

7.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecukupan Pendapatan RTUP

Rata-rata jumlah anggota RTUP, serta pendidikan yang mewakili kelompok variabel karakteristik RTUP menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi kecukupan pendapatan RTUP, sementara variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang paling besar terhadap persepsi kecukupan pendapatan RTUP. Sementara itu, pada kelompok variabel struktur sumber pendapatan, tidak ada variabel yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat kecukupan pendapatan.



Hal yang berbeda pada kelompok variabel bantuan, dimana bantuan pupuk/vitamin dan mineral memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kecukupan pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan pupuk/vitamin dan mineral dapat mengurangi biaya input produksi yang harus dikeluarkan oleh RTUP. Dengan pengurangan biaya tersebut, maka RTUP dapat mengalokasikan biaya pupuk untuk mencukupi kebutuhan lainnya.

Variabel <i>Dependent</i>	<i>Coefficients</i>	<i>Sig.</i>
(Constant)	2,547	,000
Rata-rata jumlah anggota RTUP	-,630	,003
% RTUP Gurem	,005	,624
% ART Buruh di Sektor Pertanian	,031	,485
% ART Buruh di luar Sektor Pertanian	-,039	,215
% Pendidikan bawah	-1,172	,001
% Pendidikan menengah	,173	,079
% Pendidikan atas	,074	,783
% Pendapatan pertanian	-,042	,273
% Pendapatan non pertanian	-,027	,564
% Pendapatan padi+palawija	-,014	,729
% Pendapatan hortikultura	-,026	,723
% Pendapatan perkebunan	,056	,460
% Pendapatan peternakan	-,019	,671
% Pendapatan perikanan	,038	,181
Bantuan pembiayaan kredit	-,032	,283
Bantuan bibit/benih/ induk	-,018	,816
Bantuan pupuk/ vitamin, dan mineral	,074	,045
Bantuan pestisida dan obat-obatan	-,017	,643
Bantuan alat mesin pertanian	-,002	,944
Bantuan ternak	,011	,680
% RT yang mengikuti penyuluhan	-,134	,193
% penyuluhan budidaya	,002	,957
% Penyuluhan pemasaran hasil	,008	,851
% Penyuluhan pengolahan hasil	,005	,889
<i>R-squared</i>	99,7%	
<i>F-statistik</i>	242,074	
<i>Prob (F-stat)</i>	0,000	

Tabel 7.10
Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Kecukupan
Pendapatan RTUP

7.3. Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP), Struktur Sumber Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Nilai Tukar Petani (NTP)

Hubungan Karakteristik RTUP, Struktur Sumber Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah dengan NTP Tahun 2003 & 2013 di 14 Provinsi dan NTP Tahun 2013 di 30 Provinsi

Analisis hubungan antara karakteristik RTUP, Struktur Sumber Pendapatan dan Kebijakan pemerintah bagi ke dalam dua model. Pertama, menganalisis korelasi di 14 Provinsi dengan data NTP tahun 2003 dan 2013. Ini dilakukan karena sebelum

Tabel 7.11
Korelasi antara Karakteristik RTUP dengan NTP

Variabel	Kriteria Statistik	NTP	
		Th. 2003 & 2013 di 14 Provinsi	Th. 2013 di 30 Provinsi
Rata-rata Jumlah Anggota RTUP	<i>Pearson Correlation</i>	0,07	-0,018
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,722	0,927
	<i>N</i>	28	30
Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan	<i>Pearson Correlation</i>	-0,257	0,145
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,187	0,445
	<i>N</i>	28	30
Jumlah petani	<i>Pearson Correlation</i>	-0,278	0,188
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,152	0,321
	<i>N</i>	28	30
% ART Buruh di Sektor Pertanian	<i>Pearson Correlation</i>	0,01	0,14
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,96	0,461
	<i>N</i>	28	30
% ART Buruh di luar Sektor Pertanian	<i>Pearson Correlation</i>	0,117	0,199
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,552	0,292
	<i>N</i>	28	30
% Pendidikan bawah	<i>Pearson Correlation</i>	-0,018	0,09
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,928	0,637
	<i>N</i>	28	30
% Pendidikan menengah	<i>Pearson Correlation</i>	0,175	-0,08
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,372	0,675
	<i>N</i>	28	30
% Pendidikan atas	<i>Pearson Correlation</i>	0,206	0,302
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,294	0,105
	<i>N</i>	28	30

* Correlation at 0.05(2-tailed)

** Correlation at 0.01(2-tailed)

tahun 2007, data NTP hanya tersedia untuk 14 Provinsi. Ke-14 provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Riau. Kedua, menganalisis korelasi di 30 provinsi dengan data NTP tahun 2013.

Hasil analisis yang disajikan pada Tabel 7.11 menunjukkan bahwa seluruh variabel karakteristik RTUP tidak mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan dengan NTP. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi *Pearson* serta tingkat signifikansi (*Sig. (2-tailed)*), baik pada tahun 2003 dan 2013 maupun tahun 2013 di 30 provinsi berada di atas taraf nyata 10%.

Tabel 7.12

Korelasi antara Sumber Pendapatan RTUP dengan NTP

Variabel	Kriteria Statistik	NTP	
		Th. 2003 & 2013 di 14 Propinsi	Th. 2013 di 30 Propinsi
% Pendapatan pertanian	<i>Pearson Correlation</i>	-0,37	,384*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,053	0,036
	<i>N</i>	28	30
% Pendapatan non pertanian	<i>Pearson Correlation</i>	0,199	0,064
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,311	0,736
	<i>N</i>	28	30
% Pendapatan lainnya	<i>Pearson Correlation</i>	-0,009	0,03
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,962	0,876
	<i>N</i>	28	30
% Pendapatan Padi+Palawija	<i>Pearson Correlation</i>	-0,107	-0,115
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,588	0,546
	<i>N</i>	28	30
% Pendapatan holtikultura	<i>Pearson Correlation</i>	0,043	-0,064
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,83	0,738
	<i>N</i>	28	30
% Pendapatan perkebunan	<i>Pearson Correlation</i>	0,292	0,02
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,131	0,918
	<i>N</i>	28	30
% Pendapatan peternakan	<i>Pearson Correlation</i>	0,111	-0,124
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,575	0,513
	<i>N</i>	28	30
% Pendapatan perikanan	<i>Pearson Correlation</i>	0,109	0,32
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,581	0,085
	<i>N</i>	28	30

* Correlation at 0.05(2-tailed)

** Correlation at 0.01(2-tailed)

Hasil analisis korelasi yang disajikan pada Tabel 7.12 menunjukkan bahwa variabel struktur sumber pendapatan RTUP yang mempunyai tingkat signifikansi dengan NTP adalah variabel persentase pendapatan pertanian, meskipun hubungan keduanya lemah dan negatif. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi *Pearson* yang bernilai negatif serta tingkat signifikansi (*Sig. (2-tailed)*), berada di atas taraf nyata 5 % pada tahun 2003 dan 2013 di 14 propinsi.

Untuk korelasi variabel persentase pendapatan pertanian dengan NTP tahun 2013 di 30 propinsi menunjukkan bahwa keduanya mempunyai hubungan yang kuat dan positif dengan taraf nyata di bawah 5 %. Untuk variabel lainnya dari sumber pendapatan menunjukkan bahwa tidak mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan dengan NTP.

Hasil analisis yang disajikan pada Tabel 7.13 menunjukkan seluruh variabel bantuan/subsidi yang diterima RTUP tidak mempunyai hubungan yang kuat dan tidak signifikan dengan NTP. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi *Pearson* serta tingkat signifikansi (*Sig. (2-tailed)*), baik pada tahun 2003 dan 2013 di 14 propinsi maupun tahun 2013 di 30 propinsi berada di atas taraf nyata 5 %.

Tabel 7.13
Korelasi antara Bantuan/Subsidi yang Diterima RTUP dengan NTP

Variabel	Kriteria Statistik	NTP	
		Th. 2003 & 2013 di 14 Propinsi	Th. 2013 di 30 Propinsi
Bantuan pembiayaan kredit	<i>Pearson Correlation</i>	-0,285	0,223
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,141	0,237
	<i>N</i>	28	30
Bantuan Bibit/benih/ induk	<i>Pearson Correlation</i>	-0,038	0,117
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,847	0,539
	<i>N</i>	28	30
Bantuan Pupuk/ vitamin, dan mineral	<i>Pearson Correlation</i>	-0,175	0,165
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,373	0,383
	<i>N</i>	28	30
Bantuan Pestisida dan obat-obatan	<i>Pearson Correlation</i>	-0,073	0,182
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,714	0,335
	<i>N</i>	28	30
Bantuan Alat mesin pertanian	<i>Pearson Correlation</i>	-0,138	0,198
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,484	0,294
	<i>N</i>	28	30
Bantuan ternak	<i>Pearson Correlation</i>	-0,204	0,103
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,297	0,586
	<i>N</i>	28	30

* Correlation at 0.05(2-tailed)

** Correlation at 0.01(2-tailed)

Berdasarkan hasil analisis korelasi yang disajikan pada Tabel 7.14 menunjukkan bahwa variabel penyuluhan yang diikuti RTUP yang mempunyai hubungan yang kuat (positif) dan signifikan dengan NTP adalah variabel persentase penyuluhan pemasaran hasil. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi *Pearson* yang bernilai positif serta tingkat signifikansi (*Sig. (2-tailed)*), berada di bawah 0,1 pada tahun 2013 di 30 propinsi. Untuk variabel lainnya dari penyuluhan yang diikuti RTUP menunjukkan bahwa tidak mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan dengan NTP.

7.3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP)

Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi NTP menunjukkan hasil yang menarik untuk ditelaah. Pada kelompok variable karakteristik RTUP hanya pendidikan menengah yang berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar petani (NTP). Koefisien pada variabel pendidikan menengah bertanda negatif dengan nilai sebesar -0,168. Artinya setiap kenaikan pendidikan menengah pada RTUP sebesar 1 %, maka akan menurunkan NTP sebesar 0,16 %. Kuat dugaan bahwa RTUP yang memiliki pendidikan menengah ke atas, sumber pendapatan utama bukan lagi bersumber dari sektor. Dugaan ini diperkuat oleh temuan bahwa kelompok struktur sumber pendapatan. Pendapatan yang berasal dari non pertanian berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan NTP. Setiap kenaikan sebesar 1 % pendapatan yang bersumber dari sektor non pertanian, akan meningkatkan NTP

Tabel 7.14

Korelasi antara Penyuluhan yang Diikuti RTUP dengan NTP

Variabel	Kriteria Statistik	NTP	
		Th 2003 & 2013 di 14 Propinsi	Th. 2013 di 30 Propinsi
% RT yang mengikuti penyuluhan	<i>Pearson Correlation</i>	0,101	0,111
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,61	0,559
	<i>N</i>	28	30
% penyuluhan budidaya	<i>Pearson Correlation</i>	0,167	0,155
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,397	0,415
	<i>N</i>	28	30
% Penyuluhan pemasaran hasil	<i>Pearson Correlation</i>	-0,294	,382*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,129	0,037
	<i>N</i>	28	30
% Penyuluhan pengolahan hasil	<i>Pearson Correlation</i>	-0,19	-0,059
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,333	0,755
	<i>Pearson Correlation</i>	28	30

* Correlation at 0.05(2-tailed)

** Correlation at 0.01(2-tailed)

sebesar 0,19 %. Sementara variabel struktur sumber pendapatan yang berasal dari sektor pertanian, baik pendapatan dari sektor padi+palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan tidak berpengaruh signifikan (Tabel 7.15).

Tabel 7.15
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani

Variabel	Koefisien	Sig.
(Constant)	,983	,042
Rata-rata jumlah anggota RTP	-,128	,672
% ART buruh di sektor pertanian	-,145	,273
% Pendidikan bawah	,928	,174
% Pendidikan menengah	-,168	,060
% Pendidikan atas	,490	,204
% Pendapatan padi+palawija	-,016	,808
% Pendapatan hortikultura	-,164	,164
% Pendapatan perkebunan	,170	,257
% Pendapatan peternakan	-,046	,524
% Pendapatan perikanan	-,004	,884
% Pendapatan non pertanian	,119	,082
Bantuan pembiayaan kredit	,096	,217
Bantuan bibit/benih/ induk	-,134	,248
Bantuan pupuk/ vitamin, dan mineral	,010	,895
Bantuan pestisida dan obat-obatan	,186	,073
Bantuan alat mesin pertanian	-,042	,618
Bantuan ternak	-,058	,428
% Penyuluhan budidaya	-,009	,749
Rata-rata penguasaan lahan	,000	,926
R-squared	92,6%	
F-statistik	3,183	
Prob (F-stat)	0,032	

Dibanding dengan analisis pada peningkatan kondisi ekonomi dan kecukupan pendapatan pada sub-bab sebelumnya, pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi NTP, lebih banyak variabel yang tidak berpengaruh signifikan. Kuat dugaan terjadi karena variabel dan kelompok variabel yang dimasukkan ke dalam model NTP yang berasal dari data sensus pertanian. tidak dapat menangkap faktor-faktor pembentuk NTP. Dugaan ini diperkuat oleh hasil analisis korelasi antara variabel peningkatan keadaan ekonomi, variabel kecukupan pendapatan dan NTP yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara NTP dengan kedua variabel lainnya (Tabel 7.16). Ini berbeda dengan hubungan antara variabel peningkatan keadaan ekonomi dengan variabel kecukupan pendapatan yang hubungannya kuat.

Tabel 7.16

Korelasi antara Variabel NTP, Peningkatan Keadaan Ekonomi dan Kecukupan Pendapatan

Variabel	t-Stat	NTP	% Peningkatan Keadaan Ekonomi	% Kecukupan Pendapatan
NTP	<i>Pearson Correlation</i>	1	,012	-,064
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.	,950	,736
	<i>N</i>	30	30	30
% Peningkatan Keadaan Ekonomi	<i>Pearson Correlation</i>	,012	1	,984**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,950	.	,000
	<i>N</i>	30	30	30
% Kecukupan pendapatan	<i>Pearson Correlation</i>	-,064	,984**	1
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,736	,000	.
	<i>N</i>	30	30	30





8

**KESIMPULAN DAN
IMPLIKASI KEBIJAKAN**

8

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan



8.1. Kesimpulan

1. Rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2013 meningkat dibanding tahun 2003. Berdasarkan subsektor, rumah tangga usaha tanaman pangan adalah yang paling banyak diusahakan, diikuti oleh rumah tangga usaha peternakan. Sebagian besar usia petani utama berada di ujung usia produktif (45-54 tahun), dengan mayoritas hanya berpendidikan sekolah dasar.
2. Proporsi pendapatan yang bersumber dari kegiatan sebagai petani mengalami penurunan, dari 60,34% di tahun 2003 menjadi 36,76% di tahun 2013. Sebaliknya jenis kegiatan buruh di sektor pertanian yang mengalami kenaikan dari 24,77% di tahun 2003 menjadi 49,03% di tahun 2013. Struktur pendapatan RTUP bersumber dari kegiatan di subsektor tanaman padi dan palawija, diikuti dengan tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura.
3. Secara keseluruhan jumlah RTUP yang menerima bantuan pertanian pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2003. Jenis bantuan yang mengalami peningkatan jumlah RTUP penerima adalah bantuan bibit/benih/induk, bantuan subsidi pupuk, bantuan pestisida dan obat-obatan dan bantuan ternak.
4. Jumlah RTUP yang pendapatannya meningkat pada tahun 2013 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2003. Begitu juga RTUP dengan tingkat kecukupan pendapatan rumah tangga petani mengalami peningkatan dibanding tahun 2003.

5. Peningkatan keadaan ekonomi dipengaruhi secara signifikan oleh kelompok variabel karakteristik RUTP yaitu rata-rata jumlah anggota RTUP, persentase ART buruh di sektor pertanian dan persentase pendidikan bawah, dengan rata-rata jumlah anggota RTUP mempunyai pengaruh paling besar. Pada kelompok variabel kebijakan, bantuan pupuk, vitamin dan mineral berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan keadaan ekonomi RUTP. Begitu juga variabel penyuluhan budidaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan keadaan ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan petugas penyuluh lapangan (PPL) untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan petani dalam proses budidaya. Sementara, bantuan bibit/benih/induk justru secara signifikan berpengaruh negatif. Hal ini karena bantuan benih yang khusus diberikan kepada RTUP sektor tanaman padi+palawija, dimana tingkat kesejahteraan RTUP-nya masih jauh di bawah rata-rata tingkat kesejahteraan RTUP sub sektor pertanian lainnya.
6. Kecukupan pendapatan dipengaruhi rata-rata jumlah anggota RTUP dan tingkat pendidikan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi kecukupan pendapatan. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang paling besar terhadap persepsi kecukupan pendapatan RTUP. Selain itu, bantuan pupuk/vitamin dan mineral memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kecukupan pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan pupuk/vitamin dan mineral dapat mengurangi biaya input produksi yang harus dikeluarkan oleh RUTP.
7. Pada kelompok variabel karakteristik RTUP pendidikan menengah yang berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar petani (NTP). Kuat dugaan bahwa RTUP yang memiliki pendidikan menengah ke atas, sumber pendapatan utamanya bukan lagi bersumber dari sector pertanian. Dugaan ini diperkuat oleh temuan bahwa kelompok struktur sumber pendapatan. Sementara variabel struktur sumber pendapatan yang berasal dari sektor pertanian, baik pendapatan dari sektor padi+palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan tidak berpengaruh signifikan. Data sensus pertanian belum cukup menangkap faktor-faktor pembentuk NTP.

8.2. Implikasi Kebijakan

1. Data keadaan ekonomi dan kecukupan pendapatan dalam hasil sensus pertanian dapat digunakan sebagai alternatif proksi untuk mengukur kesejahteraan petani. Kedua indikator ini walaupun bersifat persepsi ternyata mempunyai korelasi yang kuat satu sama lain tetapi tidak berkorelasi signifikan dengan NTP yang selama ini banyak digunakan tetapi juga banyak dikritisi kemampuannya dalam menggambarkan kesejahteraan petani.

2. Program keluarga berencana masih merupakan program yang penting digalakkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani karena jumlah tanggungan RTUP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Pada saat yang sama upaya untuk terus meningkatkan tingkat pendidikan juga diduga dapat meningkatkan kesejahteraan petani namun dengan resiko kecenderungan makin banyak anggota RTUP yang keluar dari sektor pertanian. Untuk itu diperlukan upaya keras untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan meningkatnya daya tarik sektor lain. Masalahnya ada beberapa kecenderungan yang mengkhawatirkan dari data Sensus Pertanian tahun 2013 yaitu semakin menurunnya jumlah RTUP dan semakin menuanya umur petani, padahal luasan lahan yang dikuasai semakin kondusif karena luasan rata-ratanya meningkat.
3. Peningkatan kesejahteraan pada subsektor pangan (padi+palawija) ditunjukkan oleh hasil sensus pertanian 2013 mendapatkan momentum yang baik. Walaupun sektor ini masih menempati urutan terbawah dari segi kesejahteraan, tetapi selama 10 tahun belakangan menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang tertinggi. Akibat masih rendahnya kesejahteraan RTUP pada subsektor pangan ini, bantuan yang khas untuk subsektor ini terlihat berpengaruh negatif.
4. Subsektor lain yang terlihat sedang naik daun adalah perikanan budidaya. Pada saat sektor lain jumlah rumah tangganya menunjukkan kecenderungan yang menurun, subsektor ini justru menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kebijakan dan pengembangan pada subsektor ini perlu ditingkatkan agar memperoleh hasil yang optimal.
5. Berbagai program bantuan, seperti bantuan pupuk, vitamin dan mineral merupakan salah satu upaya yang masih efektif untuk dilakukan. Peluang perbaikan dapat dilakukan pada tahap implementasi yang tepat waktu dan jumlah yang sering kali terdengar dikeluhkan selama ini. Bantuan yang lain pun pada dasarnya masih efektif yang terlihat dari adanya korelasi kuat satu sama lain.
6. Kebijakan yang juga terbukti berpengaruh positif meningkatkan kesejahteraan RTUP adalah penyuluhan, terutama penyuluhan budidaya. Sayangnya data yang tersedia hanya menyediakan informasi tentang pernah atau tidak pernah mengikuti penyuluhan, tidak sampai kepada informasi tentang frekuensi penyuluhan yang diikuti. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan khususnya penyuluhan budidaya perlu dilakukan secara lebih masif sebagaimana amanat UU No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achansi, N.A. 2014. Tantangan Baru Ekonomi Politik Indonesia Menghadapi Problema Lokal dan Tantangan Global. Orasi Ilmiah Guru Besar IPB, 24 September 2014. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2006. Statistik kesejahteraan rakyat 2006. Jakarta [ID]: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Potensi Pertanian Indonesia Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik (BPS)
- Badan Pusat Statistik. 2014a. Produk Domestik Bruto (PDB) Berdasarkan Lapangan Usaha. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik (BPS).
- Badan Pusat Statistik. 2014b. Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik (BPS).
- Bappenas. 2010. Kajian Evaluasi Revitalisasi Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani. Jakarta (ID) : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Center for International Forestry Research (CIFOR) 2007. Menuju kesejahteraan dalam masyarakat hutan: buku panduan untuk pemerintah daerah. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Ellis, F. 1992. Agricultural Policies in Development Countries. Cambridge University Press, Cambridge
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Japan International Cooperation Agency (JICA). 2013. Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) Sebagai Bahan Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019. Jakarta (ID) : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Maulana Mohamad. 2011. Prospek Implementasi Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Multikualitas Gabah dan Beras di Indonesia. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 10 No.3;:211-223.
- Marisa, Suhaila. 2011. Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Pengaruhnya terhadap Produksi Padi (Studi Kasus : Kabupaten Bogor) [Skripsi]. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor
- Mayrowan, Henny. 2013. Kebijakan Penyediaan Teknologi Pascapanen Kopi dan

Masalah Pengembangannya. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 31 No. 1, Juli :31 -49

Myers, J. E., Sweeney, T. J., & Witmer, J. M. 2005. Counseling for wellness: Theory, research, and practice. Alexandria, VA: American Counseling Association.

Norizan Abdul Ghani. 2003. Kualiti Hidup Penduduk Pulau Negeri Terengganu: Satu Kajian Di Pulau Redang dan Pulau Perhentian. PHD Tesis.

Nurjaman, Haris Sahrul Alim 2013. Permasalahan dan Kebijakan di Bidang Pertanian. [<http://www.scribd.com/doc/127007692/Permasalahan-Dan-Kebijakan-Di-Bidang-Pertanian>]. Diakses 29 November 2014.

Pusat Studi Sosial Ekonomi Kdan ebijakan Pertanian. 2006. Analisis Kebijakan Kapital, Sumberdaya Lahan dan Air : Kebijakan PSO/Subsidi Pupuk dan Sistem Distribusi. Analisis Kebijakan Vol 3. Pusat Studi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

Rachmat, M. 2013. Nilai Tukar Petani : Konsep, Pengukuran dan Relevansinya Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 31 No. 2, Desember 2013 : 111 – 122.

Sen, Shanker dan Bhattacharya, CB., 2001, Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility, Journal of Marketing Research.

Simatupang, P., S. Mardianto dan M. Maulana.2005a. Evaluasi Kebijakan Harga Gabah Tahun 2004. Puslitbang Sosek Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian 3(1):1-11. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Simatupang, P., S. Mardianto, K. Kariyasa dan M. Maulana. 2005b. Evaluasi Pelaksanaan dan Pembelian Harga Gabah Pembelian Pemerintah tahun 2005 dan Perspektif Penyesuaiannya Tahun 2006. Analisis Kebijakan Pertanian 3 (3):187- 200. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.Bogor.

Suryana, A. Dan Hermanto. 2004. Kebijakan Ekonomi Perberasan Nasional. Dalam Kasryno et al. (Eds). 2004. Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Badan Litbang Pertanian. Hal. 53-72.

Yosep, S. M. 1996. Pengaruh Program Transmigrasi dan Perkebunan Inti Rakyat terhadap Struktur Keluarga dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tradisional Irian Jaya, Kasus Suku Arfak di Kabupaten Manokwari. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

